



No. Katalog: 1413  
ISBN : 979.467.332.3

---

# Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia dan Faktor Penyebab Perubahannya

Serta Penduduk Miskin Sumatera  
Utara 2004 dan Analisis Dampak  
APBD Terhadap IPM

<http://sumut.bps.go.id>

# Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia dan Faktor Penyebab Perubahannya Serta Penduduk Miskin Sumatera Utara 2004 dan Analisis Dampak APBD Terhadap IPM

No. Katalog: 1413  
ISBN : 979.467.332.3

Ukuran Buku : 21 cm x 28 cm  
Jumlah Halaman : xv + 200

Naskah : Bidang Statistik Sosial

Tim Penyusun Naskah  
Penanggung Jawab Umum : H.M. Nasir Syarbaini, SE  
Editor & Penanggung Jawab Teknis : Ir. Sukardi, M.Si  
Koordinator : Marine Sohadi Angkat, S.Si  
Anggota : Khresnha Putra Utama Siregar  
Reny Ari Noviyanti

Gambar Kulit : Bidang Statistik Sosial

Diterbitkan oleh : Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Utara

Sumber Dana : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  
Propinsi Sumatera Utara  
Tahun Anggaran 2005

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

**Penghitungan Indeks Pembangunan  
Manusia dan Faktor Penyebab  
Perubahannya**

**Serta Penduduk Miskin Sumatera  
Utara 2004 dan Analisis Dampak  
APBD Terhadap IPM**

## KATA PENGANTAR

Publikasi Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia dan Faktor Penyebab Perubahannya serta Penduduk Miskin Sumatera Utara 2004 dan Analisis Dampak APBD Terhadap IPM diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis data yang berkaitan dengan keuangan pemerintah dan dampak penggunaan dana tersebut terhadap pembangunan manusia, dan kemiskinan.

Publikasi ini diharapkan dapat memenuhi keinginan konsumen data dan memberikan gambaran tentang penggunaan dana APBD tahun 2001-2003 dan dampaknya terhadap pembangunan manusia, dan kemiskinan. Selain itu dapat digunakan pemerintah untuk mengevaluasi apakah penggunaan dana APBD tersebut sudah tepat sasaran, efektif dan efisien, dan juga sebagai dasar pengambilan kebijakan ke depan.

Biaya publikasi ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2005. Kami menyadari bahwa hasil kajian ini belum sempurna dan masih diperlukan kajian lebih lanjut. Oleh sebab itu, bantuan dana dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara pada masa mendatang masih diharapkan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Utara yang telah memberikan data sehingga publikasi dapat diterbitkan. Kritik dan saran dari seluruh pihak untuk penyempurnaan penerbitan selanjutnya, kami terima dengan hati terbuka.

**Medan, Desember 2005**  
**Kepala Badan Pusat Statistik**  
**Provinsi Sumatera Utara,**

**H.M. Nasir Syarbaini, SE**  
**NIP. 340003769**

# Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel .....	v
Ringkasan Eksekutif .....	xiv
Bab 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup dan Metode Analisis.....	6
1.3 Konsep dan Defenisi .....	7
1.3.1 Penerimaan Daerah .....	7
1.3.2 Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan.....	9
1.3.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	15
1.3.4 Kemiskinan .....	20
Bab 2 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA.....	22
2.1 Komponen-Komponen Indeks Pembanguna Manusia .....	22
2.1.1 Indeks Pengetahuan .....	22
2.1.2 Indeks Kelangsungan Hidup .....	23
2.1.3 Indeks Daya Beli .....	25
2.2 Status Pembangunan Manusia .....	26
Bab 3 PENDUDUK MISKIN .....	27
3.1 Jumlah Penduduk Miskin .....	27
3.2 Pendidikan Penduduk Miskin .....	29
3.3 Status Pekerjaan .....	30

	Halaman
Bab 4	DESKRIPSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ..... 33
4.1	Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2001-2003 ..... 33
4.2	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2001-2003 ..... 35
4.3	Persentase Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Total Penerimaan Kabupaten/Kota Tahun 2001-2003 ..... 37
4.4	Persentase Belanja Rutin Terhadap Total Pengeluaran Kabupaten/Kota Tahun 2001-2003 ..... 39
4.5	Persentase Belanja Pembangunan Terhadap Total Pengeluaran Kabupaten/Kota Tahun 2001-2003 ..... 40
4.6	Belanja Pembangunan Per Kapita Tahun 2001-2003 ..... 43
Bab 5	ANALISIS DAMPAK PENGGUNAAN DANA APBD KABUPATEN/KOTA TERHADAP PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN PENDUDUK MISKIN ..... 45
5.1	Analisis Kondisi Belanja Pembangunan 2002-2003 dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota ..... 45
5.2	Analisis Kondisi Belanja Pembangunan 2002-2003 dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota ..... 47
5.3	Pengaruh/Dampak Belanja Pembangunan 2002-2003 terhadap Indeks Pembangunan Manusia 2004 ..... 48
5.4	Pengaruh/Dampak Belanja Pembangunan 2002-2003 terhadap Jumlah Penduduk Miskin 2004 ..... 50
Bab 6	RANGKUMAN DAN SARAN ..... 53
6.1	Rangkuman ..... 53
6.2	Saran ..... 54
Lampiran	..... 55

# Daftar Tabel

Tabel		Halaman
1.	KOMPONEN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) MENURUT KABUPATEN/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA 2002 .....	56
2.	KOMPONEN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) MENURUT KABUPATEN/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA 2004 .....	57
3.	JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT KABUPATEN/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2002 DAN 2004.....	58
4.	DISTRIBUSI PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PENDIDIKAN TERTINGI YANG DITAMATKAN TAHUN 2004 .....	59
5.	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN USIA 15 TAHUN KEATAS MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN STATUS BEKERJA, TAHUN2004 .....	60
6.	REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT JENIS PENERIMAAN 2001 – 2003.....	61
7.	REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS MENURUT JENIS PENERIMAAN 2001 .....	62
8.	REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH 2001 – 2003.....	63
9.	REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN MENURUT JENIS PENERIMAAN 2001 – 2003 .....	64
10.	REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH MENURUT JENIS PENERIMAAN 2001 – 2003 .....	65
11.	REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR MENURUT JENIS PENERIMAAN 2001 – 2003 .....	66
12.	REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA MENURUT JENIS PENERIMAAN 2001 – 2003 (000 RUPIAH) .....	67
13.	REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHAN BATU MENURUT JENIS PENERIMAAN 2001 .....	68
14.	REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN MENURUT JENIS PENERIMAAN 2001 – 2003) .....	69
15.	REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN MENURUT JENIS PENERIMAAN 2001 .....	70

16.	REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI MENURUT JENIS PENERIMAAN 2001 – 2003 (000 RUPIAH) .....	71
17.	REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO MENURUT JENIS PENERIMAAN 2001 .....	72
18.	REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG MENURUT JENIS PENERIMAAN 2001 – 2003 .....	73
19.	REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT MENURUT JENIS PENERIMAAN 2001 – 2003 .....	74
20.	REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA MENURUT JENIS PENERIMAAN 2001 – 2003 (000 RUPIAH) .....	75
21.	REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KOTA TANJUNG BALAI MENURUT JENIS PENERIMAAN 2001 – 2003 .....	76
22.	REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR MENURUT JENIS PENERIMAAN 2001 .....	77
23.	REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI MENURUT JENIS PENERIMAAN 2001 – 2003 .....	78
24.	REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KOTA MEDAN MENURUT JENIS PENERIMAAN 2001 – 2003 (000 RUPIAH) .....	79
25.	REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KOTA BINJAI MENURUT JENIS PENERIMAAN 2001 – 2003 (000 RUPIAH) .....	80
26.	REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUNAN MENURUT JENIS PENERIMAAN 2001 – 2003 .....	81
27.	REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA 2001 – 2003 .....	82
28.	REALISASI PENERIMAAN KAB/KOTA DARI BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA 2001 – 2003.....	83
29.	REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA 2001 – 2003 .....	84
30.	REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DARI RETRIBUSI DAERAH SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/ KOTA 2001 – 2003 (000 RUPIAH) .....	85
31.	REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KAB/KOTA DARI LABA BADAN USAHA MILIK DAERAH SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA 2001 – 2003 .....	86
32.	REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KAB/KOTA DARI PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH LAINNYA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN / KOTA 2001 - 2003.....	77



33.	REALISASI PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA 2001 – 2003 .....	88
34.	REALISASI PENERIMAAN BAGI HASIL BUKAN PAJAK PEMERINTAH KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA 2001 - 2003.....	89
35.	REALISASI PENERIMAAN DANA ALOKASI UMUM PEMERINTAH KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA 2001 - 2003.....	90
36.	REALISASI PENERIMAAN DANA ALOKASI KHUSUS PEMERINTAH KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA 2001 - 2003.....	91
37.	REALISASI PENERIMAAN LAINNYA PEMERINTAH KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/ KOTA 2001 - 2003.....	92
38.	REALISASI PENERIMAAN PINJAMAN PEMERINTAH KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/ KOTA 2001 - 2003.....	93
39.	REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT JENIS PENGELUARAN 2001 - 2003.....	94
40.	REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS MENURUT JENIS PENGELUARAN 2001 - 2003.....	95
41.	REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL MENURUT JENIS PENGELUARAN 2001 - 2003.....	96
42.	REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN MENURUT JENIS PENGELUARAN 2001 - 2003 .....	97
43.	REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH MENURUT JENIS PENGELUARAN 2001 - 2003 .....	98
44.	REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR MENURUT JENIS PENGELUARAN 2001 - 2003.....	99
45.	REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA MENURUT JENIS PENGELUARAN 2001 - 2003 .....	100
46.	REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHAN BATU MENURUT JENIS PENGELUARAN 2001 - 2003.....	101
47.	REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN MENURUT JENIS PENGELUARAN 2001 - 2003.....	102
48.	REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN MENURUT JENIS PENGELUARAN 2001 - 2003.....	103
49.	REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI MENURUT JENIS PENGELUARAN 2001 - 2003.....	104
50.	REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH KABUPATEN KARO MENURUT JENIS PENGELUARAN 2001 - 2003.....	105

51.	REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG MENURUT JENIS PENGELUARAN 2001 - 2003.....	106
52.	REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT MENURUT JENIS PENGELUARAN 2001 - 2003.....	107
53.	REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA MENURUT JENIS PENGELUARAN 2001 - 2003 .....	108
54.	REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH KOTA TANJUNG BALAI MENURUT JENIS PENGELUARAN 2001 - 2003.....	109
55.	REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR MENURUT JENIS PENGELUARAN 2001 - 2003.....	110
56.	REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI MENURUT JENIS PENGELUARAN 2001 - 2003.....	111
57.	REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH KOTA MEDAN MENURUT JENIS PENGELUARAN 2001 - 2003 .....	112
58.	REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH KOTA BINJAI MENURUT JENIS PENGELUARAN 2001 - 2003 .....	113
59.	REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUAN MENURUT JENIS PENGELUARAN 2001 - 2003.....	114
60.	REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA 2001 - 2003.....	115
61.	REALISASI PENERIMAAN KAB/KOTA DARI BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA 2001 - 2003.....	116
62.	REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA 2001 - 2003.....	117
63.	REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DARI RETRIBUSI DAERAH SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/ KOTA 2001 - 2003.....	118
64.	REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KAB/KOTA DARI LABA BADAN USAHA MILIK DAERAH SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA 2001 - 2003.....	119
65.	REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KAB/KOTA DARI PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH LAINNYA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN / KOTA 2001 - 2003.....	120
66.	REALISASI PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA 2001 - 2003.....	121
67.	REALISASI PENERIMAAN BAGI HASIL BUKAN PAJAK PEMERINTAH KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA 2001 - 2003.....	122

68.	REALISASI PENERIMAAN DANA ALOKASI UMUM PEMERINTAH KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA 2001 - 2003.....	123
69.	REALISASI PENERIMAAN DANA ALOKASI KHUSUS PEMERINTAH KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA 2001 - 2003.....	124
70.	REALISASI PENERIMAAN LAINNYA PEMERINTAH KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/ KOTA 2001 – 2003 .....	125
71.	REALISASI PENERIMAAN PINJAMAN PEMERINTAH KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/ KOTA 2001 - 2003.....	126
72.	REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT JENIS PENGELUARAN 2001 - 2003.....	127
73.	REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS MENURUT JENIS PENGELUARAN 2001 - 2003.....	128
74.	REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL MENURUT JENIS PENGELUARAN 2001 - 2003.....	129
75.	REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN MENURUT JENIS PENGELUARAN 2001 - 2003.....	130
76.	REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH MENURUT JENIS PENGELUARAN 2001 - 2003 .....	131
77.	REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR MENURUT JENIS PENGELUARAN 2001 - 2003.....	132
78.	REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA MENURUT JENIS PENGELUARAN 2001 - 2003 .....	133
79.	REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHAN BATU MENURUT JENIS PENGELUARAN 2001 - 2003.....	134
80.	REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN MENURUT JENIS PENGELUARAN 2001 - 2003.....	135
81.	REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN MENURUT JENIS PENGELUARAN 2001 - 2003.....	136
82.	REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI MENURUT JENIS PENGELUARAN 2001 - 2003.....	137
82.1	REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH KABUPATEN KARO MENURUT JENIS PENGELUARAN 2001 - 2003.....	138
83.	REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG MENURUT JENIS PENGELUARAN 2001 - 2003.....	139
84.	REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT MENURUT JENIS PENGELUARAN 2001 - 2003 .....	140

85.	REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA MENURUT JENIS PENGELUARAN 2001 - 2003 .....	141
86.	REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH KOTA TANJUNG BALAI MENURUT JENIS PENGELUARAN 2001 - 2003 .....	142
87.	REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR MENURUT JENIS PENGELUARAN 2001 - 2003 .....	143
88.	REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI MENURUT JENIS PENGELUARAN 2001 - 2003 .....	144
89.	REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH KOTA MEDAN MENURUT JENIS PENGELUARAN 2001 - 2003 .....	145
90.	REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH KOTA BINJAI MENURUT JENIS PENGELUARAN 2001 - 2003 .....	146
91.	REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUAN MENURUT JENIS PENGELUARAN 2001 - 2003 .....	147
92.	REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA 2001 - 2003 .....	148
93.	REALISASI BELANJA PEGAWAI PEMERINTAH KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA 2001 - 2003 .....	149
94.	REALISASI BELANJA BARANG PEMERINTAH KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA 2001 - 2003 .....	150
95.	REALISASI BELANJA PEMELIHARAAN PEMERINTAH KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA 2001 - 2003 .....	151
96.	REALISASI BELANJA PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA 2001 - 2003 .....	152
97.	REALISASI BELANJA LAIN-LAIN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA 2001 - 2003 .....	153
98.	REALISASI BELANJA RUTIN UNTUK ANGSURAN PINJAMAN/ HUTANG & BUNGA PEMERINTAH KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA 2001 - 2003 .....	154
99.	REALISASI BELANJA RUTIN UNTUK GANJARAN/SUBSIDI/SUMBANGAN PEMERINTAH KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA 2001 - 2003 .....	155
100.	REALISASI BELANJA RUTIN YANG TIDAK TERMASUK BAGIAN LAIN PEMERINTAH KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA 2001 - 2003 .....	156
101.	REALISASI BELANJA RUTIN YANG TIDAK TERSANGKA PEMERINTAH KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA 2001 - 2003 .....	157

102.	REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN PEMERINTAH KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT SEKTOR 2001 - 2003 .....	158
103.	REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS MENURUT SEKTOR 2001 – 2003 .....	159
104.	REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL MENURUT SEKTOR 2001 – 2003.....	160
105.	REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN MENURUT SEKTOR 2001 - 2003 .....	161
106.	REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH MENURUT SEKTOR 2001 - 2003.....	162
107.	REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR MENURUT SEKTOR 2001 - 2003 .....	163
108.	REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA MENURUT SEKTOR 2001 - 2003.....	164
109.	REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHAN BATU MENURUT SEKTOR 2001 - 2003 .....	165
110.	REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN MENURUT SEKTOR 2001 – 2003 .....	166
111.	REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN MENURUT SEKTOR 2001 – 2003 .....	167
112.	REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI MENURUT SEKTOR 2001 – 2003 .....	168
113.	REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO MENURUT SEKTOR 2001 – 2003 .....	169
114.	REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG MENURUT SEKTOR 2001 – 2003 .....	170
115.	REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT MENURUT SEKTOR 2001 - 2003 .....	171
116.	REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA MENURUT SEKTOR 2001 - 2003.....	172
117.	REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA TANJUNG BALAI MENURUT SEKTOR 2001 - 2003.....	173
118.	REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR MENURUT SEKTOR 2001 - 2003 .....	174
119.	REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI MENURUT SEKTOR 2001 - 2003 .....	175
120.	REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA MEDAN MENURUT SEKTOR 2001 – 2003 .....	176

121.	REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA BINJAI MENURUT SEKTOR 2001 – 2003 .....	177
122.	REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUAN MENURUT SEKTOR 2001 – 2003 .....	178
123.	REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN PEMERINTAH KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA 2001 – 2003 .....	179
124.	REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN SEKTOR INDUSTRI PEMERINTAH KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA 2001 – 2003 .....	180
125.	REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN PEMERINTAH KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KAB/ KOTA 2001 – 2003 .....	181
126.	REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN SEKTOR SUMBER DAYA AIR & IRIGASI PEMERINTAH KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN / KOTA 2001 – 2003 .....	182
127.	REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN SEKTOR TENAGA KERJA PEMERINTAH KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN / KOTA 2001 – 2003 .....	183
128.	REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA DAERAH, KEUANGAN DAN KOPERASI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN / KOTA 2001 – 2003 .....	184
129.	REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN SEKTOR TRANSPORTASI PEMERINTAH KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN / KOTA 2001 - 2003 .....	185
130.	REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI PEMERINTAH KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KAB/ KOTA 2001 - 2003 .....	186
131.	REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA DAN TELEKOMUNIKASI PEMERINTAH KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KAB/ KOTA 2001 - 2003 .....	187
132.	REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH & PEMUKIMAN PEMERINTAH KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KAB/ KOTA 2001 - 2003 .....	188
133.	REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP & TATA RUANG PEMERINTAH KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KAB/ KOTA 2001 - 2003 .....	189
134.	REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME, PEMUDA & OLAH RAGA PEMERINTAH KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KAB/ KOTA/ ACTUAL SECOND STAGE 2001 - 2003 .....	190

135.	REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA 2001 – 2003 .....	191
136.	REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN SEKTOR KESEHATAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA 2001 – 2003 .....	192
137	REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN PEMERINTAH KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KAB/ KOTA 2001 - 2003 .....	193
138.	REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN SEKTOR AGAMA PEMERINTAH KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA 2001 - 2003.....	194
139.	REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN SEKTOR ILMU PENGETAHUAN & TEKNOLOGI PEMERINTAH KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KAB/ KOTA 2001 - 2003 .....	195
140.	REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN SEKTOR HUKUM PEMERINTAH KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA 2001 - 2003.....	196
141.	REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN SEKTOR APARATUR PEMERINTAH DAN PENGAWASAN PEMERINTAH KAB/KOTA SE SUMATERA UTARA MENURUT KAB/ KOTA 2001 - 2003 .....	197
142.	REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN SEKTOR POLITIK, PENERANGAN, KOMUNIKASI & MEDIA MASSA PEMERINTAH KABUPATEN /KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN / KOTA 2001 - 2003 .....	198
143.	REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN SEKTOR KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM PEMERINTAH KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KAB/ KOTA 2001 - 2003.....	199
144.	REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN SEKTOR SUBSIDI PEMBANGUNAN KEPADA DAERAH BAWAHAN PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/ KOTA 2001 – 2003 .....	200

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### 1.1. Latar Belakang

Manusia adalah kekayaan bangsa dan sekaligus sebagai modal dasar pembangunan. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati hidup sehat, umur panjang, dan menjalankan kehidupan yang produktif.

Untuk mewujudkan tercapainya ketiga unsur tersebut dilakukan upaya konkrit dan berkesinambungan. Misalnya untuk mencapai umur panjang ataupun Angka Harapan Hidup yang tinggi, harus didukung oleh tingkat kesehatan yang baik, status gizi baik dan semua prasarana lingkungan yang baik. Untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan, manusia harus meningkatkan kualitas pendidikannya, pembangunan pendidikan harus diutamakan dimana angka melek huruf ditingkatkan. Untuk itu rata-rata lama bersekolah harus diatas 12 tahun atau setingkat tamat SLTA. Disamping itu penduduk harus mempunyai kesempatan untuk merealisasikan pengetahuan dan keterampilannya dengan tersedianya lapangan pekerjaan, sehingga dapat direfleksikannya dalam kegiatan produktif yang menghasilkan pendapatan bagi manusia. Dengan pendapatan tersebut manusia dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara meningkatkan daya beli. Akhirnya dengan ketiga unsur di atas diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan mencapai standar hidup layak.

Selain itu secara umum pembangunan manusia dalam pengertian luas mengandung konsep teori pembangunan ekonomi yang konvensional termasuk model pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumberdaya manusia (SDM), pendekatan kesejahteraan, dan pendekatan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Model pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan produksi nasional (GNP). Pembangunan SDM menempatkan manusia terutama sebagai input dari proses produksi (sebagai suatu sarana bukan tujuan). Pendekatan kesejahteraan melihat manusia sebagai pemanfaat (**beneficiaries**) bukan sebagai objek perubahan dasar memfokuskan pada penyediaan barang dan jasa kebutuhan hidup.



Manusia sebagai subjek dan objek pembangunan dalam kehidupannya harus mampu meningkatkan kualitas hidupnya sebagai insan pembangunan. Pembangunan sumberdaya manusia secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Konsep pembangunan manusia memenuhi dimensi yang sangat luas dengan banyak pilihan, hanya mungkin tercapai jika penduduk tersebut memiliki peluang angka harapan hidup yang tinggi atau umur panjang dan sehat, memiliki pengetahuan dan ketrampilan atau keahlian serta mempunyai peluang atau kesempatan untuk merealisasikan pengetahuan tersebut dalam kegiatan yang produktif, sehingga penduduk memiliki daya beli. Dengan kata lain manusia itu harus berkualitas, serta berproduktivitas tinggi. Sehingga dapat mewujudkan kehidupannya yang mencapai standar hidup layak.

Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda serta potensi sumber daya alam, manusia dan budaya yang khusus di setiap wilayah. Pembangunan akan lebih berhasil bila pembangunan wilayah dilaksanakan dengan manajemen otonom sebagai sistem dalam proses pembangunan nasional. Otonomi daerah bukanlah tujuan, tetapi merupakan alat (baca: instrument penting) agar pembangunan di daerah dapat dipercepat dengan paradigma pembangunan yang berorientasi pada **pengembangan masyarakat (*community development*)**.

Prinsip otonomi bukanlah sistem tersendiri. Otonomi merupakan subsistem dari sistem pemerintahan nasional, dengan asas desentralisasi dilaksanakan secara bersama dengan dua asas lainnya, yaitu dekonsentrasi dan perbantuan. Kebijakan nasional di seluruh wilayah negara adalah mengikat dan harus dipatuhi oleh daerah-daerah. Ini berarti kebijakan pembangunan nasional dilakukan oleh pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah sebagai penjabaran dari kebijakan nasional.

Sejak Januari 2001 telah diberlakukan Otonomi Daerah, dan sebagai dasar acuannya adalah UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan berlakunya undang-undang tersebut. Di setiap daerah dibentuk organisasi yang merupakan perangkat

pemerintah daerah dan sekaligus juga ada perangkat pemerintah pusat yang bertugas berdasarkan asas dekonsentrasi.

Penerapan otonomi daerah juga dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan terciptanya pusat-pusat kota baru, yang bersifat metropolitan, cosmopolitan, sebagai sentra-sentra perdagangan, bisnis, dan industri. Hal ini sebagai pencerminan bahwa otonomi daerah mampu membuka semangat untuk berkompetisi sekaligus bekerja sama bukan sebaliknya.

Perwujudan otonomi daerah pada Dati II tentunya akan meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Daerah Tingkat II, terutama karena ada kesempatan untuk secara aktif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh kegiatan pembangunan di daerah. Dalam rangka peningkatan pemerataan kegiatan di daerah dan peningkatan kemampuan segenap aparat pemerintahan, diperlukan kesiapan aspek manajemen dari tingkat Pusat sampai Desa atau kelurahan.

Pemerintah Daerah Sumatera Utara selama ini selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Perhatian pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan ini semakin besar lagi setelah krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997.

Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data dan informasi kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Selain itu, diperlukan adanya dana yang mendukung kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah setempat. Ketersediaan data dan informasi kemiskinan yang akurat dan penggunaan dana pembangunan yang tepat sasaran sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan serta pencapaian tujuan /sasaran dari kebijakan tersebut.

Dalam *Human Development Report* pertama tahun 1990, UNDP mengingatkan, tujuan utama pembangunan adalah kesejahteraan manusia (*human welfare*). Indikator kemajuan tidak hanya dengan pendapatan perkapita, tetapi harus mencakup pembangunan manusia. Maka kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil merupakan kegiatan pembangunan yang

ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Berhasilnya pembangunan di suatu daerah maupun suatu negara dapat dilihat di wilayah itu. Oleh sebab itu perlu dibuat suatu ukuran tingkat keberhasilan pembangunan manusia melalui nilai konkrit kenikmatan yang dicapai oleh manusia itu sendiri. Upaya untuk membuat ukuran/tingkat pencapaian pembangunan manusia pada suatu daerah harus mampu memberikan gambaran tentang kesejahteraan penduduk dan sekaligus besaran tingkat capaian terhadap sasaran ideal pada waktu tertentu. **Indeks Pembangunan Manusia/IPM (Human Development Index/HDI)** merupakan indikator komposit tunggal yang meskipun belum mengukur semua dimensi pokok pembangunan manusia, tetapi telah memperhatikan tiga hal yang paling penting yaitu angka harapan hidup waktu lahir, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah sebagai ukuran pencapaian pendidikan serta pengeluaran konsumsi yang mencerminkan kemampuan daya beli.

Dalam Laporan Pembangunan Manusia Indonesia (LPMI) menekankan perlunya Indonesia memberikan prioritas investasi yang lebih tinggi pada upaya pembangunan manusia dan “*bagaimana*” pembiayaannya. Laporan tersebut menegaskan bahwa pembangunan manusia merupakan hak asasi manusia yang sangat penting untuk meletakkan dasar kokoh bagi pertumbuhan ekonomi dan menjamin keberlangsungan demokrasi dalam jangka panjang.

Salah satu data makro ekonomi yang sering digunakan dalam perencanaan dan analisis pembangunan daerah adalah data PDRB. Dalam perencanaan pembangunan daerah, data PDRB menjadi menjadi salah satu input variabel baik untuk melakukan proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, maupun untuk perencanaan program pembangunan. Pembangunan ekonomi atau lebih khususnya pertumbuhan ekonomi maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita mempunyai hubungan yang timbal balik dengan pembangunan manusia.

Adanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi menimbulkan pertanyaan apakah pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, mampu mengangkat harkat kehidupan mereka ke tingkat yang lebih baik, dan mampu memperkecil celah antara kelompok yang penghasilan tinggi dan rendah.

Segala usaha dan kegiatan pembangunan harus dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan hasil-hasil yang dicapai harus dapat dinikmati merata oleh seluruh rakyat. Dalam tujuan pembangunan tersebut telah tersirat bahwa tujuan pembangunan nasional tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun juga telah memberikan penekanan dengan bobot yang sama kepada aspek peningkatan tingkat pendapatan masyarakat dan aspek pemerataan. Peningkatan tingkat pendapatan masyarakat bisa diterjemahkan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan pemerataan berarti pengurangan kesenjangan pendapatan kelompok berpenghasilan rendah dan tinggi.

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah berlangsung sejak Januari 2001 diharapkan akan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Dengan otonomi pada daerah tingkat II, Pemerintah Daerah Tingkat II akan lebih mudah mengenali persoalan di daerahnya dan membuat kebijaksanaan dalam rangka meningkatkan masyarakatnya.

Usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat memang bukan hanya tugas Pemerintah Daerah tetapi juga tugas masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijaksanaan Pemerintah Daerah akan membantu untuk mencapai sasaran pembangunan, dan pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai sumber dana dapat dipergunakan untuk melaksanakan pembangunan daerah. Pemerintah Daerah Tingkat II bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II mempunyai wewenang untuk menentukan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II di daerahnya. Meskipun dana APBD tersebut sangat terbatas, apabila penggunaannya sesuai dengan tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya maka akan tercermin dari berbagai indikator yang dapat menunjukkan hal tersebut.

Penghitungan indeks pembangunan manusia dan faktor penyebab perubahannya serta penduduk miskin Sumatera Utara 2004, dan analisis dampak APBD terhadap IPM ini merupakan kajian awal untuk memberikan gambaran sejauh mana penggunaan APBD Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

## 1.2. Ruang Lingkup dan Metode Analisis

Untuk melakukan kajian ini dipergunakan data dari berbagai sumber, dan sumber yang utama berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Badan Pusat Statistik. Kajian ini dilakukan pada level kabupaten/ kota sesuai dengan ketersediaan data.

Beberapa data yang dipergunakan adalah :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota tahun 2001 – 2003 di Propinsi Sumatera Utara.
2. Jumlah Penduduk Miskin kabupaten/kota tahun 2002 dan 2004 di Propinsi Sumatera Utara.
3. Indek Pembangunan Manusia kabupaten/kota tahun 2002 dan 2004 di Propinsi Sumatera Utara

Data keuangan (APBD) kabupaten/kota diperoleh dari Bagian Keuangan Kantor Bupati/ Walikota yang dikumpulkan dengan menggunakan daftar K-2, dan dilakukan pada 20 (dua puluh) kabupaten/ kota. Sedangkan data yang lain diperoleh dari hasil sensus dan survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan data yang tersedia, dan dilakukan analisis secara deskriptif dan analisis induktif. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang perkembangan dan perbandingan antara satu kabupaten/ kota dengan yang lain dalam Propinsi Sumatera Utara. Selain itu, juga dapat diketahui perkembangan antar waktu di masing-masing kabupaten/kota tentang APBD dan indikator lainnya.

Dari gambaran diatas, dicoba untuk menarik suatu kesimpulan dengan menggunakan alat analisis induktif, yaitu analisis penggunaan dana APBD kabupaten/kota dan dampaknya terhadap pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan.

### **1.3. Konsep dan Definisi**

#### **1.3.1. Penerimaan Daerah**

Penerimaan Daerah terdiri dari :

1. Bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu.
2. Bagian Pendapatan Asli Daerah.
3. Bagian dana perimbangan.
4. Bagian pinjaman pemerintah daerah.

##### **1.3.1.1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu**

Adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, yang digunakan pada APBD tahun berikutnya.

##### **1.3.1.2. Pendapatan Asli Daerah**

Adalah penerimaan yang berasal dari sumber pendapatan daerah yang terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, dan penerimaan PAD lain-lain.

###### **1.3.1.2.1. Pajak Daerah**

Adalah pungutan yang dilakukan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini dikenakan kepada semua objek pajak seperti orang/badan, benda bergerak/tak bergerak.

###### **1.3.1.2.2. Retribusi Daerah**

Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran/pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu.

#### **1.3.1.2.3. Bagian Laba Usaha Daerah**

Adalah penerimaan yang berupa bagian laba bersih dari BUMD yang terdiri dari: bagian laba Bank Pembangunan Daerah, perusahaan daerah air minum, bagian dari laba bersih perusahaan daerah lainnya dan penyertaan modal daerah kepada perusahaan.

#### **1.3.1.2.4. Penerimaan PAD Lain-lain**

Yang termasuk rincian ini antara lain: hasil penjualan barang milik daerah, penjualan barang bekas, cicilan kendaraan bermotor, penerimaan cicilan rumah yang dibangun oleh Pemerintah Daerah, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, sumbangan pihak ketiga, penerimaan jasa giro (kas daerah) dan lain-lain.

#### **1.3.1.3. Bagian Dana Perimbangan**

Adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak / bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).

##### **1.3.1.3.1. Bagi Hasil pajak**

Penerimaan bagi hasil pajak terdiri dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, bagi hasil pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21), pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain - lain.

##### **1.3.1.3.2. Bagi Hasil Bukan Pajak**

Penerimaan bagi hasil bukan pajak terdiri dari iuran hasil hutan (IHH), iuran hasil pengusahaan hutan (IHPH), pemberian hak atas tanah negara, landrent (iuran tetap) pertambangan umum, iuran eksplorasi / eksploitasi / royalty pertambangan umum, pertambangan minyak dan gas bumi, dan lain - lain.

##### **1.3.1.3.3. Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksud untuk menutup kesenjangan fiskal (fiscal gap) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

#### **1.3.1.3.4. Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku yaitu :

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus DAU
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional
- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan - tujuan yang sudah digariskan.

#### **1.3.1.3.5. Penerimaan Lainnya**

Adalah penerimaan lainnya dari pemerintah pusat, dari pemerintah daerah propinsi atau dari instansi yang lebih tinggi. Penerimaan lainnya terdiri dari dana darurat bencana alam, dana bantuan khusus, penerimaan dari daerah lain dalam rangka kerja sama, dan lain - lain.

#### **1.3.1.4. Pinjaman Pemerintah Daerah**

Adalah penerimaan daerah kabupaten/ kota yang berasal dari pinjaman dan digunakan untuk belanja pembangunan, yang sekaligus juga dapat dipakai sebagai penyertaan modal kepada BUMD. Penerimaan tersebut dirinci menurut sumber pinjaman dari pemerintah pusat dan pinjaman dari lembaga keuangan dalam negeri maupun pinjaman dari luar negeri dan lain - lain.

### **1.3.2. Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan**

#### **1.3.2.1. Belanja Rutin**

Dari pos - pos pengeluaran yang ada kemudian dirinci menurut sembilan jenis belanja rutin yaitu :

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang
3. Biaya Pemeliharaan
4. Belanja Perjalanan Dinas
5. Belanja Lain - lain
6. Anggaran Pinjaman/ Hutang dan Bunga



7. Bantuan Keuangan
8. Pengeluaran yang Tidak Termasuk Bagian Lain
9. Pengeluaran Tidak Tersangka

#### **1.3.2.1.1. Belanja Pegawai**

Adalah semua pembayaran berupa uang tunai yang dibayarkan kepada pegawai daerah otonom. Belanja pegawai terdiri dari gaji dan tunjangan lainnya, tunjangan beras, honorarium/ vakasi, uang lembur, upah pegawai harian tetap, biaya perawatan dan pengobatan pegawai, dan belanja pegawai lain - lain.

#### **1.3.2.1.2. Belanja Barang**

Adalah semua pengeluaran yang dilakukan untuk ongkos kantor, pembelian inventaris kantor, biaya pendidikan, biaya perpustakaan, biaya Hansip, biaya pakaian dinas, pembelian peralatan dokter, pembelian alat - alat perlengkapan laboratorium, pembelian inventaris ruangan pasien, pembelian perlengkapan dapur rumah sakit, pembelian obat - obatan, pembelian bahan laboratorium, pembelian bahan percontohan, dan lain - lain.

#### **1.3.2.1.3. Biaya Pemeliharaan**

Adalah semua pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan gedung kantor; pemeliharaan rumah dinas, asrama, mess, dan sebagainya; pemeliharaan kendaraan dinas; pemeliharaan inventaris kantor, diesel, traktor, obat dan alat - alat besar; pemeliharaan peralatan dokter; dan lain - lain.

#### **1.3.2.1.4. Biaya Perjalanan Dinas**

Terdiri dari biaya perjalanan dinas, biaya perjalanan dinas tetap, biaya perjalanan pindah, biaya pemulangan pegawai yang dipensiunkan, biaya perjalanan dinas lainnya.

#### **1.3.2.1.5. Belanja Lain - lain**

Adalah semua pengeluaran yang digunakan sebagai uang perangsang dan insentif; biaya penguburan pasien yang tidak mampu; biaya observasi dan penyuluhan sosial; biaya operasional; biaya propaganda, penerangan dan pameran serta dokumentasi; biaya penyelenggaraan pembibitan; biaya SSB dan komunikasi; ongkos pengangkutan barang; sewa gedung; kesejahteraan pegawai; dan lain sebagainya.

#### **1.3.2.1.6. Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga**

Adalah pembayaran pinjaman dan bunga baik secara cicilan maupun keseluruhan, yang terdiri dari angsuran hutang, bunga hutang, bea/ongkos yang berhubungan dengan pinjaman, dan angsuran pinjaman lainnya.

#### **1.3.2.1.7. Bantuan Keuangan**

Terdiri dari sumbangan kepada desa/kelurahan, penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada desa/kelurahan, penyisihan pajak dan retribusi kepada desa/kelurahan dan lain-lain.

#### **1.3.2.1.8. Pengeluaran yang Tidak Termasuk Bagian Lain**

Meliputi bantuan biaya kepada instansi vertikal Depdagri (pembangunan desa, sospol, agraria, dan lain-lain), bantuan biaya kepada instansi vertikal lainnya (PTN dan pendidikan lainnya, RRI, TVRI, PFN, dll), bantuan untuk Parpol dan Golkar, bantuan biaya kepada organisasi profesi (PWI, KONI, MUI, KNPI, Pramuka, MTQ, Lembaga ibadah, biro konsultasi dan bantuan hukum, PEPABRI, dsb), bantuan untuk Organisasi Sosial (yayasan yatim piatu, yayasan cacat veteran, PMI) dan lain-lain.

#### **1.3.2.1.9. Pengeluaran Tidak Tersangka**

Adalah semua pengeluaran/belanja yang tidak terduga pada tahun anggaran yang diteliti.

#### **1.3.2.2. Belanja Pembangunan**

Belanja pembangunan adalah pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai proses perubahan, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah yang ingin dicapai. Pada umumnya biaya pembangunan tersebut sudah diprogram dalam Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA). Pengeluaran pembangunan semuanya diprogramkan dalam berbagai proyek disetiap sektor/subsektor.

##### **Industri**

Pengeluaran yang ditujukan untuk program bimbingan dan penyuluhan industri serta program pengembangan dan pengawasan industri, masing-masing dengan sejumlah proyek. Misalnya untuk program industri kecil dan menengah, program penataan struktur industri, dan lain-lain.

## **Pertanian dan Kehutanan**

Terdiri dari pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Misalnya program ketahanan pangan pertanian rakyat, program pengembangan usaha perkebunan, program pembinaan dan pembangunan usaha peternakan, program sumber daya, sarana dan prasarana perikanan, program pembangunan kehutanan rakyat terpadu, dan lain-lain.

## **Sumber Daya Air dan Irigasi**

Terdiri dari pengembangan sumber daya air dan irigasi. Misalnya untuk program pengelolaan sungai, danau, dan sumber air lainnya, program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dan lain-lain.

## **Tenaga Kerja**

Misalnya : program perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas, produktivitas, perlindungan tenaga kerja dan lembaga ketenagakerjaan, program pelatihan dan peningkatan keterampilan, dan lain-lain.

## **Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi**

Terdiri dari perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan usaha daerah, keuangan, serta koperasi dan pengusaha kecil. Misalnya program pengembangan perdagangan dan sistem distribusi, program pengembangan usaha dan lembaga perdagangan, program pengembangan dan peningkatan investasi penanaman modal dalam negeri dan modal asing, program pengembangan dan peningkatan keuangan daerah, program pengembangan koperasi dan usaha kecil, dan lain-lain.

## **Transportasi, Meteorologi, dan Geofisika**

Terdiri dari prasarana jalan, transportasi darat, pelayaran rakyat, perhubungan udara dan perintis, serta meteorologi dan geofisika. Misalnya program rehabilitasi/pemeliharaan, peningkatan serta pembangunan jalan dan jembatan, program pengembangan fasilitas lalu lintas jalan, sistem transportasi dan angkutan penyeberangan, program pengembangan fasilitas pelabuhan laut, program pengembangan fasilitas pelabuhan udara dan keselamatan penerbangan, dan lain-lain.

### **Pertambangan dan Energi**

Terdiri dari pertambangan rakyat dan energi/listrik pedesaan. Misalnya program pengelolaan usaha pertambangan rakyat, program pengembangan listrik pedesaan, dan lain-lain.

### **Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah**

Misalnya program pengembangan kepariwisataan/pemasaran pariwisata, program pengembangan dan pengelolaan obyek wisata, program pengembangan telekomunikasi daerah, dan lain-lain.

### **Pembangunan Daerah dan Transmigrasi**

Terdiri dari pembangunan daerah bawahan, pembangunan kota, pembangunan desa, pembangunan transmigrasi dan pemukiman serta pembangunan perambah hutan. Misalnya program pemantapan pengembangan otonomi daerah, program tata kota dan daerah, program pembangunan daerah kecamatan, program pembangunan desa, program perbaikan prasarana perkotaan/pedesaan, dan lain-lain.

### **Lingkungan Hidup dan Tata Ruang**

Misalnya program pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup, program penyelamatan hutan, tanah dan air, program pengendalian pencemaran lingkungan hidup, program penataan ruang dan bangunan, program pembangunan prasarana kota, program penataan pertanahan, dan lain-lain.

### **Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga**

Terdiri dari : pendidikan, pendidikan luar sekolah dan kedinasan, kebudayaan daerah dan kepercayaan terhadap Tuhan Y.M.E., serta pemuda dan olah raga. Misalnya : Program pendidikan dasar, program pembinaan pendidikan dasar, program pembinaan pendidikan lanjutan, program pembinaan pendidikan tinggi, program pendidikan luar sekolah, program pembinaan generasi muda, program pengembangan seni dan budaya, program pembinaan olahraga, dan lain-lain.

### **Kependudukan dan Keluarga Sejahtera**

Misalnya program pembangunan keluarga berencana, program pengembangan dan keserasian kebijakan kependudukan dan keluarga berencana, dan lain-lain.

### **Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja**

Terdiri dari kesehatan, kesejahteraan sosial, dan peranan wanita, anak dan remaja. Misalnya: program penyuluhan kesehatan, program pemberantasan penyakit menular, program pengawasan obat dan makanan. pembinaan kesejahteraan sosial, program bantuan penyantunan sosial dan penanggulangan bencana alam, pelatihan ketrampilan wanita, bimbingan dan bantuan usaha, pembinaan organisasi remaja melalui kegiatan pelatihan ketrampilan, dan lain-lain.

### **Perumahan dan Pemukiman**

Terdiri dari perumahan dan pemukiman, serta penataan bangunan. Misalnya program penyediaan perumahan rakyat dan penyehatan lingkungan pemukiman, program penyediaan akses jalan lokal, drainase, dan air bersih, serta program untuk mendukung, mendorong perkotaan terpadu, dan lain-lain.

### **Agama**

Terdiri dari pelayanan kehidupan beragama dan pembinaan pendidikan agama. Misalnya program peningkatan kehidupan beragama, program penerangan, bimbingan dan kerukunan hidup beragama, pembinaan pendidikan agama tingkat dasar, dan lain-lain.

### **Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

Terdiri dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penerapan teknik produksi dan teknologi, penelitian, kelautan, dan sistem informasi statistik. Misalnya program pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, program penguasaan teknologi, program penelitian bidang ekonomi, program pengembangan sistem informasi, program penyempurnaan dan pengembangan statistik, dan lain-lain.

## **Hukum**

Terdiri dari program pembinaan hukum dan pembinaan aparaturnya. Misalnya program perencanaan dan pembentukan hukum, program penyuluhan hukum, dan lain-lain.

## **Aparatur Pemerintah dan Pengawasan**

Terdiri dari aparaturnya serta pendayagunaan sistem dan pelaksanaan pengawasannya. Misalnya program kapasitas aparaturnya, program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya, program pendidikan dan pelatihan penjenjangan kedinasannya, program pendayagunaan sistem dan pelaksanaan pengawasannya, dan lain-lain.

## **Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media massa**

Misalnya Program pembinaan kualitas proses politik, program pembinaan politik, program perluasan informasi dan komunikasi, program peningkatan prasarana dan sarana penyiapan informatika dan media, program pengembangan pembinaan pers, dan lain-lain.

## **Keamanan dan Ketertiban Umum**

Misalnya program pembinaan kekuatan rakyat dan bela negara, program pembinaan masyarakat dan kekuatan sosial politik, program peningkatan keamanan dan ketertiban, dan lain-lain.

## **Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawahan**

Misalnya subsidi pemerintah daerah kabupaten/kota kepada daerah bawahan untuk menyelenggarakan pemerintah di daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.

### **1.3.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau ***Human Development Index (HDI)*** merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu usia hidup (***longevity***), pengetahuan (***knowledge***), dan standar hidup layak (***decent living***). Secara umum metode penghitungan IPM yang disajikan dalam publikasi ini sesuai dengan metode yang digunakan ***The United Nations Development Programme (UNDP)*** dalam menghitung HDI. Selain itu, dalam proses

penghitungan IPM ini BPS memperoleh bantuan konsultasi teknis secara langsung kantor pusat dari Metode yang sama digunakan BPS untuk menghitung IPM antar Propinsi.

### 1.3.3.1. Komponen Komponen IPM

#### Usia Hidup

Usia hidup diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir (*life expectancy at birth*) yang biasa dinotasikan dengan  $e^0$ . Karena Indonesia tidak memiliki sistem vital registrasi yang baik maka  $e^0$  dihitung dengan metode tidak langsung. Metode ini menggunakan dua macam data dasar yaitu rata-rata anak yang dilahirkan hidup (*live-births*) dan rata-rata anak yang masih hidup (*still living*) per wanita usia 15-49 tahun menurut kelompok umur lima tahunan. Penghitungan  $e^0$  dilakukan dengan menggunakan software *Mortpak Lite*. Angka  $e^0$  yang diperoleh dengan metode tidak langsung ini merujuk pada keadaan 3-4 tahun dari tahun survei .

#### Pengetahuan

Seperti halnya UNDP komponen IPM pengetahuan diukur dengan dua indikator yaitu angka melek huruf (*literacy rate*) penduduk 10 tahun keatas dan rata-rata lama sekolah (*mean-years of schooling*). Sebagai catatan, UNDP dalam publikasi tahunan HDR sejak 1995 mengganti rata-rata lama sekolah dengan partisipasi sekolah dasar, menengah, dan tinggi karena alasan kesulitan memperoleh datanya sekalipun diakui bahwa indikator yang kedua kurang sesuai sebagai indikator dampak.

Angka melek huruf diolah dari variabel kemampuan membaca dan menulis, sedangkan rata-rata lama sekolah dihitung menggunakan tiga variabel secara simultan yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani, dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

#### Standar Hidup Layak

Berbeda dengan UNDP yang menggunakan indikator GDP per kapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*) sebagai indikator standar hidup layak. Penulisan ini menggunakan indikator "rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan" (*adjusted real per capita expenditure*). Sumber data yang digunakan adalah Susenas dan survei lain yang mendukung.

### 1.3.3.2 Tahapan Penghitungan IPM

1. Tahapan pertama penghitungan IPM adalah menghitung indeks masing-masing komponen IPM ( $e^0$ , Pengetahuan, dan Standard Hidup Layak) dengan hubungan matematis sebagai berikut:

$$\text{Indek } (X_i) = (X_i - X_{\min}) / (X_{\max} - X_{\min})$$

$X_i$  = Indikator komponen Indeks Pembangunan Manusia ke-I ( $i=1,2,3$ )

$X_{\min}$  = Nilai minimum  $X_i$

$X_{\max}$  = Nilai maksimum  $X_i$

Persamaan di atas akan menghasilkan nilai  $0 \leq X_i \leq 1$ , untuk mempermudah cara membaca skala dinyatakan dalam 100 persen sehingga interval nilai menjadi  $0 \leq X_i \leq 100$

2. Tahapan kedua penghitungan IPM adalah menghitung rata-rata sederhana dari masing-masing indeks  $X_i$  dengan hubungan matematis;

$$\text{Indeks Pembangunan Manusia - IPM} = 1/3 X_i$$

$$= 1/3 ( X(1) + X(2) + X(3) )$$

dimana :

$X(1)$  = Indeks Angka Harapan Hidup

$X(2)$  =  $2/3$  (Indeks Melek Huruf) +  $1/3$  (Indeks Rata-rata Lama Sekolah)

$X(3)$  = *Indeks Konsumen Per Kapita yang disesuaikan*



Tabel 1.

**Nilai Maksimum dan Minimum Indikator Komponen IPM**

<b>Indikator</b>	<b>Nilai Maksimum</b>	<b>Nilai Minimum</b>	<b>Catatan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai standar global (UNDP)
Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai standar global (UNDP)
Rata-rata Lama Sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)
Konsumsi per kapita yang disesuaikan (000)	859,3	421,6	UNDP menggunakan GDP per kapita riil yang disesuaikan

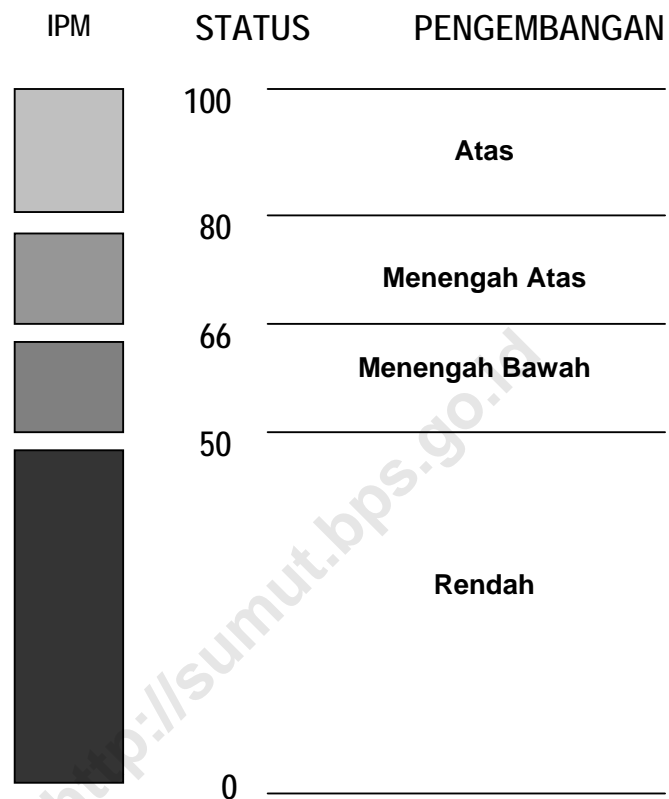
**1.3.3.3 Penentuan Status IPM**

Untuk melihat perkembangan tingkatan status IPM di kabupaten/kota, dibedakan 4 kriteria dimana status menengah dipecah menjadi dua seperti dibawah ini :

1. **Rendah** dengan nilai IPM kurang dari 50
2. **Menengah Bawah** dengan nilai IPM berada diantara 50 sampai kurang dari 66
3. **Menengah Atas** dengan nilai IPM berada antara 66 sampai kurang dari 80
4. **Tinggi** dengan nilai IPM lebih atau sama dengan 80

Sedangkan lebih terurai dijelaskan tentang pembagian status indeks pembangunan manusia seperti tergambar dalam gambar di bawah ini :

Gambar B.  
STATUS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA



Jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria rendah hal ini berarti kinerja pembangunan manusia daerah tersebut masih memerlukan perhatian khusus untuk mengejar ketinggalannya. Begitu juga jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria menengah hal ini berarti pembangunan manusia masih perlu ditingkatkan.

Jika daerah tersebut mempunyai status pembangunan manusia tinggi hal ini berarti kinerja pembangunan manusia daerah tersebut sudah baik/optimal maka perlu dipertahankan supaya kualitas sumber daya manusia tersebut lebih produktif sehingga memiliki produktivitas yang tinggi.

#### 1.3.4. Kemiskinan

Konsep kemiskinan yang digunakan BPS adalah konsep ekonomi, dimana kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *basic needs* yang merupakan pendekatan yang banyak digunakan. Berdasarkan definisi ini selanjutnya dihitung “garis kemiskinan” dari data konsumsi/pengeluaran penduduk sebagai batas ukuran kemiskinan. Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ini selanjutnya dikategorikan miskin. Persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan tersebut disebut *Head Count Index*. Dengan demikian sebelum menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin, maka terlebih dahulu dihitung garis kemiskinan.

Garis kemiskinan adalah nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, baik itu kebutuhan hidup minimum makanan (beras, umbi-umbian, ikan, dan sebagainya) maupun kebutuhan hidup minimum bukan makanan (perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sebagainya). Berdasarkan hasil widyakarya Pangan dan gizi tahun 1978, seseorang dapat dikatakan hidup sehat apabila telah dapat memenuhi energinya minimal 2100 kkal per hari. Mengacu kepada ukuran tersebut, maka batas miskin untuk makanan adalah nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan minimum energinya sebesar 2100 kkal perhari.

Seseorang dapat dikatakan hidup layak apabila dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar meliputi kebutuhan dasar makanan dan non makanan. Yang ditetapkan sebagai standar kebutuhan dasar makanan adalah nilai konsumsi kebutuhan dasar makanan yang menghasilkan energi 2.100 kalori perkapita per hari. Yang dimaksud dengan kebutuhan dasar makanan adalah sekelompok (52) komoditi yang dikonsumsi oleh mayoritas penduduk marginal, yaitu yang hidup sedikit di atas ambang kemiskinan. Kelompok ini dinamakan penduduk referensi (*reference population*). Sedangkan standar kebutuhan dasar non makanan

adalah nilai konsumsi kebutuhan dasar non makanan seperti dijumpai pada *reference population* tersebut. Yang dimaksud kebutuhan dasar non makanan adalah sekelompok (25-27) komoditi non makanan yang dikonsumsi oleh mayoritas *reference population* tersebut.

Dengan perkataan lain, standar tersebut mengacu pada *reference population*. Dasar pemikirannya adalah jika suatu komoditi makanan/non makanan memang dikonsumsi oleh banyak rumah tangga kelas marjinal, berarti komoditi tersebut merupakan kebutuhan dasar/essensial.

Batas kebutuhan minimum untuk makanan ditambah kebutuhan minimum untuk bukan makanan itulah yang disebut Garis Kemiskinan. Ringkasnya, garis kemiskinan terdiri dari dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan.

Sejak Desember 1998 telah terjadi perubahan standar yang sangat signifikan, sehingga perbandingan dengan data 1996 perlu diinterpretasikan dengan hati-hati. Standar kebutuhan dasar mengalami perubahan. Perubahan dasar makanan hanya melibatkan 3 komoditi sayuran dan buah-buahan. Untuk standar non makanan perubahannya sangat signifikan, misalnya standar minimum untuk biaya sekolah yang semula hanya meliputi pengeluaran sekolah sampai SD, menjadi pengeluaran sampai SLTP, sejalan dengan wajib belajar 9 tahun. Cakupan juga diperluas untuk perumahan, transportasi, kesehatan, dan kebutuhan non makanan lainnya.

Perubahan standar tersebut jelas menimbulkan masalah keterbandingan data. Namun demikian hal tersebut sangat diperlukan agar indikator yang digunakan dapat secara lebih realistis mengukur tingkat kemiskinan sesuai kebutuhan hidup yang telah meningkat. Data kemiskinan tahun 2001-2003 merupakan angka menggunakan metode penghitungan standar yang baru.

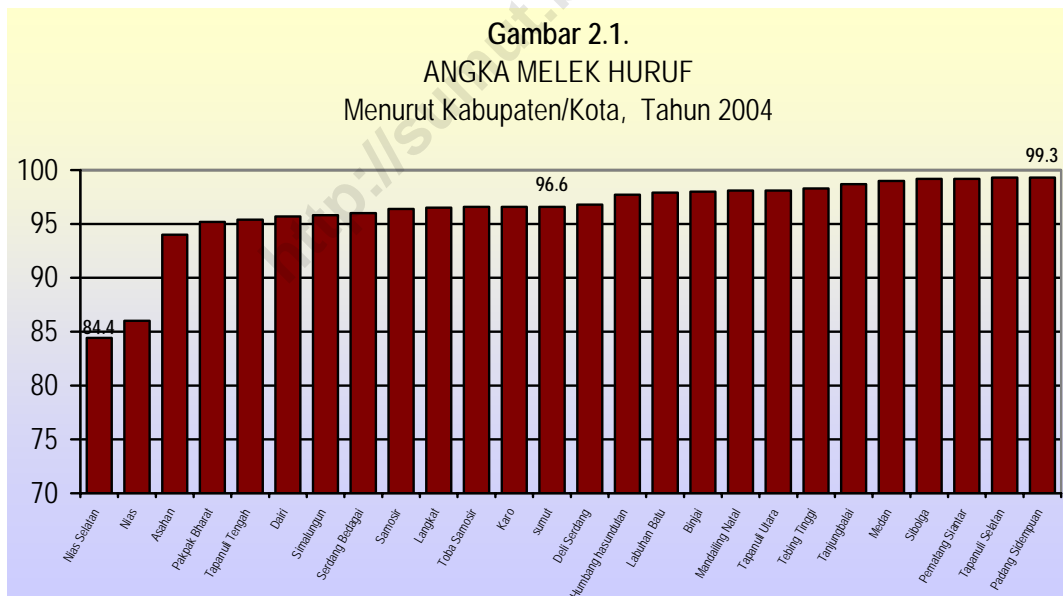
## BAB II

### INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

#### 2.1. KOMPONEN-KOMPONEN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

##### 2.1.1. Indeks Pengetahuan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia diarahkan pada upaya pembangunan di bidang pendidikan. Semenjak awal tahun 90-an pemerintah telah mencanangkan Program Wajib Belajar 6 Tahun yang diharapkan meningkatkan partisipasi anak, khususnya anak usia sekolah, dalam pendidikan dasar dan mulai tahun 1994 meningkat menjadi wajib belajar 9 tahun. Hal ini sesuai dengan salah satu amanat yang diemban pemerintah sesuai dengan UUD 1945 adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga telah banyak upaya pemerintah dalam upaya melaksanakan amanat ini, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah .



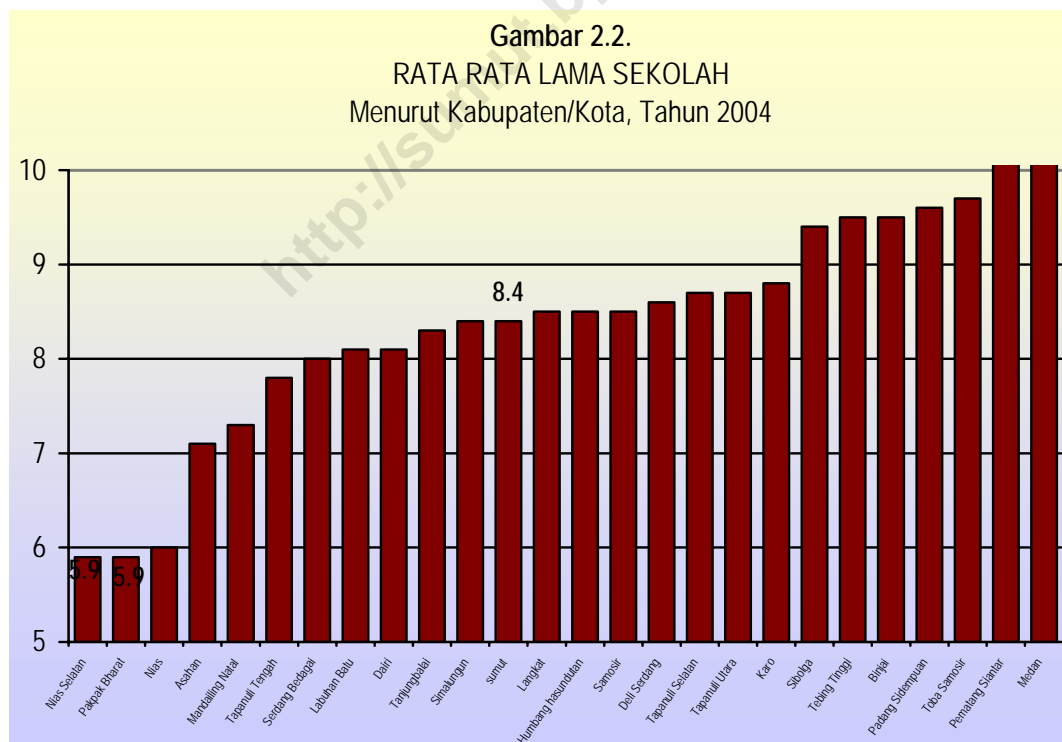
Salah satu indikator pendidikan yang digunakan untuk menghitung IPM adalah angka melek huruf yang menunjukkan persentase penduduk 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis baik huruf latin maupun huruf lainnya.

Dari Gambar 2.1 memperlihatkan bahwa angka melek huruf Sumatera Utara pada tahun 2004 sebesar 96,6 persen. Persentase melek huruf terendah berada di Kabupaten Nias Selatan dan Nias masing-masing sebesar 84,4 dan 86

persen. Sedangkan persentase melek huruf tetinggi berada di Kota Padang Sidempuan (99,3 %). Dari gambar juga dapat dilihat bahwa angka pesentase melek huruf penduduk di seluruh kota lebih tinggi dari pada angka melek huruf propinsi.

Indikator pendidikan selain melek huruf yang digunakan untuk menghitung indeks pembangunan manusia adalah rata-rata lama sekolah. Secara umum indikator ini menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk dewasa.

Pada tahun 2004, rata-rata lama sekolah penduduk dewasa (10 tahun ke atas) di Provinsi Sumatera Utara sebesar 8,4 tahun, yang berarti secara umum penduduk di Kota Pematang Siantar sudah duduk di kelas tiga SLTP, kondisi tidak berubah dibandingkan dengan kondisi tahun 2002. Sebagaimana halnya dengan angka melek huruf, rata-rata lama sekolah Kota umumnya di atas angka provinsi kecuali Kota Tanjung Balai. Rata-rata lama sekolah terendah berada di Kabupaten Nias dan Nias Selatan sedangkan yang tertinggi berada di Kota Medan.

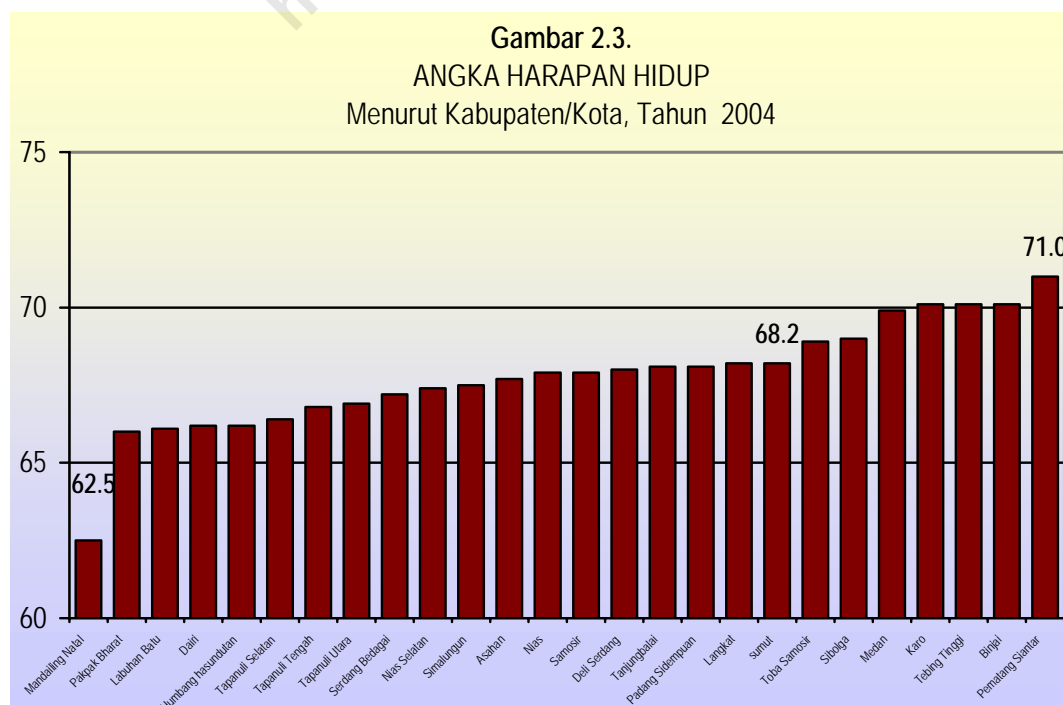


### 2.1.2. Indeks Kelangsungan Hidup

Kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan dapat dipandang dari aspek fisik dan non fisik yang tentunya keduanya saling berkaitan. Kualitas fisik penduduk dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Salah satu indikator

utama dalam mengukur derajat kesehatan penduduk secara makro adalah angka harapan hidup waktu lahir. Angka harapan hidup ini memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara makro. Kebijakan peningkatan kesehatan sejak Pelita I antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, diharapkan dapat meningkatkan angka harapan penduduk. Semakin tinggi angka harapan hidup menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat secara makro semakin tinggi.

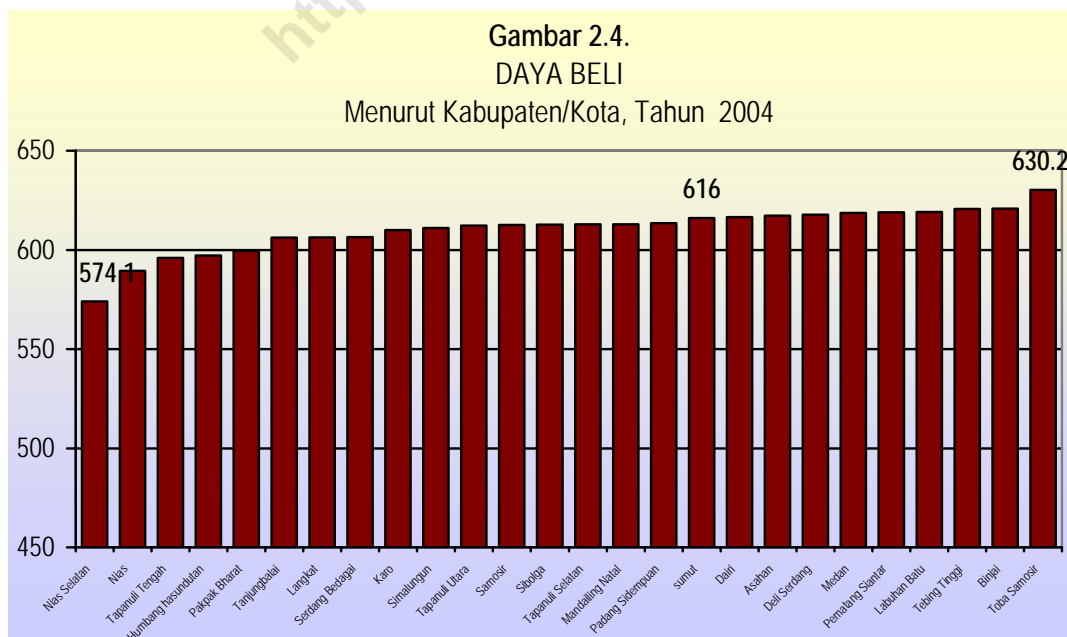
Angka harapan hidup penduduk di Provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun diharapkan semakin meningkat. Berdasarkan pengamatan pada tahun 2004 angka harapan hidup penduduk Provinsi Sumatera Utara tercatat 68,2 tahun yang berarti penduduk Sumatera Utara yang baru lahir pada tahun 2004 mempunyai harapan yang besar untuk mencapai umur 68 tahun. Angka harapan hidup tersebut meningkat dari 67,1 tahun pada tahun 2002. Bila dibandingkan dengan kondisi Propinsi Sumatera Utara secara umum penduduk Kota Pematang Siantar mempunyai peluang untuk hidup 3 tahun lebih lama dari penduduk Sumatera Utara secara umum. Secara keseluruhan Angka harapan hidup Kota Pematang Siantar menempati peringkat pertama sedangkan terendah berada di Kabupaten Mandailing Natal.



### 2.1.3. Indeks Daya Beli

Indeks daya beli digunakan untuk mengukur standar hidup layak. Indikator ini dipengaruhi pengetahuan yang dimiliki serta peluang yang ada untuk merealisasikan pengetahuan dalam berbagai barang/jasa sebagai pendapatan. Sehingga dengan pendapatan yang ada manusia dapat menciptakan daya beli untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Dalam penghitungan indeks daya beli digunakan pendekatan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan dengan tingkat inflasi di daerah masing-masing. Penyesuaian ini diperlukan untuk menstandarkan tingkat harga di masing-masing daerah. Tingkat pengeluaran per kapita yang sama di suatu daerah belum tentu menunjukkan daya beli terhadap barang dan jasa yang sama karena tingkat harga di setiap daerah itu berbeda, oleh sebab itulah pengeluaran per kapita ini terlebih dahulu disesuaikan untuk dapat mengukur tingkat daya beli yang nyata.

Akibat krisis ekonomi yang terjadi pada tahun pertengahan 1997 diyakini meningkatkan penduduk miskin dan tentunya menurunkan daya beli penduduk. Namun seiring dengan kondisi ekonomi yang mulai membaik yang ditandai dengan kembalinya pertumbuhan ekonomi ke arah positif, berdampak kepada meningkatnya daya beli penduduk Kota Pematang Siantar.



Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan atau daya beli penduduk Sumatera Utara meningkat dari 589,6 ribu rupiah pada tahun 2002 menjadi 616,0



ribu rupiah pada tahun 2004. Indikator daya beli penduduk Kabupaten Nias terdah dibandingkan dengan kabupten/ kota lainnya di Provinsi Sumatera Utara.

## **2.2. STATUS PEMBANGUNAN MANUSIA**

Dari Tabel 2 dan Tabel 3 terlihat IPM Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan dari 68,8 pada tahun 2002 menjadi 71,4 pada tahun 2004. Secara nasional peringkat IPM provinsi Sumatera Utara berada pada posisi 7, tidak berubah dibandingkan dengan peringkat pada tahun 2002.

Dilihat per Daerah Tingkat II, nilai IPM Kabupaten/ Kota pada tahun 2004 lebih baik dari pada tahun 2002. Seluruh Kabupaten/ Kota mengalami peningkatan nilai IPM dari 1,2 di Kota Medan hingga 4,3 di Kabupaten Toba Samosir. Sekalipun terjadi peningkatan nilai IPM dari tahun 2002, bila dibandingkan dengan kemajuan yang dicapai oleh Kabupten/.kota lain di Indonesia terlihat bahwa kemajuan yang dicapai oleh Kabupten/ kota di Provinsi Sumatera Utara lebih lambat. Ini dapat dilihat dari 19 Kabupaten/ Kota hanya 8 Daerah tingkat II yang mengalami peningkatan peringkat IPM secara nasional.

<http://sumutbpsu.ac.id>

## BAB III

### PENDUDUK MISKIN

---

Dalam konteks strategi penanggulangan kemiskinan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Dengan diakuinya konsep kemiskinan berbasis hak, maka kemiskinan dipandang sebagai suatu peristiwa penolakan dan tidak terpenuhinya hak. Konsep ini memberikan pengakuan bahwa orang miskin terpaksa menjalani kemiskinan dan seringkali mengalami pelanggaran hak yang dapat merendahkan martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu, konsep ini memberikan penegasan terhadap kewajiban negara untuk menghargai, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin tersebut.

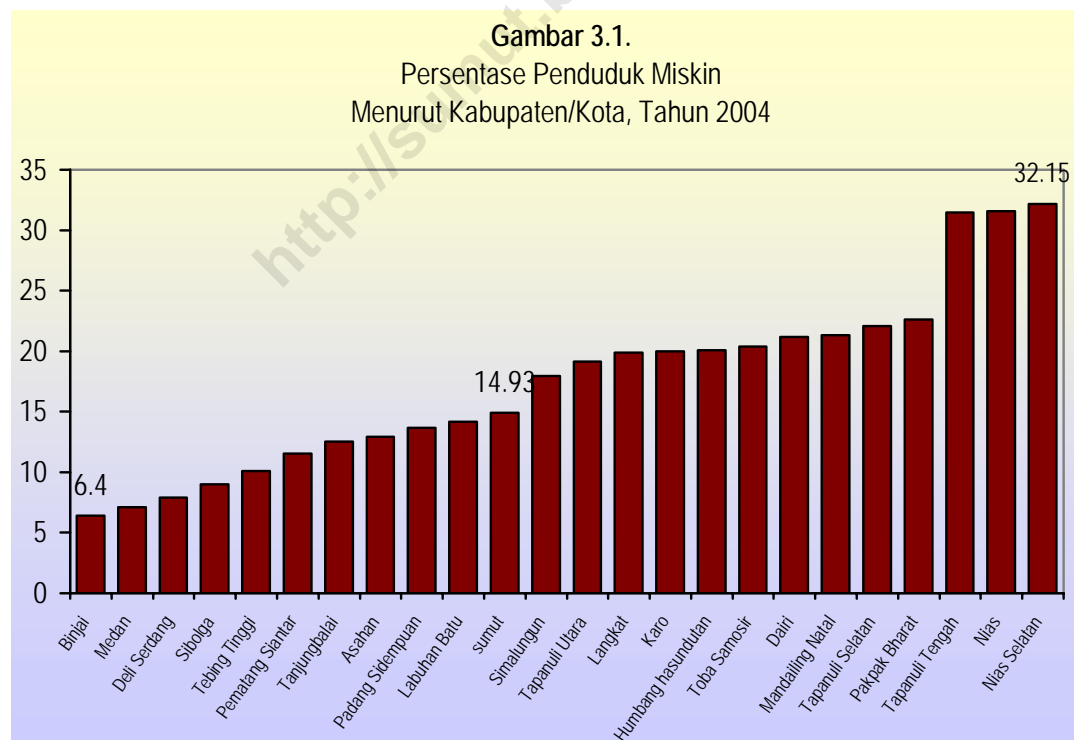
Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multidimensi dan tidak dapat secara mudah dilihat dari suatu angka absolut. Luasnya wilayah dan sangat beragamnya budaya masyarakat menyebabkan kondisi dan permasalahan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara menjadi sangat beragam dengan sifat-sifat lokal yang kuat dan pengalaman kemiskinan yang berbeda antara penduduk miskin

#### **3.1. Jumlah Penduduk Miskin**

Sumatera Utara masih menghadapi masalah kemiskinan yang antara lain ditandai oleh jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan yang rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2004, BPS memperkirakan sekitar 1,8 juta jiwa atau 14,93 persen dari jumlah penduduk Sumatera Utara hidup dengan pengeluaran sebulan lebih rendah dari garis kemiskinan, yaitu jumlah rupiah yang diperlukan untuk membayar harga makanan

setara 2100 kkal sehari dan pengeluaran minimal untuk perumahan, pendidikan, pemeliharaan kesehatan, dan transportasi. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan dengan penduduk miskin di tahun 2002 sebesar 1,88 juta penduduk atau 15,84 persen.

Secara persentase penduduk miskin Kabupaten/ kota di Sumatera Utara dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah Kabupaten/ kota dengan persentase penduduk miskin di bawah 10 persen, kelompok kedua antara 10 hingga 30 persen dan kelompok ke tiga lebih dari 30 persen. Di tahun 2004 mayoritas Kabupaten/ kota di Sumatera Utara berada pada kelompok kedua. Sedangkan dikelompok pertama hanya terdiri dari 4 daerah tingkat dua yaitu: Kota Binjai (6,4 persen), Kota Medan (7,13 persen), Kabupaten Deli Serdang (7,91 persen) dan Kota Sibolga (9,01 persen). Sementara yang berada pada kelompok ketiga terdiri dari tiga daerah tingkat dua yaitu: Kabupaten Tapanuli Tengah (31,47 persen), Kabupaten Nias (31,58 persen) dan Kabupaten Nias Selatan (32,15 persen).



Masyarakat miskin di kawasan pesisir dan kawasan tertinggal menghadapi permasalahan yang sangat khusus. Penduduk di kawasan pesisir umumnya menggantungkan hidupan dari pemanfaatan sumberdaya laut dan pantai yang membutuhkan investasi besar, sangat bergantung musim, dan rentan terhadap

polusi dan perusakan lingkungan laut. Mereka hanya mampu bekerja sebagai nelayan kecil, buruh nelayan, pengolah ikan skala kecil dan pedagang kecil karena memiliki kemampuan investasi yang sangat kecil. Nelayan kecil hanya mampu memanfaatkan sumberdaya di daerah pesisir dengan hasil tangkapan yang cenderung terus menurun akibat persaingan dengan kapal besar dan penurunan mutu sumberdaya pantai. Hasil tangkapan juga mudah rusak sehingga melemahkan posisi tawar mereka dalam transaksi penjualan. Di samping itu, usaha nelayan bersifat musiman dan tidak menentu menyebabkan masyarakat miskin di kawasan pesisir cenderung sulit untuk keluar dari jerat kemiskinan dan belitan utang pedagang atau pemilik kapal. Di samping itu, tekanan ekonomi seringkali mendorong eksploitasi pekerja anak seperti anak yang dipekerjakan di jermal.

Di sisi lain, masalah kemiskinan di daerah perkotaan juga perlu mendapat perhatian. Krisis ekonomi tahun 1997 memperlihatkan masyarakat kota masih rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin di kota besar, seperti Medan, juga cenderung untuk terus meningkat. Pada umumnya masyarakat miskin perkotaan menjalani pengalaman kemiskinan yang berbeda dengan penduduk miskin perdesaan. Mereka lebih banyak mengalami keterisolasian dan perbedaan perlakuan dalam upaya memperoleh dan memanfaatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan, dan ketidakamanan seperti penggusuran.

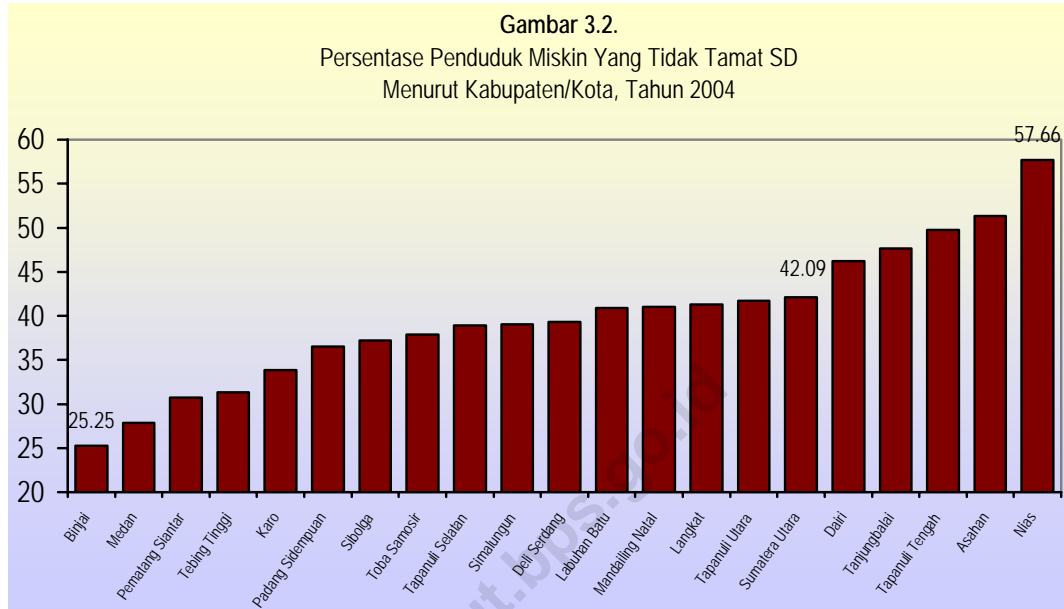
### **3.2. Pendidikan Penduduk Miskin**

Masyarakat miskin menaruh harapan bahwa pendidikan akan membawa perbaikan taraf hidup yang lebih baik. Masalah yang mereka hadapi adalah terbatasnya akses layanan pendidikan dan rendahnya mutu layanan pendidikan.

Keterbatasan masyarakat miskin untuk mengakses layanan pendidikan dasar terutama disebabkan terbatasnya jangkauan fasilitas pendidikan, tingginya beban biaya pendidikan, terbatasnya prasarana dan sarana pendidikan, terbatasnya jumlah sekolah yang layak untuk proses belajar-mengajar, dan terbatasnya jumlah SLTP di daerah perdesaan, daerah terpencil dan kantong-kantong kemiskinan.

Berdasarkan data Susenas, biaya pendidikan merupakan salah satu bagian yang cukup besar dari pengeluaran rumahtangga berpendapatan rendah. Bagi

rumhatangga yang termasuk 20% dengan pengeluaran terendah, persentase biaya pendidikan per anak terhadap total pengeluaran adalah 10% untuk SD, 18,5% untuk SLTP dan 28,4% untuk SLTA. Dari biaya pendidikan tersebut, 20% untuk transportasi, 10% untuk membeli seragam dan biaya pendaftaran, dan



pengeluaran lain-lain 11%.

Ditinjau dari pendidikan yang ditamatkan mayoritas penduduk miskin hanya menamatkan tingkat pendidikan SD/ SLTP sebesar 46,40 persen. Persentase ini hampir tidak jauh berbeda dengan persentase penduduk miskin yang tidak tamat SD yaitu sebesar 42,09 persen. Sementara yang berpendidikan SLTA ke atas hanya 11,51 persen.

Dilihat perkabupaten/ kota tingkat pendidikan penduduk miskin yang paling parah terdapat di Kabupaten Nias dan Asahan. Di kedua kabupaten tersebut mayoritas penduduk miskin tidak menamatkan pendidikan sekolah dasar. Adapun kabupaten/ Kota yang mayoritas penduduk miskin tamat SD/ SLTP adalah Kabupaten Simalungun (50,22 persen), Kota Medan (52,11 persen), Kabupaten Tapanuli Selatan (53,37 persen) Kabupaten Mandailing Natal (55,36 persen) dan Kota Binjai (56,51 persen)

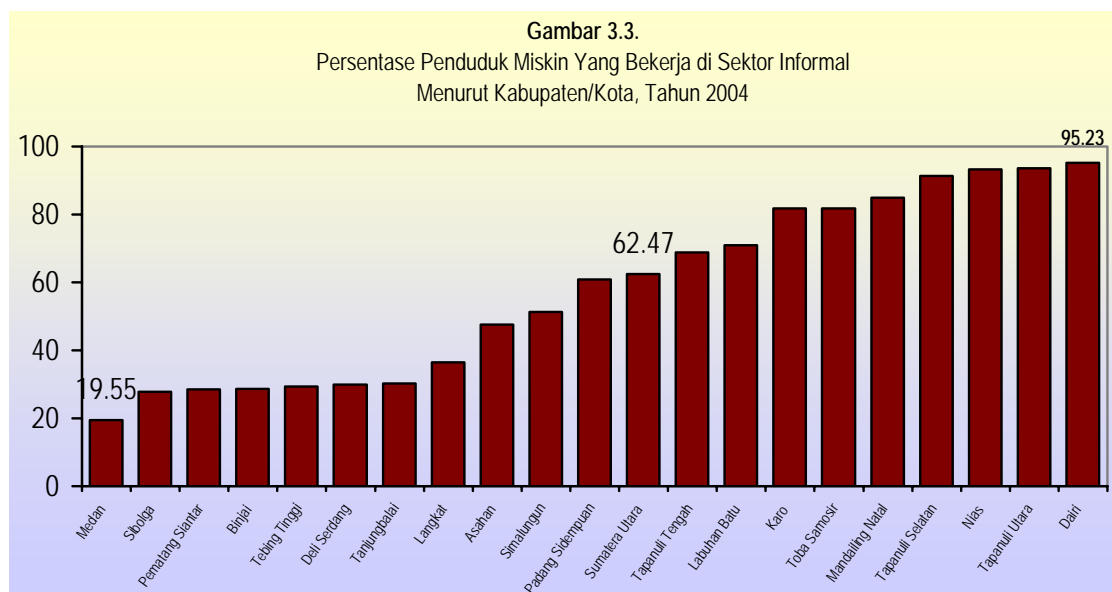
### 3.3. Status Pekerja

Masyarakat miskin hanya memiliki sedikit pilihan atas pekerjaan yang layak dan peluang yang terbatas untuk mengembangkan usaha mereka. Terbatasnya

lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini seringkali menyebabkan mereka terpaksa melakukan pekerjaan yang beresiko tinggi dengan imbalan yang kurang seimbang dan kurang kepastian akan keberlanjutannya. Usaha yang dilakukan masyarakat miskin juga sulit berkembang karena menghadapi persaingan yang tidak seimbang, keterbatasan modal, serta kurangnya ketrampilan dan pendidikan.

Bagi perempuan permasalahannya menjadi lebih kompleks karena negara melegitimasi diskriminasi upah bagi perempuan melalui UU Perkawinan Tahun 1974 pasal I yang mengatakan laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumahtangga. UU ini yang dijadikan rujukan bagi pembuatan peraturan pengupahan. Oleh karena itu, masalah utama yang dihadapi masyarakat miskin adalah terbatasnya kesempatan kerja, terbatasnya peluang pengembangan usaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumahtangga.

Keterpaksaan untuk mendapatkan pekerjaan apa saja yang tersedia menyebabkan lemahnya daya tawar masyarakat miskin dan tingginya kerentanan terhadap perlakuan yang merugikan. Masyarakat miskin juga harus mau menerima pekerjaan dengan imbalan yang terlalu rendah dengan sistem kontrak yang sangat rentan terhadap pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh pemberi kerja.



Pada tahun 2004, 16,3 persen dari penduduk miskin usia 15 tahun ke atas tidak bekerja atau pengangguran, 62,47 persen bekerja di sektor informal dan 21,4 persen bekerja di sektor formal. Tingginya angka yang bekerja di sektor informal berarti mayoritas penduduk miskin berstatus berusaha sendiri, atau pekerja bebas di pertanian/ non pertanian atau pekerja tidak dibayar.

<http://sumut.bps.go.id>

## BAB IV

### DESKRIPSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

---

#### 4.1 Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2001-2003

APBD disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu anggaran yang disusun harus dilaksanakan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penerimaan/pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme penerimaan pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah daerah berkewajiban mengalokasikan penggunaan secara adil dan merata agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat tanpa ada diskriminasi dalam pemberian pelayanan. Dalam publikasi ini akan membandingkan total penerimaan tahun 2001-2003.

Pada Tabel 4.1 terlihat bahwa realisasi penerimaan seluruh Kabupaten/Kota se Propinsi Sumatera Utara tahun 2001-2003 mengalami peningkatan. Persentase penerimaan yang mengalami peningkatan tertinggi tahun 2002 adalah Kota Sibolga yaitu naik 105,88 persen, dari 53,413 milyar pada tahun 2001 naik menjadi 109,967 milyar tahun 2002, dan tahun 2003 dibandingkan tahun 2002 mengalami kenaikan lagi sebesar 27,12 persen.

Untuk penerimaan daerah kabupaten se Sumatera Utara pada tahun 2002, Kabupaten Karo mengalami persentase peningkatan terbesar dari seluruh kabupaten di Propinsi Sumatera Utara. Total penerimaan Karo tahun 2001 sebesar 145,557 milyar, naik menjadi 189,058 milyar atau naik 29,89 persen. Pada tahun 2003 Kabupaten Labuhan Batu penerimaannya meningkat cukup tinggi dari 302,755 milyar pada tahun 2002 menjadi 412,440 milyar pada tahun 2003 atau naik sebesar 36,23 persen.



**Tabel 4.1. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota se Propinsi Sumatera Utara dan Perubahannya Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2001 – 2003.**

Kabupaten/Kota	Penerimaan ( 000 Rp )			Perubahan ( % )	
	2001	2002	2003		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Nias	229.126.819	250.410.702	286.393.514	9,29	14,37
2. Madina	180.142.170	187.896.702	233.188.809	4,30	24,10
3. Tapanuli Selatan	288.886.692	306.561.379	342.734.512	6,12	11,80
4. Tapanuli Tengah	137.241.854	170.144.643	208.412.797	23,97	22,49
5. Tobasa	173.463.991	202.503.457	235.449.882	16,74	16,27
6. Tapanuli Utara	232.345.952	275.694.752	317.127.893	18,66	15,03
7. Labuhan Batu	237.672.424	302.754.529	412.440.197	27,38	36,23
8. Asahan	285.578.948	329.108.043	387.840.595	15,24	17,85
9. Simalungun	342.330.392	372.941.422	463.088.584	8,94	24,17
10. Dairi	143.585.397	170.917.746	210.003.220*	19,04	22,87
11. Karo	145.557.245	189.057.723	243.513.158	29,89	28,80
12. Deli Serdang	437.132.135	510.090.859	655.545.793	16,69	28,52
13. Langkat	290.575.735	337.808.100	406.219.910	16,25	20,25
14. Sibolga	53.412.983	109.967.459	139.786.496	105,88	27,12
15. Tanjung Balai	99.685.964	167.081.212	171.938.594	67,61	2,19
16. Pematang Siantar	118.125.329	168.498.152	192.839.470	42,64	14,5
17. Tebing Tinggi	91.671.313	145.009.610	161.946.270	58,18	11,68
18. Medan	545.821.102	751.219.510	1.168.266.862	37,63	55,52
19. Binjai	130.788.635	180.414.478	202.237.460*	37,94	12,10
20. Padang Sidempuan	-	83.007.711	138.987.840	-	67,44

Catatan: \*) Data RAPBD yang telah disetujui

Dilihat dari sisi nominalnya tahun 2001-2003, Kabupaten yang penerimaan daerahnya tertinggi adalah Kabupaten Deli Serdang, sedangkan untuk pemerintah Kota total penerimaan tertinggi adalah Kota Medan. Total penerimaan daerah Kota Medan tahun 2001 sebesar 545,821 milyar dan tahun 2002 meningkat 751,220 milyar atau naik 37,68 persen. Sedangkan tahun 2003 meningkat lagi menjadi 1.168,266 milyar (naik 55,52 persen). Dari seluruh Kabupaten/Kota, Kota Medan total penerimaan daerahnya memang yang tertinggi, karena Kota Medan adalah ibukota Propinsi Sumatera Utara, yang merupakan kota paling besar di

seluruh Propinsi Sumatera Utara dan sudah mendapat predikat kota metropolitan. Karena Medan merupakan pusat kegiatan ekonomi Sumatera Utara, penerimaan pajak, PAD dan penerimaan lainnya cukup tinggi.

#### **4.2 Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2001-2003**

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari sumber pendapatan daerah yang terdiri : pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, dan penerimaan PAD lainnya. PAD merupakan salah satu sumber penerimaan yang harus dipacu pertumbuhannya secara berkesinambungan, agar setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Pajak daerah merupakan komponen penyumbang terbesar dalam PAD, jumlah dan kenaikan retribusi PAD akan sangat berperan dalam rencana peningkatan kemandirian pemerintah daerah untuk tidak selalu tergantung kepada bantuan dan pemerintah pusat.

Dari Tabel 4.2. dapat dilihat pada tahun 2001 persentase PAD terhadap total penerimaan daerah yang tertinggi adalah Kota Medan, dengan perolehan PAD sebesar 88,262 milyar dari total penerimaan 545,821 milyar ( 16,17 persen ). Persentase PAD terhadap total penerimaan tertinggi kedua adalah Kota Pematang Siantar yaitu sebesar 8,02 persen dengan nilai nominalnya sebesar 9,468 milyar dari total penerimaan daerah sebesar 118,125 milyar. Sedangkan persentase PAD yang paling rendah adalah Kabupaten Mandailing Natal hanya mencapai 1,08 persen. PAD yang dihasilkan Kabupaten Madina tahun 2001 hanya sebesar 1,943 milyar dengan total penerimaan sebesar 180,142 milyar.

**Tabel 4.2. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota Tahun 2001 - 2003**

Kabupaten/Kota	Persentase PAD Terhadap Total Penerimaan (%)		
	2001	2002	2003
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Nias	2,39	2,46	3,82
2. Madina	1,08	3,48	2,28
3. Tapanuli Selatan	1,49	2,25	2,30
4. Tapanuli Tengah	2,20	2,92	2,61
5. Tobasa	1,87	3,22	3,52
6. Tapanuli Utara	6,15	6,79	5,34
7. Labuhan Batu	3,53	4,41	6,21
8. Asahan	5,45	5,78	5,83
9. Simalungun	3,45	3,85	3,78
10. Dairi	2,78	2,92	2,62
11. Karo	3,22	3,97	3,82
12. Deli Serdang	6,18	6,34	7,92
13. Langkat	3,22	3,67	3,64
14. Sibolga	4,61	3,87	5,10
15. Tanjung Balai	4,15	4,97	5,78
16. Pematang Siantar	8,02	5,99	6,00
17. Tebing Tinggi	4,49	3,94	3,87
18. Medan	16,17	19,56	20,01
19. Binjai	2,99	3,16	4,33
20. Padang Sidempuan	-	2,62	2,51

Persentase PAD terhadap total penerimaan daerah tahun 2001 – 2003, Kota Medan terus meningkat, sumbangan PAD terhadap total penerimaan tahun 2001 sebesar 16,17 persen, tahun 2002 naik menjadi 19,56 persen dan tahun 2003 persentase PAD Kota Medan meningkat menjadi 20,01 persen dari total penerimaan. Perolehan PAD Kota Medan sudah cukup baik untuk membiayai pembangunan di daerahnya. Berarti pajak dan retribusi yang dihasilkan Kota Medan cukup tinggi, dan agar perolehan ini terus meningkat komponen-komponen yang berkaitan dengan

hal tersebut harus ditindaklanjuti sebagai timbal balik pembayar pajak dan retribusi sekaligus memotivasi mereka untuk taat pajak. Dengan memberikan pelayanan yang baik dan perbaikan fasilitas umum bagi masyarakat sebagai wajib pajak, mereka dapat merasakan manfaat pembayaran pajak.

Kabupaten Deli Serdang perolehan PAD nya juga mengalami sedikit peningkatan pada kurun waktu tiga tahun ( 2001 – 2003 ) yaitu sebesar 6,18 persen tahun 2001, tahun 2002 naik menjadi 6,34 persen dan tahun 2003 mencapai 7,92 persen.

#### **4.3 Persentase Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Total Penerimaan Kabupaten/Kota Tahun 2001-2003**

Dana Alokasi Umum adalah transfer dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk menutupi kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan. Kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian Pemerintah Daerah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat sangat diperlukan.

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu sumber dana terbesar dari dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota se Sumatera Utara tahun 2001 – 2003 persentasenya terhadap total penerimaan daerah berkisar 50 – 85 persen. Pada tahun 2001 Kabupaten Nias persentase DAU nya tertinggi se Sumatera Utara yaitu sebesar 85,27 persen dengan nilai 195,385 milyar dari total penerimaan 229,127 milyar.

Tahun 2002 persentase Dana Alokasi Umum tertinggi adalah Kota Padang Sidempuan sebesar 85,24 persen. Kota Padang Sidempuan merupakan hasil pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan. Dana Alokasi Umum yang diturunkan dari Pemerintah Pusat ke daerah tersebut mulai tahun 2002 sebesar 70,755 milyar dan tahun 2003 meningkat menjadi 107, 485 milyar atau naik 51,89 persen. Persentase Dana Alokasi Umum terhadap total penerimaan tahun 2003 sebesar 77,33 persen.

Kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap total penerimaan daerah sangat besar, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Persentase Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Total Penerimaan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota Tahun 2001-2003

Kabupaten/Kota	Persentase DAU Terhadap Total Penerimaan (%)		
	2001	2002	2003
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Nias	85,27	83,64	80,61
2. Madina	73,30	74,73	71,14
3. Tapanuli Selatan	78,23	82,85	79,25
4. Tapanuli Tengah	76,87	72,51	61,94
5. Tobasa	68,88	70,08	66,49
6. Tapanuli Utara	76,79	76,77	71,84
7. Labuhan Batu	73,06	72,15	63,84
8. Asahan	75,50	72,17	75,48
9. Simalungun	80,70	74,08	64,78
10. Dairi	72,38	77,31	76,74
11. Karo	63,55	75,36	71,23
12. Deli Serdang	76,47	80,73	76,43
13. Langkat	72,42	70,70	71,57
14. Sibolga	69,61	79,98	67,47
15. Tanjung Balai	43,64	59,96	60,41
16. Pematang Siantar	82,88	76,99	75,21
17. Tebing Tinggi	81,81	76,07	70,99
18. Medan	51,87	46,77	37,07
19. Binjai	83,41	71,41	65,29
20. Padang Sidempuan	-	85,24	77,33

Kota Medan pada tahun 2002 dan 2003, persentase Dana Alokasi Umum terhadap total penerimaan daerahnya terendah dibandingkan Kabupaten/Kota di seluruh Sumatera Utara yaitu sebesar 46,77 persen dan 37,07 persen. Rendahnya Dana Alokasi Umum Kota Medan karena PAD yang diperoleh daerah

ini cukup tinggi. Dengan tingginya PAD daerah ini, diharapkan Kota Medan menjadi salah satu contoh bagi kabupaten/kota lainnya di Sumatera Utara.

#### **4.4 Persentase Belanja Rutin Terhadap Total Pengeluaran Kabupaten/ Kota Tahun 2001-2003**

Belanja Daerah terdiri dari 2 jenis Belanja yaitu Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan. Belanja rutin adalah pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang, biaya pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja lain-lain, angsuran pinjaman/hutang dan bunga, bantuan keuangan, pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain dan pengeluaran tidak disangka.

Persentase belanja rutin terhadap total pengeluaran tahun 2001 tertinggi di Sumatera Utara adalah Kota Sibolga sebesar 98,76 persen dan terendah Kabupaten Mandailing Natal sebesar 48,37 persen. Kota Padang Sidempuan sebagai daerah baru, persentase belanja rutin terhadap total pengeluaran tahun 2002 tertinggi dibandingkan kabupaten/kota se Sumatera Utara yakni sebesar 83,27 persen dan yang terendah Kota Tanjung Balai hanya 45,65 persen.

Tahun 2003 belanja rutin Kota Padang Sidempuan sebesar 101,044 milyar atau 78,86 persen terhadap total pengeluaran. Kota Padang Sidempuan persentase belanja rutinnya tertinggi dan yang terendah adalah Kabupaten Mandailing Natal sebesar 50,96 persen. Persentase belanja rutin terhadap total pengeluaran Kabupaten/Kota se Sumatera Utara tahun 2001-2003 lebih terinci dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Meskipun otonomi daerah telah berjalan sejak tahun 2001 hingga sekarang, ternyata belanja rutin masih mendominasi penggunaan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Harapan masyarakat untuk lebih banyak menikmati pembangunan melalui pengeluaran belanja pembangunan yang makin meningkat ternyata belum dapat dirasakan.

Tabel 4.4. Persentase Belanja Rutin terhadap Total Pengeluaran Kabupaten/Kota se Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota Tahun 2001 - 2003

Kabupaten/Kota	Persentase Belanja Rutin Terhadap Total Pengeluaran (%)		
	2001	2002	2003
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Nias	54,14	68,85	65,26
2. Madina	48,37	53,20	50,96
3. Tapanuli Selatan	77,80	73,03	73,11
4. Tapanuli Tengah	65,07	61,78	52,81
5. Tobasa	60,63	58,46	58,56
6. Tapanuli Utara	58,11	66,26	65,88
7. Labuhan Batu	77,52	75,39	75,04
8. Asahan	76,61	71,32	70,43
9. Simalungun	71,51	68,79	63,70
10. Dairi	77,17	72,62	71,57
11. Karo	84,10	80,33	71,47
12. Deli Serdang	80,86	77,49	72,88
13. Langkat	77,77	79,49	67,35
14. Sibolga	98,76	69,75	60,63
15. Tanjung Balai	69,84	45,65	53,32
16. Pematang Siantar	88,52	71,72	73,98
17. Tebing Tinggi	71,74	65,73	65,81
18. Medan	80,67	74,81	70,48
19. Binjai	65,77	60,31	62,73
20. Padang Sidempuan	-	83,27	78,86

#### 4.5 Persentase Belanja Pembangunan Terhadap Total Pengeluaran Kabupaten/Kota Tahun 2001-2003

Belanja pembangunan adalah pengeluaran yang ditujukan untuk pembangunan, pada umumnya biaya pembangunan tersebut sudah diprogram dalam Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA). Seluruh pengeluaran pembangunan diprogramkan dalam berbagai proyek disetiap sektor/subsektor.

Secara sektoral belanja pembangunan merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai berbagai proyek di setiap sektor yang terdiri dari sektor Industri; Pertanian dan Kehutanan; Sumber Daya Air dan Irigasi; Tenaga Kerja; Perdagangan; Pengembangan Usaha Daerah; Keuangan Daerah dan Koperasi; Telekomunikasi; Pembangunan Daerah dan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang; Pendidikan, Kebudayaan, Kepercayaan terhadap Tuhan YME; Pemuda dan Olah Raga; Kependudukan dan Keluarga Sejahtera; Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja; Agama; Hukum; dan sektor lainnya.

Persentase belanja pembangunan terhadap total pengeluaran tahun 2001 tertinggi adalah Kabupaten Mandailing Natal yakni sebesar 51,63 persen, dengan nilai nominal belanja pembangunan 83,401 milyar dan total pengeluaran sebesar 161,540 milyar. Bila dilihat dari nilai belanja pembangunan dari seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, Kabupaten Nias tahun 2001 belanja pembangunannya tertinggi yaitu sebesar 99,400 milyar dan terendah adalah Kota Sibolga hanya sebesar 0,567 milyar.

Total pengeluaran tahun 2001 yang tertinggi adalah Kota Medan sebesar 513,505 milyar. Dari data tersebut dapat dikatakan belanja rutin Kota Medan lebih besar daripada Kabupaten/Kota lain karena pegawai negeri sipil di Kota Medan lebih banyak dan belanja rutin instansi-instansi bersangkutan lebih tinggi.

Belanja pembangunan Kota Tanjung Balai tahun 2002 terhadap total pengeluaran menempati angka tertinggi yaitu sebesar 54,35 persen, dan yang terendah adalah Kota Padang Sidempuan sebesar 16,73 persen. Berdasarkan nilai nominalnya, Kota Padang Sidempuan merupakan kota yang belanja pembangunannya paling kecil dibandingkan daerah lainnya yaitu 13,626 milyar dari nilai total pengeluaran 81,433 milyar.



Tabel 4.5. Persentase Belanja Pembangunan terhadap Total Pengeluaran Kabupaten/Kota se Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota Tahun 2001 - 2003

Kabupaten/Kota	Persentase Belanja Pembangunan Terhadap Total Pengeluaran (%)		
	2001	2002	2003
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Nias	45,86	31,15	34,74
2. Madina	51,63	46,80	49,04
3. Tapanuli Selatan	22,20	26,97	26,89
4. Tapanuli Tengah	34,93	38,22	47,19
5. Tobasa	39,37	41,54	41,44
6. Tapanuli Utara	41,89	33,74	34,12
7. Labuhan Batu	22,48	24,61	24,96
8. Asahan	23,39	28,68	29,57
9. Simalungun	28,49	31,21	36,30
10. Dairi	22,83	27,38	28,43
11. Karo	15,90	19,67	28,53
12. Deli Serdang	19,14	22,51	27,12
13. Langkat	22,23	20,65	32,65
14. Sibolga	1,24	30,25	39,37
15. Tanjung Balai	30,16	54,35	46,68
16. Pematang Siantar	11,48	28,28	26,02
17. Tebing Tinggi	28,26	34,27	34,19
18. Medan	19,33	25,19	29,52
19. Binjai	34,23	39,69	37,27
20. Padang Sidempuan	-	16,73	21,14

Tahun 2003 Kota Medan belanja pembangunan sebesar 332,239 milyar dan total pengeluaran sebesar 1.125,322 milyar. Jadi persentase belanja pembangunan terhadap total pengeluaran sebesar 29,52 persen. Persentase belanja pembangunan terhadap total pengeluaran yang terkecil adalah Kota Padang Sidempuan taitu sebesar 21,14 persen. Sedangkan persentase yang tertinggi untuk tahun 2003 adalah Kabupaten Mandailing Natal sebesar 49,04 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa hampir separuh total pengeluaran Kabupaten Mandailing Natal digunakan untuk belanja pembangunan. Dilihat dari nominalnya, Kabupaten Deli Serdang

belanja pembangunannya tertinggi yaitu sebesar 184,952 milyar dan yang terendah Kota Padang Sidempuan yakni sebesar 27,08 milyar.

#### **4.6 Belanja Pembangunan Per Kapita Tahun 2001-2003**

Belanja pembangunan per kapita adalah nilai nominal belanja pembangunan dibagi jumlah penduduk daerah tersebut. Hal ini untuk melihat berapakah nilai belanja pembangunan tersebut perorangnya, apakah dana pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tersebut sudah merata dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat dan nilainya bisa dibandingkan dengan daerah yang lain. Selain itu juga dapat melihat apakah dana yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk dapat mengendalikan tingkat efisien dan efektifitas dana APBD, maka untuk perencanaan selanjutnya perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang diprogramkan.

Pada Tahun 2001 belanja pembangunan perkapita tertinggi adalah Kabupaten Tapanuli Utara yaitu sebesar Rp 238.650,- dan yang terendah adalah Kota Sibolga sebesar Rp 6.750,- Tahun 2002 Kota Tanjung Balai belanja pembangunan perkapitanya tertinggi yakni sebesar Rp 492.610,- dan yang terendah Kabupaten Deli Serdang hanya mencapai Rp 55.800,- Untuk tahun 2003 belanja pembangunan perkapita tertinggi adalah Kota Binjai dengan nilai Rp 870.560,- dan paling rendah adalah Kabupaten Deli Serdang yaitu sebesar Rp 90.010,- (Tabel 4.6)

Bila dicermati lebih jauh, Kota Medan belanja pembangunan tahun 2003 nilainya paling tinggi yaitu sebesar 332,239 milyar tetapi karena jumlah penduduknya juga tinggi yaitu berjumlah 1.979.340 orang maka belanja perkapitanya rendah. Sedangkan Kota Binjai belanja pembangunannya sebesar 73,178 milyar dan jumlah penduduknya hanya 225.535 orang, maka belanja perkapitanya tinggi. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya belanja pembangunan perkapita sangat dipengaruhi dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Namun demikian, diharapkan belanja pembangunan per kapita terus meningkat.

Tabel 4.6. Belanja Pembangunan per Kapita Kabupaten/Kota se Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota Tahun 2001 - 2003 (rupiah)

Kabupaten/Kota	Belanja Pembangunan per Kapita (rupiah)		
	2001	2002	2003
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Nias	142,17	100,95	130,98
2. Madina	226,39	220,41	309,32
3. Tapanuli Selatan	80,67	104,32	117,38
4. Tapanuli Tengah	156,69	197,48	335,35
5. Tapanuli Utara	238,65	201,24	247,39
6. Tobasa	202,59	266,51	325,99
7. Labuhan Batu	57,15	74,16	94,56
8. Asahan	66,20	91,61	112,11
9. Simalungun	110,11	141,13	207,96
10. Dairi	102,69	146,75	201,25
11. Karo	75,03	111,81	216,58
12. Deli Serdang	40,70	55,80	90,01
13. Langkat	63,61	66,45	140,43
14. Sibolga	6,75	316,27	568,31
15. Tanjung Balai	127,23	492,61	439,85
16. Pematang Siantar	49,89	198,21	208,29
17. Tebing Tinggi	166,91	299,83	416,39
18. Medan	51,32	92,66	167,85
19. Binjai	184,26	319,33	324,46
20. Padang Sidempuan	-	-	160,70

## BAB V

### ANALISIS DAMPAK PENGGUNAAN DANA APBD KABUPATEN/ KOTA TERHADAP PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN PENDUDUK MISKIN

---

Analisis yang dilakukan lebih diarahkan kepada penggunaan APBD yang variabelnya diwakili oleh Belanja Pembangunan per jumlah penduduk menurut kabupaten/kota (belanja pembangunan perkapita), dimana variabel ini diharapkan memiliki pengaruh terhadap pembangunan manusia yang ditunjukkan oleh angka Indeks Pembangunan Manusia, dan jumlah penduduk miskin.

Variabel Belanja Pembangunan per kapita menurut kabupaten/kota diambil tahun 2002 dan tahun 2003, sedangkan variabel Indeks Pembangunan Manusia tahun 2004, Pertumbuhan Ekonomi tahun 2004 dan jumlah penduduk miskin tahun 2004.

#### **5.1 Analisis Kondisi Belanja Pembangunan 2002 – 2003 dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota**

Kabupaten/kota yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah seyogianya mengeluarkan belanja pembangunan perkapita relatif lebih besar terutama disektor pendidikan, kesehatan dan sektor-sektor yang mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia.

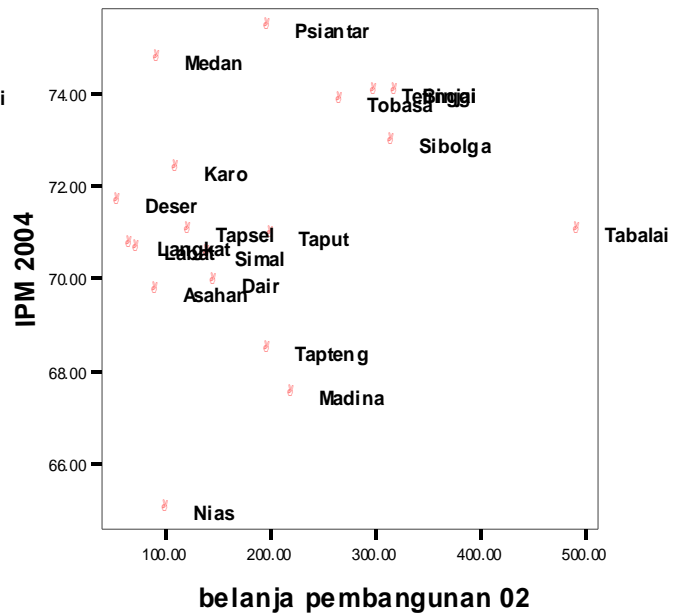
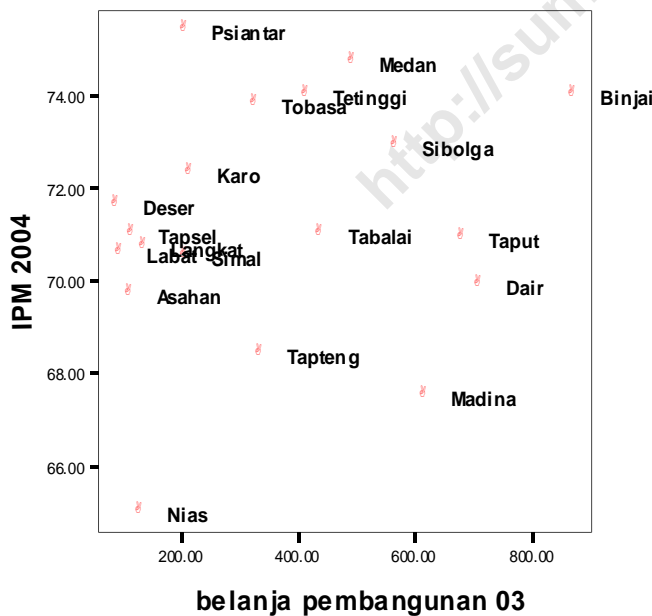
Dari Grafik 5.1. dapat dilihat Indeks Pembangunan Manusia tahun 2004 Kabupaten Mandailing Natal termasuk yang terendah bersama-sama dengan Kabupaten Nias, sehingga wajar bila Pemerintah Daerah tersebut meningkatkan Belanja Pembangunan perkapita tahun 2004 agar kedepannya tidak tertinggal dibanding kabupaten/kota lain. Kabupaten Nias hendaknya meningkatkan belanja pembangunan perkapita paling tidak mendekati Kabupaten Madina agar dapat meningkatkan indeks pembangunan manusianya (IPM-nya) secara bertahap. Kota Pematang Siantar dan Medan memiliki IPM Tahun 2004 yang tinggi, walaupun belanja pembangunan per kapita kedua daerah ini lebih kecil dari Kota Sibolga, Tanjung Balai, Tebing Tinggi. Kedepan diharapkan kedua daerah ini dapat meningkatkan belanja pemerintah per kapitanya agar IPM-nya yang sudah tinggi dapat dipertahankan. Belanja pembangunan perkapita Tahun 2003 Kota Sibolga

adalah yang tertinggi, kedepannya diharapkan Kota Sibolga bisa melampaui IPM Kota Pematang Siantar dan Medan.

Bila dilihat Grafik 5.2, Kota Tanjung Balai mengeluarkan belanja pembangunan perkapita Tahun 2002 tertinggi, tetapi dampaknya terhadap IPM Tahun 2004 tidak begitu menggembirakan. Hal ini terlihat IPM Tahun 2003 Kota Tanjung Balai hanya pada posisi menengah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Utara. Sedangkan Kabupaten Langkat mengeluarkan belanja pembangunan per kapita paling kecil di tahun 2002. Kota Pematang Siantar dan Medan masih tetap memiliki IPM tertinggi, sedangkan IPM terendahnya Kabupaten Nias dan Mandailing Natal di tahun 2004.

Grafik 5.1. Belanja Pembangunan Per Kapita 2003 terhadap IPM 2004

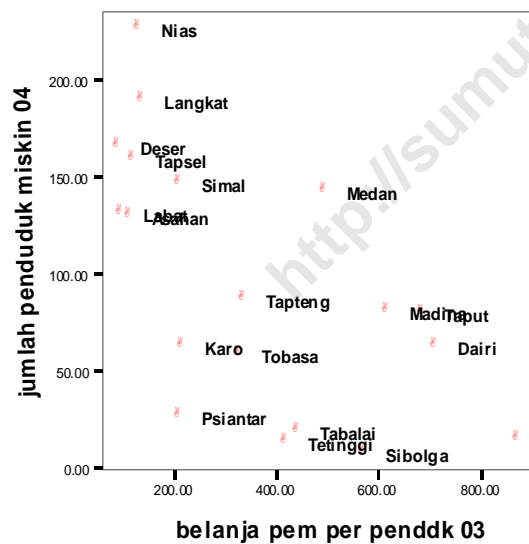
Grafik 5.2. Belanja Pembangunan Per Kapita 2002 terhadap IPM 2004



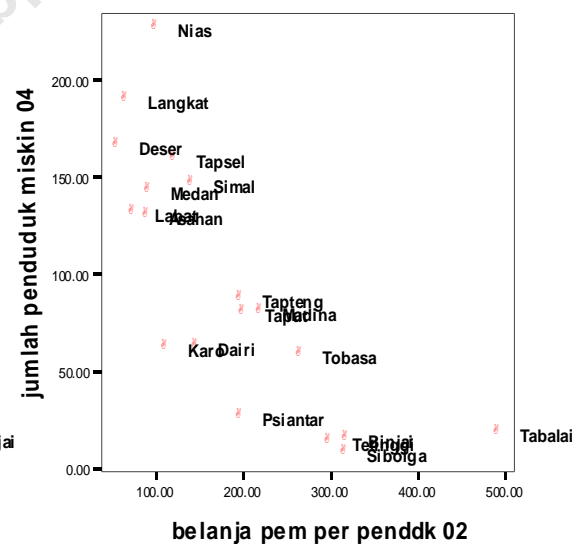
## 5.2 Analisis Kondisi Belanja Pembangunan 2002 – 2003 dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota

Pemerintah kabupaten/kota tentunya tidak menginginkan penduduknya banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan atau terkategori penduduk miskin daerahnya relatif banyak. Untuk itu belanja pembangunan seharusnya juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar kemiskinan dapat berkurang di daerah tersebut.

Grafik 5.3. Belanja Pembangunan Per Kapita 2003 terhadap Jumlah Penduduk Miskin 2004



Grafik 5.4. Belanja Pembangunan Per Kapita 2002 terhadap Jumlah Penduduk Miskin 2004



Dari Grafik 5.3 dan 5.4, dapat dilihat Kabupaten Nias dan Langkat adalah kabupaten yang paling banyak jumlah penduduk miskinnya Tahun 2004. Sementara belanja pembangunan perkapita baik tahun 2003 dan 2002 termasuk kecil. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab jumlah penduduk miskin tetap tinggi, apalagi arah penggunaan kemungkinan tidak tepat sasaran kepada rakyat banyak. Sementara Kota Tebing Tinggi, Sibolga, Binjai dan Tanjung Balai adalah daerah yang sedikit jumlah penduduk miskinnya, dan memang jumlah penduduk di kota tersebut tidak banyak. Selanjutnya untuk kondisi tahun 2002 tidak banyak terlihat perubahan-perubahan antar daerah ditinjau dari jumlah penduduk miskinnya.

### 5.3 Pengaruh/Dampak Belanja Pembangunan 2002 – 2003 terhadap Indeks Pembangunan Manusia 2004

Teori menunjukkan, pengaruh belanja pembangunan adalah positif (searah) terhadap indeks pembangunan manusia. Untuk itu akan di uji pengaruh belanja pembangunan per kapita tahun 2002 dan 2003 terhadap indeks pembangunan manusia tahun 2004. Data yang digunakan untuk mengestimasi dampak ini adalah data yang berasal dari 19 kabupaten/kota, sehingga jumlah observasinya (n) adalah 19. Data ketiga variabel tersebut seperti ada pada Tabel 5.1.

Setelah dilakukan perhitungan dengan program SPSS yang menggunakan alat analisis regresi berganda (Metode Ordinary Least Squares), rangkuman hasil perhitungannya adalah:

Variabel	Koefisien Estimasi	T - ratio	Sig.	
Konstanta	70,054	55,45	0,000	$R^2 = 0,071$
BP3	0,001	0,239	0,814	$F_{hit} = 0,611$
BP2	0,005	0,762	0,457	(sig. = 0,555)

Keterangan :

BP2 : Belanja pembangunan perkapita Tahun 2002

BP3 : Belanja pembangunan perkapita Tahun 2003

IPM4: Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2004

Persamaan yang terbentuk dari tabel di atas, adalah :

$$IPM4 = 70,054 + 0,001(BP3) + 0,005(BP2)$$

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa belanja pembangunan perkapita tahun 2002 dan 2003 mempunyai pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2004, tetapi tidak signifikan pada tingkat kesalahan  $\alpha = 10$  persen.

Tabel 5.1. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2003, Belanja Pembangunan Tahun 2002 – 2003 menurut kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara.

Kabupaten/Kota	IPM Tahun 2004	Belanja Pembangunan (Rp 000/jiwa)	
		2003	2002
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Nias	65	130,98	100,95
2. Mandailing Natal	67.5	309,32	220,41
3. Tapanuli Selatan	68.4	117,38	104,32
4. Tapanuli Tengah	69.7	335,35	197,48
5. Tapanuli Utara	69.9	247,39	201,24
6. Toba Samosir	70.5	325,99	266,51
7. Labuhan Batu	70.6	94,56	74,16
8. Asahan	70.7	112,11	91,61
9. Simalungun	70.9	207,96	141,13
10. Dairi	71	201,25	146,75
11. Karo	71	216,58	111,81
12. Deli Serdang	71.6	90,01	55,80
13. Langkat	72.3	140,43	66,45
14. Sibolga	72.9	568,31	316,27
15. Tanjung Balai	73.8	439,85	492,61
16. Pematang Siantar	74	208,29	198,21
17. Tebing Tinggi	74	416,39	299,83
18. Medan	74.7	167,85	92,66
19. Binjai	75.4	324,46	319,33
Sumatera Utara	71,4	268,38	119,60



#### 5.4 Pengaruh/Dampak Belanja Pembangunan 2002 - 2003 terhadap Jumlah Penduduk Miskin 2004

Pemerintah mengeluarkan belanja pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara umum. Bila kesejahteraan masyarakat meningkat, salah satu indikatornya adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin di daerah tersebut. Belanja pemerintah tersebut efektif dan tepat sasaran apabila dapat dinikmati masyarakat umum. Belanja pemerintah perkapita Tahun 2002 dan 2003 diasumsikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin tahun 2004. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Untuk melihat hubungan atau dampak belanja pembangunan terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin dapat digunakan metode Ordinary Least Square (OLS) dimana jumlah penduduk miskin sebagai variabel terikatnya dan belanja pembangunan perkapita tahun 2002 dan 2003 sebagai variabel bebasnya. Dengan bantuan SPSS diperoleh hasilnya sebagai berikut:

Variabel	Koefisien estimasi	T - ratio	Sig.	
Konstanta	188,834	9,868	0,000	$R^2 = 0,666$
BP3	-0,073	-1,544	0,142	$F_{hit} = 15,981$
BP2	-0,368	-3,653	0,02	(sig. = 0,000)

Keterangan :

BP2: Belanja pembangunan perkapita Tahun 2002

BP3: Belanja pembangunan perkapita Tahun 2003

JPM3 : Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2004

Dari tabel di atas diperoleh persamaan :

$$JPM4 = 188,834 - 0,073 BP3 - 0,368 BP2$$

Koefisien estimasi pada tabel di atas sudah sesuai dengan asumsi yakni jika belanja pembangunan perkapita meningkat akan menurunkan jumlah penduduk miskin.

Bila dilihat secara parsial, belanja pembangunan Tahun 2003 tidak signifikan pengaruhnya terhadap jumlah penduduk miskin tahun 2004 pada

taraf 5 persen, sedangkan belanja pembangunan tahun 2002 signifikan pengaruhnya terhadap jumlah penduduk miskin tahun 2004 pada taraf 5 persen. Sedangkan secara serentak (global) belanja pembangunan tahun 2002 dan 2003 pengaruhnya signifikan terhadap jumlah penduduk miskin tahun 2004.

Korelasi antara jumlah penduduk miskin tahun 2004 dengan belanja pembangunan tahun 2002 dan 2003 adalah negatif. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien korelasi antara jumlah penduduk miskin tahun 2004 dan belanja pembangunan tahun 2003 adalah -0,623 sedangkan antara jumlah penduduk miskin tahun 2004 dan belanja pembangunan tahun 2002 adalah -0,785. Ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat. Sedangkan melihat besarnya pengaruh belanja pemerintah per penduduk ditunjukkan oleh angka  $R^2$  yakni 0,666. Hal ini memberikan makna bahwa 66,6 persen pengurangan jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh belanja pemerintah per kapita tahun 2003 dan 2002, selebihnya (31,8 persen) dipengaruhi oleh faktor lainnya.

Tabel 5.3. Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2004, Belanja Pembangunan Tahun 2002 – 2003 menurut kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara.

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2004 (000 jiwa)	Belanja Pembangunan (Rp 000/jiwa)	
		2003	2002
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Nias	226	130,98	100,95
2. Mandailing Natal	80,2	309,32	220,41
3. Tapanuli Selatan	158,9	117,38	104,32
4. Tapanuli Tengah	87,1	335,35	197,48
5. Tapanuli Utara	79,6	247,39	201,24
6. Toba Samosir	58,4	325,99	266,51
7. Labuhan Batu	131,3	94,56	74,16
8. Asahan	129,6	112,11	91,61
9. Simalungun	146,3	207,96	141,13
10. Dairi	62,3	201,25	146,75
11. Karo	62,1	216,58	111,81
12. Deli Serdang	165,5	90,01	55,80
13. Langkat	189,2	140,43	66,45
14. Sibolga	7,8	568,31	316,27
15. Tanjung Balai	18,6	439,85	492,61
16. Pematang Siantar	26,2	208,29	198,21
17. Tebing Tinggi	13,5	416,39	299,83
18. Medan	142,6	167,85	92,66
19. Binjai	14,7	324,46	319,33
Sumatera Utara	1800,1	268,38	119,60

## **BAB VI**

### **Rangkuman & Saran**

---

#### **6.1 Rangkuman**

1. IPM Sumatera Utara pada tahun 2004 sebesar 71,4. IPM berada pada peringkat ke tujuh secara nasional. Kota Pematang Siantar memiliki IPM tertinggi (75,4) dan Kabupaten Nias Selatan dengan IPM terendah (63,1)
2. Jumlah penduduk miskin Sumatera Utara pada tahun 2004 sebesar 1,8 juta jiwa atau sekitar 14,93 persen dari jumlah penduduk.
3. Mayoritas penduduk miskin berpendidikan Tamat SD/ SLTP dan bekerja di sektor informal
4. Kabupaten yang persentase kenaikan penerimaan pemerintah terbesar adalah Kabupaten Karo yakni 29,89 persen dari tahun 2001 ke 2002, sedangkan dari tahun 2002 ke 2003 adalah Kabupaten Labuhan Batu yakni 36,23 persen. Sedangkan Kota yang persentase kenaikan penerimaan pemerintah terbesar adalah Kota Sibolga yakni 105,88 persen dari tahun 2001 ke 2002 dan Kota Padang Sidempuan dari tahun 2002 ke 2003.
5. Kabupaten/kota yang paling tinggi persentase PAD-nya terhadap total penerimaan daerah adalah Kota Medan 16,17 persen ditahun 2001, sedangkan di tahun 2002 sebesar 19,56 persen dan tahun 2003 sebesar 20,01 persen.
6. Persentase belanja rutin terhadap total pengeluaran kabupaten/kota yang terbesar adalah Kota Sibolga yakni 98,76 persen di tahun 2001, Kota Padang Sidempuan sebesar 83,27 persen di tahun 2002 dan 81,02 persen di tahun 2003.
7. Persentase belanja pembangunan terhadap total pengeluaran kabupaten/kota yang terbesar adalah Kabupaten Mandailing Natal 51,63 persen di tahun 2001, Kota Tanjung Balai sebesar 54,35 persen di tahun 2002 dan Kabupaten Mandailing Natal kembali di tahun 2003 sebesar 49,53 persen.
8. Belanja pembangunan perkapita yang terbesar untuk kabupaten/kota adalah Kabupaten Tapanuli Utara Rp 238.650/kapita di tahun 2001, Kota Tanjungbalai Rp 492.610/kapita di tahun 2002 dan Kota Binjai Rp 870.560/kapita di tahun 2003.

9. Belanja pembangunan perkapita tahun 2002 dan 2003 tidak nyata (tidak signifikan) pengaruhnya terhadap Indeks Pembangunan Manusia tahun 2004 pada  $\alpha = 5$  persen.
10. Belanja pembangunan perkapita tahun 2002 dan 2003 secara parsial tidak nyata (tidak signifikan) pengaruhnya sedangkan secara serentak (global) nyata (signifikan) pengaruhnya terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin tahun 2004.

## **6.2 Saran**

1. Dampak belanja pembangunan pemerintah perkapita terhadap pengurangan penduduk miskin lebih efektif bila lebih fokus pada peningkatan sumber daya manusia penduduk miskin.
2. Dampak belanja pembangunan pemerintah perkapita terhadap pembangunan manusia lebih efektif jika pemerintah kabupaten/kota lebih memfokuskan belanja pembangunan-nya ke sektor pendidikan dan kesehatan.

<http://sumut.bps.go.id>

TABEL 1

KOMPONEN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)  
MENURUT KABUPATEN/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA  
2002

Kabupaten / Kota	Komponen IPM				IPM	Peringkat
	Harapan Hidup	Melek Huruf	Rata-rata lama sekolah	Rata-rata Pengeluaran riil per kapita (000 Rp)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Kabupaten						
1 Nias	66.8	82.9	5.7	566.5	61.8	292
2 Mandailing Natal	62.0	96.5	6.8	575.9	63.7	255
3 Tapanuli Selatan	65.2	99.4	8.6	587.3	68.4	96
4 Tapanuli Tengah	65.6	94.7	7.6	575.4	65.8	174
5 Tapanuli Utara	65.4	97.2	8.3	582.2	67.3	134
6 Toba Samosir	66.9	96.2	9.1	594.7	69.5	73
7 Labuhan Batu	65.9	95.5	7.6	589.3	67.3	132
8 Asahan	67.2	94.1	6.9	587.8	67.0	143
9 Simalungun	67.4	96.4	8.0	586.2	68.3	98
10 Dairi	65.9	96.8	7.9	582.2	67.2	137
11 Karo	71.0	97.6	8.7	582.9	70.9	54
12 Deli Serdang	66.3	95.1	8.3	595.1	68.4	95
13 Langkat	67.1	97.4	8.2	583.6	68.3	97
Kota						
14 Sibolga	68.6	99.1	9.6	585.1	70.7	58
15 Tanjungbalai	67.2	96.3	8.4	576.5	67.8	118
16 Pematang Siantar	70.9	98.7	10.3	606.9	74.1	10
17 Tebing Tinggi	70.0	97.6	9.2	595.3	71.6	43
18 Medan	69.4	99.1	10.5	606.3	73.5	15
19 Binjai	69.4	97.7	9.6	594.7	71.6	44
Sumatera Utara	67.3	96.1	8.4	589.2	68.6	7

TABEL 2

KOMPONEN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)  
MENURUT KABUPATEN/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA  
2004

Kabupaten / Kota	Komponen IPM				IPM	Peringkat
	Harapan Hidup	Melek Huruf	Rata-rata lama sekolah	Rata-rata Pengeluaran riil per kapita (000 Rp)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Kabupaten						
1 Nias	67.9	86.0	6.0	589.4	65.0	341
2 Mandailing Natal	62.5	98.1	7.3	612.9	67.5	246
3 Tapanuli Selatan	66.4	99.3	8.7	612.8	71.0	105
4 Tapanuli Tengah	66.8	95.4	7.8	595.9	68.4	206
5 Tapanuli Utara	66.9	98.1	8.7	612.2	70.9	109
6 Toba Samosir	68.9	96.6	9.7	630.2	73.8	42
7 Labuhan Batu	66.1	97.9	8.1	619.1	70.6	125
8 Asahan	67.7	94.0	7.1	617.3	69.7	154
9 Simalungun	67.5	95.8	8.4	611.1	70.5	127
10 Dairi	66.2	95.7	8.1	616.5	69.9	143
11 Karo	70.1	96.6	8.8	609.9	72.3	76
12 Deli Serdang	68.0	96.8	8.6	617.7	71.6	83
13 Langkat	68.2	96.5	8.5	606.3	70.7	117
14 Nias Selatan	67.4	84.4	5.9	574.1	63.1	392
15 Humbang hasundutan	66.2	97.7	8.5	597.2	69.1	171
16 Pakpak Bharat	66.0	95.2	5.9	599.4	68.3	208
17 Samosir	67.9	96.4	8.5	612.5	71.7	82
18 Serdang Bedagai	67.2	96.0	8.0	606.4	70.0	139
Kota						
19 Sibolga	69.0	99.2	9.4	612.7	72.9	62
20 Tanjungbalai	68.1	98.7	8.3	606.1	71.0	106
21 Pematang Siantar	71.0	99.2	10.6	619.0	75.4	18
22 Tebing Tinggi	70.1	98.3	9.5	620.6	74.0	36.0
23 Medan	69.9	99.0	10.6	618.6	74.7	24
24 Binjai	70.1	98.0	9.5	620.8	74.0	37
25 Padang Sidempuan	68.1	99.3	9.6	613.5	72.6	71
Sumatera Utara	68.2	96.6	8.4	616.0	71.4	7

TABEL 3

JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN  
MENURUT KABUPATEN/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN 2002 DAN 2004

Kabupaten / Kota	Jumlah (000)		Persentase	
	2002	2004	2002	2004
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Kabupaten				
1 Nias	224.0	135,8	31.42	31,58
2 Mandailing Natal	88.1	80,2	23.77	21,31
3 Tapanuli Selatan	165.9	138,3	21.87	22,08
4 Tapanuli Tengah	74.7	87,1	29.89	31,47
5 Tapanuli Utara	85.6	48,9	20.89	19,16
6 Toba Samosir	74.1	58,4	24.03	20,37
7 Labuhan Batu	130.4	131,3	15.06	14,16
8 Asahan	158.4	129,6	15.66	12,91
9 Simalungun	163.1	146,3	18.87	17,94
10 Dairi	72.9	54,6	24.66	21,16
11 Karo	67.1	62,1	23.20	20,00
12 Deli Serdang	203.8	165,5	9.98	7,91
13 Langkat	194.4	189,2	20.60	19,89
14 Nias Selatan		90,2		32,15
15 Humbang hasundutan		30,7		20,11
16 Pakpak Bharat		7,7		22,62
17 Samosir				
18 Serdang Bedagai				
Kota				
19 Sibolga	8.5	7,8	10.10	9,01
20 Tanjungbalai	20.0	18,6	14.62	12,53
21 Pematang Siantar	30.3	26,2	12.28	11,55
22 Tebing Tinggi	15.1	13,5	11.94	10,10
23 Medan	93.2	142,6	4.80	7,13
24 Binjai	14.3	14,7	6.14	6,40
25 Padang Sidempuan		20,6		13,65
Sumatera Utara	1883.9	1800.1	15.84	14.93



TABEL 4

DISTRIBUSI PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT  
PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN  
TAHUN 2004

Kabupaten / Kota [1]	<SD [2]	Tamat SD/ SLTP [3]	SLTA + [4]	Total [5]
Kabupaten				
1 Nias	57,66	38,70	3,64	100,00
2 Mandailing Natal	41,03	55,36	3,61	100,00
3 Tapanuli Selatan	38,89	53,37	7,74	100,00
4 Tapanuli Tengah	49,75	43,99	6,26	100,00
5 Tapanuli Utara	41,72	43,23	15,05	100,00
6 Toba Samosir	37,91	34,52	27,57	100,00
7 Labuhan Batu	40,88	46,07	13,05	100,00
8 Asahan	51,36	43,53	5,11	100,00
9 Simalungun	39,06	50,22	10,72	100,00
10 Dairi	46,24	47,31	6,45	100,00
11 Karo	33,89	47,08	19,03	100,00
12 Deli Serdang	39,35	43,32	17,33	100,00
13 Langkat	41,30	49,40	9,30	100,00
14 Nias Selatan				
15 Humbang hasundutan				
16 Pakpak Bharat				
17 Samosir				
18 Serdang Bedagai				
Kota				
71 Sibolga	37,20	43,96	18,84	100,00
72 Tanjungbalai	47,67	44,53	7,80	100,00
73 Pematang Siantar	30,74	41,25	28,01	100,00
74 Tebing Tinggi	31,36	47,27	21,37	100,00
75 Medan	27,82	52,11	20,07	100,00
76 Binjai	25,25	56,51	18,24	100,00
77 Padang Sidempuan	36,54	46,25	17,21	100,00
Sumatera Utara	42,09	46,40	11,51	100,00

TABEL 5

Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Keatas  
Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota dan Status Bekerja,  
TAHUN 2004

Kabupaten / Kota	Tidak Bekerja	Bekerja di Sektor Informal*)	Bekerja di Sektor Formal**)
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten			
1 Nias	1,58	93,31	5,11
2 Mandailing Natal	10,59	84,95	4,46
3 Tapanuli Selatan	6,17	91,31	2,52
4 Tapanuli Tengah	19,22	68,78	12,00
5 Tapanuli Utara	5,91	93,64	0,45
6 Toba Samosir	7,73	81,72	10,55
7 Labuhan Batu	12,95	70,89	16,16
8 Asahan	13,54	47,67	38,79
9 Simalungun	27,15	51,33	21,52
10 Dairi	2,60	95,23	2,17
11 Karo	5,16	81,72	13,12
12 Deli Serdang	31,47	29,95	38,58
13 Langkat	25,17	36,47	38,36
14 Nias Selatan			
15 Humbang hasundutan			
16 Pakpak Bharat			
17 Samosir			
18 Serdang Bedagai			
Kota			
19 Sibolga	21,52	27,85	50,63
20 Tanjungbalai	19,94	30,35	49,71
21 Pematang Siantar	14,77	28,41	56,82
22 Tebing Tinggi	23,23	29,30	47,47
23 Medan	34,59	19,55	45,86
24 Binjai	26,38	28,75	44,87
25 Padang Sidempuan	19,09	60,91	20,00
Sumatera Utara	16,13	62,47	21,40

TABEL 6.

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT JENIS PENERIMAAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	111.081.126	328.292.859	403.983.926
2. Pendapatan asli daerah	222.889.343	334.306.932	480.210.816
2.1. Pajak Daerah	124.706.763	166.763.970	244.566.539
2.2. Retribusi Daerah	69.807.835	117.203.261	158.395.891
2.3. Bagian Laba Usaha Daerah	721.997	1.907.557	1.657.190
2.4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah	27.652.748	48.432.144	75.591.196
3. Dana Perimbangan	3.482.537.063	4.269.532.135	5.247.921.337
3.1. Bagi hasil pajak	369.313.462	454.675.017	745.607.471
3.2. Bagi hasil bukan pajak	45.482.951	58.582.295	43.988.101
3.3. Dana Alokasi Umum	3.009.278.637	3.717.381.958	4.294.978.750
3.4. Dana Alokasi Khusus	58.462.013	38.892.865	163.347.015
4. Penerimaan Lainnya	283.694.327	265.939.345	313.245.944
5. Pinjaman Pemerintah Daerah	62.943.220	13.017.183	132.599.833
JUMLAH	4.163.145.078	5.211.088.454	6.577.961.856

TABEL 7.

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH  
KABUPATEN NIAS MENURUT JENIS PENERIMAAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan / <i>Receipt items</i>	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	8.045.958	12.203.957	23.049.087
2. Pendapatan asli daerah	5.469.232	6.152.160	10.929.944
2.1. Pajak Daerah	2.135.792	1.914.567	2.296.052
2.2. Retribusi Daerah	822.358	1.590.979	3.281.692
2.3. Bagian Laba Usaha Daerah	0	183.660	0
2.4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah	2.511.082	2.462.954	5.352.200
3. Dana Perimbangan	210.612.883	229.194.532	251.194.483
3.1. Bagi hasil pajak	14.416.514	18.450.244	16.734.757
3.2. Bagi hasil bukan pajak	811.666	1.303.313	2.011.315
3.3. Dana Alokasi Umum	195.384.703	209.440.975	230.874.303
3.4. Dana Alokasi Khusus	0	0	1.574.108
4. Penerimaan Lainnya	4.998.746	0	1.220.000
5. Pinjaman Pemerintah Daerah	0	2.860.053	0
JUMLAH	229.126.819	250.410.702	286.393.514

TABEL 8.

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH  
KABUPATEN MANDAILING NATAL MENURUT JENIS PENERIMAAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan [1]	2001 [2]	2002 [3]	2003 [4]
1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	5.380.539	13.889.746	17.856.652
2. Pendapatan asli daerah	1.943.576	6.533.546	5.315.600
2.1. Pajak Daerah	533.966	2.474.143	2.207.000
2.2. Retribusi Daerah	759.524	1.027.542	1.558.600
2.3. Bagian Laba Usaha Daerah	0	0	0
2.4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah	650.086	3.031.861	1.550.000
3. Dana Perimbangan	156.220.309	163.210.369	187.597.512
3.1. Bagi hasil pajak	8.007.004	13.842.729	9.176.789
3.2. Bagi hasil bukan pajak	2.132.044	2.043.860	2.862.000
3.3. Dana Alokasi Umum	132.044.304	140.420.000	165.890.000
3.4. Dana Alokasi Khusus	14.036.956	6.903.780	9.668.723
4. Penerimaan Lainnya	16.597.746	361.081	18.886.270
5. Pinjaman Pemerintah Daerah	0	3.902.225	3.532.775
JUMLAH	180.142.170	187.896.967	233.188.809

TABEL 9

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI  
SELATAN MENURUT JENIS PENERIMAAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	5.462.071	16.691.093	12.154.237
2. Pendapatan asli daerah	4.305.466	6.893.936	7.879.345
2.1. Pajak Daerah	1.891.674	2.104.188	2.665.528
2.2. Retribusi Daerah	1.673.254	3.364.314	3.401.894
2.3. Bagian Laba Usaha Daerah	0	50.000	120.000
2.4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah	740.538	1.375.434	1.691.923
3. Dana Perimbangan	252.980.946	282.976.350	320.275.198
3.1. Bagi hasil pajak	21.976.754	26.110.190	35.987.966
3.2. Bagi hasil bukan pajak	2.152.809	1.567.901	3.225.871
3.3. Dana Alokasi Umum	225.998.218	253.984.186	271.621.476
3.4. Dana Alokasi Khusus	2.853.165	1.314.073	9.439.885
4. Penerimaan Lainnya	26.138.209	0	2.425.732
5. Pinjaman Pemerintah Daerah	0	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>288.886.692</b>	<b>306.561.379</b>	<b>342.734.512</b>

TABEL 10.

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI  
TENGAH MENURUT JENIS PENERIMAAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	2.954.651	25.021.190	31.278.758
2. Pendapatan asli daerah	3.020.770	4.972.428	5.433.746
2.1. Pajak Daerah	899.901	1.317.255	1.718.101
2.2. Retribusi Daerah	700.216	1.291.511	1.192.593
2.3. Bagian Laba Usaha Daerah	0	0	0
2.4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah	1.420.653	2.363.662	2.523.052
3. Dana Perimbangan	115.631.663	137.475.170	149.959.575
3.1. Bagi hasil pajak	8.729.282	13.022.877	12.533.382
3.2. Bagi hasil bukan pajak	693.306	826.360	1.554.721
3.3. Dana Alokasi Umum	105.499.740	123.377.181	129.090.000
3.4. Dana Alokasi Khusus	709.335	248.752	6.781.472
4. Penerimaan Lainnya	15.634.770	2.675.855	7.000.000
5. Pinjaman Pemerintah Daerah	0	0	14.740.718
JUMLAH	137.241.854	170.144.643	208.412.797

TABEL 11.

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA  
SAMOSIR MENURUT JENIS PENERIMAAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	7.328.560	14.909.691	19.232.971
2. Pendapatan asli daerah	10.661.957	13.755.147	12.573.470
2.1. Pajak Daerah	810.785	1.303.043	1.394.134
2.2. Retribusi Daerah	665.155	946.689	1.299.789
2.3. Bagian Laba Usaha Daerah	0	0	0
2.4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah	9.186.017	11.505.415	9.879.547
3. Dana Perimbangan	129.171.642	158.438.364	182.623.041
3.1. Bagi hasil pajak	8.179.669	15.167.323	12.002.689
3.2. Bagi hasil bukan pajak	948.607	1.148.441	5.026.308
3.3. Dana Alokasi Umum	119.473.788	141.909.998	156.550.000
3.4. Dana Alokasi Khusus	569.578	212.602	9.044.044
4. Penerimaan Lainnya	26.301.832	15.400.255	21.020.400
5. Pinjaman Pemerintah Daerah	0	0	0
JUMLAH	173.463.991	202.503.457	235.449.882



TABEL 12.

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI  
UTARA MENURUT JENIS PENERIMAAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	5.853.660	22.565.655	34.968.148
2. Pendapatan asli daerah	4.342.558	8.881.839	11.177.704
2.1. Pajak Daerah	885.327	1.037.077	1.644.917
2.2. Retribusi Daerah	2.112.897	4.217.461	1.715.031
2.3. Bagian Laba Usaha Daerah	12.000	11.325	14.808
2.4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah	1.332.334	3.615.976	7.802.948
3. Dana Perimbangan	207.639.140	224.123.188	255.059.296
3.1. Bagi hasil pajak	7.795.555	8.223.541	14.475.128
3.2. Bagi hasil bukan pajak	3.077.438	3.413.848	1.375.536
3.3. Dana Alokasi Umum	178.415.390	211.663.645	227.813.893
3.4. Dana Alokasi Khusus	18.350.757	822.154	11.394.739
4. Penerimaan Lainnya	14.510.594	20.124.070	15.922.745
5. Pinjaman Pemerintah Daerah	0	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>232.345.952</b>	<b>275.694.752</b>	<b>317.127.893</b>

TABEL 13.

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHAN  
BATU MENURUT JENIS PENERIMAAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan [1]	2001 [2]	2001 [3]	2003 [4]
1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	8.999.047	17.760.466	28.845.763
2. Pendapatan asli daerah	8.383.322	13.356.657	25.630.556
2.1. Pajak Daerah	3.086.323	5.089.143	6.672.872
2.2. Retribusi Daerah	3.119.625	4.226.670	7.544.073
2.3. Bagian Laba Usaha Daerah	1.500	25.000	72.000
2.4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah	2.175.874	4.015.844	11.341.611
3. Dana Perimbangan	209.833.836	249.375.807	337.202.577
3.1. Bagi hasil pajak	26.369.717	28.512.148	63.505.183
3.2. Bagi hasil bukan pajak	9.816.174	1.542.946	1.514.042
3.3. Dana Alokasi Umum	173.647.945	218.440.000	263.300.000
3.4. Dana Alokasi Khusus	0	880.713	8.883.352
4. Penerimaan Lainnya	10.456.219	22.261.599	20.761.301
5. Pinjaman Pemerintah Daerah	0	0	0
JUMLAH	237.672.424	302.754.529	412.440.197

TABEL 14.

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 ASAHAN MENURUT JENIS PENERIMAAN  
 2001 - 2003  
 (000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	10.090.243	18.348.684	13.780.281
2. Pendapatan asli daerah	15.569.195	19.015.242	22.626.588
2.1. Pajak Daerah	12.475.626	14.300.061	14.285.738
2.2. Retribusi Daerah	2.328.118	3.097.291	3.842.245
2.3. Bagian Laba Usaha Daerah	0	0	0
2.4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah	765.451	1.617.890	4.498.605
3. Dana Perimbangan	249.674.892	282.129.389	348.665.884
3.1. Bagi hasil pajak	33.309.054	43.470.560	47.949.471
3.2. Bagi hasil bukan pajak	740.194	966.607	1.204.674
3.3. Dana Alokasi Umum	215.625.644	237.505.000	292.739.191
3.4. Dana Alokasi Khusus	0	187.222	6.772.548
4. Penerimaan Lainnya	10.244.618	9.614.728	2.767.842
5. Pinjaman Pemerintah Daerah	0	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>285.578.948</b>	<b>329.108.043</b>	<b>387.840.595</b>

TABEL 15.

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN  
SIMALUNGUN MENURUT JENIS PENERIMAAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	5.723.223	8.573.411	9.259.688
2. Pendapatan asli daerah	11.796.209	14.359.269	17.493.101
2.1. Pajak Daerah	7.990.456	9.180.311	10.193.000
2.2. Retribusi Daerah	2.574.445	3.299.646	5.132.659
2.3. Bagian Laba Usaha Daerah	0	0	0
2.4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah	1.231.308	1.879.312	2.167.442
3. Dana Perimbangan	320.627.747	341.055.207	378.312.713
3.1. Bagi hasil pajak	33.188.353	36.169.281	39.256.489
3.2. Bagi hasil bukan pajak	4.745.895	5.133.479	3.138.767
3.3. Dana Alokasi Umum	276.264.379	276.260.000	299.970.000
3.4. Dana Alokasi Khusus	6.429.120	23.492.447	35.947.457
4. Penerimaan Lainnya	4.183.213	8.953.535	58.023.082
5. Pinjaman Pemerintah Daerah	0	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>342.330.392</b>	<b>372.941.422</b>	<b>463.088.584</b>

TABEL 16.

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN  
DAIRI MENURUT JENIS PENERIMAAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003 <sup>1)</sup>
[1]	[2]	[3]	[4]
1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	2.874.415	10.726.735	15.850.250
2. Pendapatan asli daerah	3.987.533	4.995.022	4.216.150
2.1. Pajak Daerah	861.844	1.168.871	1.212.200
2.2. Retribusi Daerah	2.498.721	2.751.421	2.293.950
2.3. Bagian Laba Usaha Daerah	0	0	10.000
2.4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah	626.968	1.074.730	700.000
3. Dana Perimbangan	131.324.501	149.774.720	187.707.240
3.1. Bagi hasil pajak	7.984.470	10.329.494	9.916.520
3.2. Bagi hasil bukan pajak	6.971.995	7.315.226	5.025.000
3.3. Dana Alokasi Umum	103.929.336	132.130.000	161.165.720
3.4. Dana Alokasi Khusus	12.438.700	0	11.600.000
4. Penerimaan Lainnya	3.560.597	5.421.269	0
5. Pinjaman Pemerintah Daerah	1.838.351	0	2.229.580
<b>JUMLAH</b>	<b>143.585.397</b>	<b>170.917.746</b>	<b>210.003.220</b>

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

TABEL 17.

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN  
KARO MENURUT JENIS PENERIMAAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan [1]	2001 [2]	2002 [3]	2003 [4]
1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	5.214.330	9.691.243	15.445.620
2. Pendapatan asli daerah	4.688.606	7.498.708	9.310.352
2.1. Pajak Daerah	2.374.391	3.213.251	3.819.493
2.2. Retribusi Daerah	1.924.963	3.750.616	4.042.659
2.3. Bagian Laba Usaha Daerah	0	0	0
2.4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah	389.252	534.841	1.448.200
3. Dana Perimbangan	101.909.601	153.959.665	190.618.572
3.1. Bagi hasil pajak	5.396.406	6.978.173	8.987.370
3.2. Bagi hasil bukan pajak	4.018.779	4.234.044	1.521.296
3.3. Dana Alokasi Umum	92.494.416	142.470.000	173.460.000
3.4. Dana Alokasi Khusus	0	277.448	6.649.906
4. Penerimaan Lainnya	23.744.708	17.908.107	28.138.614
5. Pinjaman Pemerintah Daerah	10.000.000	0	0
JUMLAH	145.557.245	189.057.723	243.513.158

TABEL 18.

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI  
SERDANG MENURUT JENIS PENERIMAAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	17.556.804	7.285.324	4.611.221
2. Pendapatan asli daerah	26.996.853	32.315.515	51.910.663
2.1. Pajak Daerah	16.655.423	21.837.557	36.853.534
2.2. Retribusi Daerah	7.221.675	8.710.025	10.771.535
2.3. Bagian Laba Usaha Daerah	0	0	0
2.4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah	3.119.755	1.767.933	4.285.594
3. Dana Perimbangan	378.212.072	468.195.551	597.980.909
3.1. Bagi hasil pajak	41.864.244	54.929.064	82.523.782
3.2. Bagi hasil bukan pajak	1.885.403	1.217.453	3.057.770
3.3. Dana Alokasi Umum	334.267.292	411.812.625	501.049.820
3.4. Dana Alokasi Khusus	195.133	236.409	11.349.537
4. Penerimaan Lainnya	14.366.406	2.294.469	1.043.000
5. Pinjaman Pemerintah Daerah	0	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>437.132.135</b>	<b>510.090.859</b>	<b>655.545.793</b>

TABEL 19.

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN  
LANGKAT MENURUT JENIS PENERIMAAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	9.866.130	26.725.377	35.909.336
2. Pendapatan asli daerah	9.361.131	12.398.486	14.788.933
2.1. Pajak Daerah	5.533.048	8.064.575	9.154.799
2.2. Retribusi Daerah	2.809.568	3.428.838	4.037.917
2.3. Bagian Laba Usaha Daerah	0	0	0
2.4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah	1.018.515	905.073	1.596.217
3. Dana Perimbangan	251.084.018	296.882.305	355.521.641
3.1. Bagi hasil pajak	40.625.256	39.092.226	53.501.950
3.2. Bagi hasil bukan pajak	12.453	15.000.079	2.920.505
3.3. Dana Alokasi Umum	210.446.309	238.840.000	290.714.345
3.4. Dana Alokasi Khusus	0	3.950.000	8.384.841
4. Penerimaan Lainnya	4.159.587	0	0
5. Pinjaman Pemerintah Daerah	16.104.869	1.801.932	0
JUMLAH	290.575.735	337.808.100	406.219.910



TABEL 20.

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KOTA  
SIBOLGA MENURUT JENIS PENERIMAAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	1.485.886	7.708.291	20.964.885
2. Pendapatan asli daerah	2.463.313	4.257.492	7.135.535
2.1. Pajak Daerah	594.564	973.501	1.348.706
2.2. Retribusi Daerah	1.636.826	2.086.976	2.636.163
2.3. Bagian Laba Usaha Daerah	80.000	100.000	132.000
2.4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah	151.923	1.097.015	3.018.666
3. Dana Perimbangan	45.829.638	95.685.919	111.368.076
3.1. Bagi hasil pajak	5.189.633	6.586.879	10.973.875
3.2. Bagi hasil bukan pajak	3.460.885	1.149.040	1.480.679
3.3. Dana Alokasi Umum	37.179.120	87.950.000	94.313.522
3.4. Dana Alokasi Khusus	0	0	4.600.000
4. Penerimaan Lainnya	3.634.146	2.315.757	318.000
5. Pinjaman Pemerintah Daerah	0	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>53.412.983</b>	<b>109.967.459</b>	<b>139.786.496</b>

TABEL 21.

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH  
KOTA TANJUNG BALAI MENURUT JENIS PENERIMAAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan [1]	2001 [2]	2002 [3]	2003 [4]
1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	5.804.843	42.333.270	36.721.932
2. Pendapatan asli daerah	4.140.494	8.305.288	9.933.585
2.1. Pajak Daerah	1.532.494	2.684.906	3.122.662
2.2. Retribusi Daerah	2.093.021	2.489.473	2.005.751
2.3. Bagian Laba Usaha Daerah	15.000	60.000	30.000
2.4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah	499.979	3.070.909	4.775.172
3. Dana Perimbangan	50.369.790	108.234.636	119.250.614
3.1. Bagi hasil pajak	6.156.815	6.681.432	9.694.104
3.2. Bagi hasil bukan pajak	709.163	1.378.888	1.480.714
3.3. Dana Alokasi Umum	43.503.812	100.174.316	103.860.000
3.4. Dana Alokasi Khusus	0	0	4.215.796
4. Penerimaan Lainnya	39.370.837	8.208.018	6.032.463
5. Pinjaman Pemerintah Daerah	0	0	0
JUMLAH	99.685.964	167.081.212	171.938.594

TABEL 22.

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH  
KOTA PEMATANG SIANTAR MENURUT JENIS PENERIMAAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan [1]	2001 [2]	2002 [3]	2003 [4]
1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	1.015.113	11.611.010	11.577.054
2. Pendapatan asli daerah	9.468.203	10.086.969	11.563.236
2.1. Pajak Daerah	5.205.934	4.250.930	4.619.156
2.2. Retribusi Daerah	3.986.052	4.226.598	4.434.324
2.3. Bagian Laba Usaha Daerah	0	0	185.279
2.4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah	276.217	1.609.441	2.324.477
3. Dana Perimbangan	104.680.532	137.710.642	160.533.182
3.1. Bagi hasil pajak	6.728.078	7.733.763	10.386.659
3.2. Bagi hasil bukan pajak	49.856	251.996	737.284
3.3. Dana Alokasi Umum	97.902.598	129.724.883	145.029.356
3.4. Dana Alokasi Khusus	0	0	4.379.883
4. Penerimaan Lainnya	2.961.481	7.243.772	9.165.998
5. Pinjaman Pemerintah Daerah	0	1.845.759	0
JUMLAH	118.125.329	168.498.152	192.839.470

TABEL 23.

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH  
KOTA TEBING TINGGI MENURUT JENIS PENERIMAAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan [1]	2001 [2]	2002 [3]	2003 [4]
1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	2.817.542	17.086.061	29.238.296
2. Pendapatan asli daerah	4.118.449	5.715.580	6.263.263
2.1. Pajak Daerah	1.867.617	1.984.960	2.513.034
2.2. Retribusi Daerah	1.884.451	1.731.768	2.256.831
2.3. Bagian Laba Usaha Daerah	0	0	0
2.4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah	366.381	1.998.852	1.493.398
3. Dana Perimbangan	83.230.046	120.521.992	124.567.354
3.1. Bagi hasil pajak	7.958.671	7.056.515	4.670.783
3.2. Bagi hasil bukan pajak	271.803	3.101.403	509.563
3.3. Dana Alokasi Umum	74.999.572	110.315.938	114.961.000
3.4. Dana Alokasi Khusus	0	48.136	4.426.008
4. Penerimaan Lainnya	1.505.276	1.685.977	1.877.357
5. Pinjaman Pemerintah Daerah	0	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>91.671.313</b>	<b>145.009.610</b>	<b>161.946.270</b>

TABEL 24.

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KOTA  
MEDAN MENURUT JENIS PENERIMAAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan [1]	2001 [2]	2002 [3]	2003 [4]
1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	3.087.214	32.316.022	25.770.899
2. Pendapatan asli daerah	88.262.844	146.930.659	233.786.688
2.1. Pajak Daerah	58.157.716	80.418.342	132.234.572
2.2. Retribusi Daerah	28.488.821	60.854.031	92.067.053
2.3. Bagian Laba Usaha Daerah	613.497	1.477.572	1.063.103
2.4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah	1.002.810	4.180.714	8.421.960
3. Dana Perimbangan	361.982.318	449.884.651	716.709.275
3.1. Bagi hasil pajak	76.829.737	95.805.886	281.932.691
3.2. Bagi hasil bukan pajak	2.035.958	2.381.562	1.372.704
3.3. Dana Alokasi Umum	283.116.623	351.378.074	433.041.453
3.4. Dana Alokasi Khusus	0	319.129	362.427
4. Penerimaan Lainnya	57.488.726	122.088.178	82.000.000
5. Pinjaman Pemerintah Daerah	35.000.000	0	110.000.000
<b>JUMLAH</b>	<b>545.821.102</b>	<b>751.219.510</b>	<b>1.168.266.862</b>

TABEL 25.

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KOTA  
BINJAI MENURUT JENIS PENERIMAAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan [1]	2001 [2]	2002 [3]	2003 <sup>1)</sup> [4]
1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	1.520.897	12.845.633	15.893.740
2. Pendapatan asli daerah	3.909.632	5.705.555	8.758.720
2.1. Pajak Daerah	1.213.882	2.366.455	4.873.240
2.2. Retribusi Daerah	2.508.145	3.176.100	3.670.480
2.3. Bagian Laba Usaha Daerah	0	0	0
2.4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah	187.605	163.000	215.000
3. Dana Perimbangan	121.521.490	141.193.999	147.415.100
3.1. Bagi hasil pajak	8.608.249	9.076.499	8.846.600
3.2. Bagi hasil bukan pajak	948.524	3.287.500	2.718.500
3.3. Dana Alokasi Umum	109.085.448	128.830.000	132.050.000
3.4. Dana Alokasi Khusus	2.879.269	0	3.800.000
4. Penerimaan Lainnya	3.836.616	18.882.675	28.073.140
5. Pinjaman Pemerintah Daerah	0	1.786.616	2.096.760
<b>JUMLAH</b>	<b>130.788.635</b>	<b>180.414.478</b>	<b>202.237.460</b>

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

TABEL 26.

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH  
KOTA PADANG SIDEMPUAN MENURUT JENIS PENERIMAAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001 <sup>2)</sup>	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	0	0	1.575.108
2. Pendapatan asli daerah	0	2.177.434	3.483.637
2.1. Pajak Daerah	0	1.080.834	1.737.801
2.2. Retribusi Daerah	0	935.312	1.210.652
2.3. Bagian Laba Usaha Daerah	0	0	30.000
2.4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah	0	161.288	505.184
3. Dana Perimbangan	0	79.509.679	125.359.095
3.1. Bagi hasil pajak	0	7.436.193	12.551.283
3.2. Bagi hasil bukan pajak	0	1.318.349	1.250.852
3.3. Dana Alokasi Umum	0	70.755.137	107.484.671
3.4. Dana Alokasi Khusus	0	0	4.072.289
4. Penerimaan Lainnya	0	500.000	8.570.000
5. Pinjaman Pemerintah Daerah	0	820.598	0
JUMLAH	0	83.007.711	138.987.840

2) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan

TABEL 27.

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA  
2001 - 2003  
( 000 rupiah )

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	3.123.639.752	3.605.890.322	4.401.958.864
1 Nias	229.126.819	250.410.702	286.393.514
2 Mandailing Natal	180.142.170	187.896.967	233.188.809
3 Tapanuli Selatan	288.886.692	306.561.379	342.734.512
4 Tapanuli Tengah	137.241.854	170.144.643	208.412.797
5 Toba Samosir	173.463.991	202.503.457	235.449.882
6 Tapanuli Utara	232.345.952	275.694.752	317.127.893
7 Labuhan Batu	237.672.424	302.754.529	412.440.197
8 Asahan	285.578.948	329.108.043	387.840.595
9 Simalungun	342.330.392	372.941.422	463.088.584
10 Dairi <sup>1)</sup>	143.585.397	170.917.746	210.003.220
11 Karo	145.557.245	189.057.723	243.513.158
12 Deli Serdang	437.132.135	510.090.859	655.545.793
13 Langkat	290.575.735	337.808.100	406.219.910
Kota	1.039.505.326	1.605.198.132	2.176.002.992
71 Sibolga	53.412.983	109.967.459	139.786.496
72 Tanjungbalai	99.685.964	167.081.212	171.938.594
73 Pematang Siantar	118.125.329	168.498.152	192.839.470
74 Tebing Tinggi	91.671.313	145.009.610	161.946.270
75 Medan	545.821.102	751.219.510	1.168.266.862
76 Binjai <sup>1)</sup>	130.788.635	180.414.478	202.237.460
77 Padang Sidempuan	2)	83.007.711	138.987.840
JUMLAH	4.163.145.078	5.211.088.454	6.577.961.856

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

2) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan



TABEL 28. REALISASI PENERIMAAN KAB/KOTA DARI BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA 2001 - 2003 (000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	95.349.630	204.392.572	262.242.012
1 Nias	8.045.958	12.203.957	23.049.087
2 Mandailing Natal	5.380.539	13.889.746	17.856.652
3 Tapanuli Selatan	5.462.071	16.691.093	12.154.237
4 Tapanuli Tengah	2.954.651	25.021.190	31.278.758
5 Toba Samosir	7.328.560	14.909.691	19.232.971
6 Tapanuli Utara	5.853.660	22.565.655	34.968.148
7 Labuhan Batu	8.999.047	17.760.466	28.845.763
8 Asahan	10.090.243	18.348.684	13.780.281
9 Simalungun	5.723.223	8.573.411	9.259.688
10 Dairi <sup>1)</sup>	2.874.415	10.726.735	15.850.250
11 Karo	5.214.330	9.691.243	15.445.620
12 Deli Serdang	17.556.804	7.285.324	4.611.221
13 Langkat	9.866.130	26.725.377	35.909.336
Kota	15.731.495	123.900.287	141.741.914
71 Sibolga	1.485.886	7.708.291	20.964.885
72 Tanjungbalai	5.804.843	42.333.270	36.721.932
73 Pematang Siantar	1.015.113	11.611.010	11.577.054
74 Tebing Tinggi	2.817.542	17.086.061	29.238.296
75 Medan	3.087.214	32.316.022	25.770.899
76 Binjai <sup>1)</sup>	1.520.897	12.845.633	15.893.740
77 Padang Sidempuan	2)	0	1.575.108
<b>JUMLAH</b>	<b>111.081.126</b>	<b>328.292.859</b>	<b>403.983.926</b>

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

2) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan

TABEL 29.

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA

2001 - 2003

(000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	56.134.556	73.004.042	94.117.368
1 Nias	2.135.792	1.914.567	2.296.052
2 Mandailing Natal	533.966	2.474.143	2.207.000
3 Tapanuli Selatan	1.891.674	2.104.188	2.665.528
4 Tapanuli Tengah	899.901	1.317.255	1.718.101
5 Toba Samosir	810.785	1.303.043	1.394.134
6 Tapanuli Utara	885.327	1.037.077	1.644.917
7 Labuhan Batu	3.086.323	5.089.143	6.672.872
8 Asahan	12.475.626	14.300.061	14.285.738
9 Simalungun	7.990.456	9.180.311	10.193.000
10 Dairi <sup>1)</sup>	861.844	1.168.871	1.212.200
11 Karo	2.374.391	3.213.251	3.819.493
12 Deli Serdang	16.655.423	21.837.557	36.853.534
13 Langkat	5.533.048	8.064.575	9.154.799
Kota	68.572.207	93.759.928	150.449.171
71 Sibolga	594.564	973.501	1.348.706
72 Tanjungbalai	1.532.494	2.684.906	3.122.662
73 Pematang Siantar	5.205.934	4.250.930	4.619.156
74 Tebing Tinggi	1.867.617	1.984.960	2.513.034
75 Medan	58.157.716	80.418.342	132.234.572
76 Binjai <sup>1)</sup>	1.213.882	2.366.455	4.873.240
77 Padang Sidempuan	2)	1.080.834	1.737.801
JUMLAH	124.706.763	166.763.970	244.566.539

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

2) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan

TABEL 30. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DARI RETRIBUSI DAERAH  
SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/ KOTA  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	29.210.519	41.703.003	50.114.637
1 Nias	822.358	1.590.979	3.281.692
2 Mandailing Natal	759.524	1.027.542	1.558.600
3 Tapanuli Selatan	1.673.254	3.364.314	3.401.894
4 Tapanuli Tengah	700.216	1.291.511	1.192.593
5 Toba Samosir	665.155	946.689	1.299.789
6 Tapanuli Utara	2.112.897	4.217.461	1.715.031
7 Labuhan Batu	3.119.625	4.226.670	7.544.073
8 Asahan	2.328.118	3.097.291	3.842.245
9 Simalungun	2.574.445	3.299.646	5.132.659
10 Dairi <sup>1)</sup>	2.498.721	2.751.421	2.293.950
11 Karo	1.924.963	3.750.616	4.042.659
12 Deli Serdang	7.221.675	8.710.025	10.771.535
13 Langkat	2.809.568	3.428.838	4.037.917
Kota	40.597.316	75.500.258	108.281.254
71 Sibolga	1.636.826	2.086.976	2.636.163
72 Tanjungbalai	2.093.021	2.489.473	2.005.751
73 Pematang Siantar	3.986.052	4.226.598	4.434.324
74 Tebing Tinggi	1.884.451	1.731.768	2.256.831
75 Medan	28.488.821	60.854.031	92.067.053
76 Binjai <sup>1)</sup>	2.508.145	3.176.100	3.670.480
77 Padang Sidempuan	2)	935.312	1.210.652
<b>JUMLAH</b>	<b>69.807.835</b>	<b>117.203.261</b>	<b>158.395.891</b>

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

2) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan

TABEL 31. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KAB/KOTA DARI LABA BADAN USAHA MILIK DAERAH  
SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2002
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	13.500	269.985	216.808
1 Nias	0	183.660	0
2 Mandailing Natal	0	0	0
3 Tapanuli Selatan	0	50.000	120.000
4 Tapanuli Tengah	0	0	0
5 Toba Samosir	0	0	0
6 Tapanuli Utara	12.000	11.325	14.808
7 Labuhan Batu	1.500	25.000	72.000
8 Asahan	0	0	0
9 Simalungun	0	0	0
10 Dairi <sup>1)</sup>	0	0	10.000
11 Karo	0	0	0
12 Deli Serdang	0	0	0
13 Langkat	0	0	0
Kota	708.497	1.637.572	1.440.382
71 Sibolga	80.000	100.000	132.000
72 Tanjungbalai	15.000	60.000	30.000
73 Pematang Siantar	0	0	185.279
74 Tebing Tinggi	0	0	0
75 Medan	613.497	1.477.572	1.063.103
76 Binjai <sup>1)</sup>	0	0	0
77 Padang Sidempuan	2)	0	30.000
<b>JUMLAH</b>	<b>721.997</b>	<b>1.907.557</b>	<b>1.657.190</b>

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

2) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan

TABEL 32. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KAB/KOTA DARI PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH LAINNYA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN / KOTA 2001 - 2003 ( 000 rupiah )

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	25.167.833	36.150.925	54.837.339
1 Nias	2.511.082	2.462.954	5.352.200
2 Mandailing Natal	650.086	3.031.861	1.550.000
3 Tapanuli Selatan	740.538	1.375.434	1.691.923
4 Tapanuli Tengah	1.420.653	2.363.662	2.523.052
5 Toba Samosir	9.186.017	11.505.415	9.879.547
6 Tapanuli Utara	1.332.334	3.615.976	7.802.948
7 Labuhan Batu	2.175.874	4.015.844	11.341.611
8 Asahan	765.451	1.617.890	4.498.605
9 Simalungun	1.231.308	1.879.312	2.167.442
10 Dairi <sup>1)</sup>	626.968	1.074.730	700.000
11 Karo	389.252	534.841	1.448.200
12 Deli Serdang	3.119.755	1.767.933	4.285.594
13 Langkat	1.018.515	905.073	1.596.217
Kota	2.484.915	12.281.219	20.753.857
71 Sibolga	151.923	1.097.015	3.018.666
72 Tanjungbalai	499.979	3.070.909	4.775.172
73 Pematang Siantar	276.217	1.609.441	2.324.477
74 Tebing Tinggi	366.381	1.998.852	1.493.398
75 Medan	1.002.810	4.180.714	8.421.960
76 Binjai <sup>1)</sup>	187.605	163.000	215.000
77 Padang Sidempuan	2)	161.288	505.184
<b>JUMLAH</b>	<b>27.652.748</b>	<b>48.432.144</b>	<b>75.591.196</b>

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

2) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan

TABEL 33.

REALISASI PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	257.842.279	314.297.850	406.551.476
1 Nias	14.416.514	18.450.244	16.734.757
2 Mandailing Natal	8.007.004	13.842.729	9.176.789
3 Tapanuli Selatan	21.976.754	26.110.190	35.987.966
4 Tapanuli Tengah	8.729.282	13.022.877	12.533.382
5 Toba Samosir	8.179.669	15.167.323	12.002.689
6 Tapanuli Utara	7.795.555	8.223.541	14.475.128
7 Labuhan Batu	26.369.717	28.512.148	63.505.183
8 Asahan	33.309.054	43.470.560	47.949.471
9 Simalungun	33.188.353	36.169.281	39.256.489
10 Dairi <sup>1)</sup>	7.984.470	10.329.494	9.916.520
11 Karo	5.396.406	6.978.173	8.987.370
12 Deli Serdang	41.864.244	54.929.064	82.523.782
13 Langkat	40.625.256	39.092.226	53.501.950
Kota	111.471.183	140.377.167	339.055.995
71 Sibolga	5.189.633	6.586.879	10.973.875
72 Tanjungbalai	6.156.815	6.681.432	9.694.104
73 Pematang Siantar	6.728.078	7.733.763	10.386.659
74 Tebing Tinggi	7.958.671	7.056.515	4.670.783
75 Medan	76.829.737	95.805.886	281.932.691
76 Binjai <sup>1)</sup>	8.608.249	9.076.499	8.846.600
77 Padang Sidempuan	2)	7.436.193	12.551.283
<b>JUMLAH</b>	<b>369.313.462</b>	<b>454.675.017</b>	<b>745.607.471</b>

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

2) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan

TABEL 34.

REALISASI PENERIMAAN BAGI HASIL BUKAN PAJAK PEMERINTAH KAB/KOTA  
SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA

2001 - 2003

(000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	38.006.763	45.713.557	34.437.805
1 Nias	811.666	1.303.313	2.011.315
2 Mandailing Natal	2.132.044	2.043.860	2.862.000
3 Tapanuli Selatan	2.152.809	1.567.901	3.225.871
4 Tapanuli Tengah	693.306	826.360	1.554.721
5 Toba Samosir	948.607	1.148.441	5.026.308
6 Tapanuli Utara	3.077.438	3.413.848	1.375.536
7 Labuhan Batu	9.816.174	1.542.946	1.514.042
8 Asahan	740.194	966.607	1.204.674
9 Simalungun	4.745.895	5.133.479	3.138.767
10 Dairi <sup>1)</sup>	6.971.995	7.315.226	5.025.000
11 Karo	4.018.779	4.234.044	1.521.296
12 Deli Serdang	1.885.403	1.217.453	3.057.770
13 Langkat	12.453	15.000.079	2.920.505
Kota	7.476.189	12.868.738	9.550.296
71 Sibolga	3.460.885	1.149.040	1.480.679
72 Tanjungbalai	709.163	1.378.888	1.480.714
73 Pematang Siantar	49.856	251.996	737.284
74 Tebing Tinggi	271.803	3.101.403	509.563
75 Medan	2.035.958	2.381.562	1.372.704
76 Binjai <sup>1)</sup>	948.524	3.287.500	2.718.500
77 Padang Sidempuan	2)	1.318.349	1.250.852
JUMLAH	45.482.951	58.582.295	43.988.101

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

2) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan

TABEL 35.

REALISASI PENERIMAAN DANA ALOKASI UMUM PEMERINTAH KAB/KOTA  
SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA

2001 - 2003

(000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	2.363.491.464	2.738.253.610	3.164.238.748
1 Nias	195.384.703	209.440.975	230.874.303
2 Mandailing Natal	132.044.304	140.420.000	165.890.000
3 Tapanuli Selatan	225.998.218	253.984.186	271.621.476
4 Tapanuli Tengah	105.499.740	123.377.181	129.090.000
5 Toba Samosir	119.473.788	141.909.998	156.550.000
6 Tapanuli Utara	178.415.390	211.663.645	227.813.893
7 Labuhan Batu	173.647.945	218.440.000	263.300.000
8 Asahan	215.625.644	237.505.000	292.739.191
9 Simalungun	276.264.379	276.260.000	299.970.000
10 Dairi <sup>1)</sup>	103.929.336	132.130.000	161.165.720
11 Karo	92.494.416	142.470.000	173.460.000
12 Deli Serdang	334.267.292	411.812.625	501.049.820
13 Langkat	210.446.309	238.840.000	290.714.345
Kota	645.787.173	979.128.348	1.130.740.002
71 Sibolga	37.179.120	87.950.000	94.313.522
72 Tanjungbalai	43.503.812	100.174.316	103.860.000
73 Pematang Siantar	97.902.598	129.724.883	145.029.356
74 Tebing Tinggi	74.999.572	110.315.938	114.961.000
75 Medan	283.116.623	351.378.074	433.041.453
76 Binjai <sup>1)</sup>	109.085.448	128.830.000	132.050.000
77 Padang Sidempuan	2)	70.755.137	107.484.671
JUMLAH	3.009.278.637	3.717.381.958	4.294.978.750

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

2) masih bergabung dgn Tapanuli Selatan



TABEL 36.

REALISASI PENERIMAAN DANA ALOKASI KHUSUS PEMERINTAH KAB/KOTA  
SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	55.582.744	38.525.600	137.490.612
1 Nias	0	0	1.574.108
2 Mandailing Natal	14.036.956	6.903.780	9.668.723
3 Tapanuli Selatan	2.853.165	1.314.073	9.439.885
4 Tapanuli Tengah	709.335	248.752	6.781.472
5 Toba Samosir	569.578	212.602	9.044.044
6 Tapanuli Utara	18.350.757	822.154	11.394.739
7 Labuhan Batu	0	880.713	8.883.352
8 Asahan	0	187.222	6.772.548
9 Simalungun	6.429.120	23.492.447	35.947.457
10 Dairi <sup>1)</sup>	12.438.700	0	11.600.000
11 Karo	0	277.448	6.649.906
12 Deli Serdang	195.133	236.409	11.349.537
13 Langkat	0	3.950.000	8.384.841
Kota	2.879.269	367.265	25.856.403
71 Sibolga	0	0	4.600.000
72 Tanjungbalai	0	0	4.215.796
73 Pematang Siantar	0	0	4.379.883
74 Tebing Tinggi	0	48.136	4.426.008
75 Medan	0	319.129	362.427
76 Binjai <sup>1)</sup>	2.879.269	0	3.800.000
77 Padang Sidempuan	2)	0	4.072.289
<b>JUMLAH</b>	<b>58.462.013</b>	<b>38.892.865</b>	<b>163.347.015</b>

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

2) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan

TABEL 37.

REALISASI PENERIMAAN LAINNYA PEMERINTAH KAB/KOTA  
SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/ KOTA  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	174.897.245	3.136.790.617	177.208.986
1 Nias	4.998.746	229.194.532	1.220.000
2 Mandailing Natal	16.597.746	163.210.369	18.886.270
3 Tapanuli Selatan	26.138.209	282.976.350	2.425.732
4 Tapanuli Tengah	15.634.770	137.475.170	7.000.000
5 Toba Samosir	26.301.832	158.438.364	21.020.400
6 Tapanuli Utara	14.510.594	224.123.188	15.922.745
7 Labuhan Batu	10.456.219	249.375.807	20.761.301
8 Asahan	10.244.618	282.129.389	2.767.842
9 Simalungun	4.183.213	341.055.207	58.023.082
10 Dairi <sup>1)</sup>	3.560.597	149.774.720	0
11 Karo	23.744.708	153.959.665	28.138.614
12 Deli Serdang	14.366.406	468.195.551	1.043.000
13 Langkat	4.159.587	296.882.305	0
Kota	108.797.082	1.132.741.518	136.036.958
71 Sibolga	3.634.146	95.685.919	318.000
72 Tanjungbalai	39.370.837	108.234.636	6.032.463
73 Pematang Siantar	2.961.481	137.710.642	9.165.998
74 Tebing Tinggi	1.505.276	120.521.992	1.877.357
75 Medan	57.488.726	449.884.651	82.000.000
76 Binjai <sup>1)</sup>	3.836.616	141.193.999	28.073.140
77 Padang Sidempuan	2)	79.509.679	8.570.000
JUMLAH	283.694.327	4.269.532.135	313.245.944

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

2) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan

TABEL 38.

REALISASI PENERIMAAN PINJAMAN PEMERINTAH KAB/KOTA  
SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/ KOTA  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	27.943.220	8.564.210	20.503.073
1 Nias	0	2.860.053	0
2 Mandailing Natal	0	3.902.225	3.532.775
3 Tapanuli Selatan	0	0	0
4 Tapanuli Tengah	0	0	14.740.718
5 Toba Samosir	0	0	0
6 Tapanuli Utara	0	0	0
7 Labuhan Batu	0	0	0
8 Asahan	0	0	0
9 Simalungun	0	0	0
10 Dairi <sup>1)</sup>	1.838.351	0	2.229.580
11 Karo	10.000.000	0	0
12 Deli Serdang	0	0	0
13 Langkat	16.104.869	1.801.932	0
Kota	35.000.000	4.452.973	112.096.760
71 Sibolga	0	0	0
72 Tanjungbalai	0	0	0
73 Pematang Siantar	0	1.845.759	0
74 Tebing Tinggi	0	0	0
75 Medan	35.000.000	0	110.000.000
76 Binjai <sup>1)</sup>	0	1.786.616	2.096.760
77 Padang Sidempuan	2)	820.598	0
<b>JUMLAH</b>	<b>62.943.220</b>	<b>13.017.183</b>	<b>132.599.833</b>

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

2) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan

TABEL 39.

REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH KAB/KOTA  
SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT JENIS PENGELUARAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Belanja pegawai	2.198.667.779	2.374.761.014	2.894.725.732
2 Belanja Barang	254.119.198	362.560.770	489.982.241
3 Biaya Pemeliharaan	236.257.732	129.388.614	173.846.470
4 Belanja Perjalanan Dinas	28.410.029	42.625.529	61.711.711
5 Belanja Lain-lain	151.665.529	244.000.007	338.681.454
6 Angsuran Pinjaman/ Hutang dan Bunga	7.123.091	44.317.309	52.377.750
7 Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	37.055.748	35.656.928	71.336.865
8 Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	53.649.002	96.328.627	173.583.852
9 Pengeluaran tidak terduga	27.999.555	15.051.350	11.811.825
<b>JUMLAH</b>	<b>2.994.947.663</b>	<b>3.344.690.148</b>	<b>4.268.057.900</b>

TABEL 40.

REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH  
KABUPATEN NIAS MENURUT JENIS PENGELUARAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Belanja pegawai	94.238.447	117.447.294	132.554.309
2 Belanja Barang	10.099.415	14.176.209	13.001.299
3 Biaya Pemeliharaan	1.468.722	2.902.425	2.660.698
4 Belanja Perjalanan Dinas	1.138.530	3.177.654	4.709.872
5 Belanja Lain-lain	3.940.463	8.747.107	13.212.787
6 Angsuran Pinjaman/ Hutang dan Bunga	994.500	0	0
7 Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	1.620.990	1.908.060	3.528.672
8 Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	2.659.580	6.766.064	1.062.688
9 Pengeluaran tidak tersangka	1.203.971	855.081	901.261
<b>JUMLAH</b>	<b>117.364.618</b>	<b>155.979.894</b>	<b>171.631.586</b>

TABEL 41.

REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH  
KABUPATEN MANDAILING NATAL MENURUT JENIS PENGELUARAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Belanja pegawai	62.926.450	72.008.915	87.066.225
2 Belanja Barang	9.231.886	12.091.066	16.037.351
3 Biaya Pemeliharaan	1.131.156	1.964.498	3.032.147
4 Belanja Perjalanan Dinas	1.270.298	1.643.240	2.621.980
5 Belanja Lain-lain	2.198.737	3.143.638	5.204.866
6 Angsuran Pinjaman/ Hutang dan Bunga	0	0	769.689
7 Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	771.630	771.630	2.237.900
8 Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	359.000	413.550	1.466.187
9 Pengeluaran tidak tersangka	250.000	150.000	400.000
<b>JUMLAH</b>	<b>78.139.157</b>	<b>92.186.537</b>	<b>118.836.345</b>

TABEL 42.

REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN MENURUT JENIS PENGELUARAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Belanja pegawai	167.352.524	134.986.168	159.763.827
2 Belanja Barang	16.791.828	24.479.799	29.230.257
3 Biaya Pemeliharaan	3.311.496	7.421.928	7.564.543
4 Belanja Perjalanan Dinas	1.811.199	4.670.630	5.923.676
5 Belanja Lain-lain	11.250.186	30.815.375	28.793.659
6 Angsuran Pinjaman/ Hutang dan Bunga	0	677.453	0
7 Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	8.425.617	4.623.750	5.001.175
8 Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	2.532.116	6.873.697	7.510.388
9 Pengeluaran tidak tersangka	299.800	447.416	277.427
<b>JUMLAH</b>	<b>211.774.766</b>	<b>214.996.216</b>	<b>244.064.952</b>

TABEL 43.

REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH MENURUT JENIS PENGELUARAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Belanja pegawai	57.122.951	60.647.559	71.629.351
2 Belanja Barang	5.594.527	7.387.132	8.574.303
3 Biaya Pemeliharaan	1.026.904	2.190.072	2.740.560
4 Belanja Perjalanan Dinas	624.137	1.520.612	1.696.661
5 Belanja Lain-lain	6.363.506	10.731.979	12.910.041
6 Angsuran Pinjaman/ Hutang dan Bunga	0	0	0
7 Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	361.400	501.993	1.170.110
8 Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	1.150.355	1.882.000	2.558.725
9 Pengeluaran tidak tersangka	633.545	1.522.942	931.705
<b>JUMLAH</b>	<b>72.877.325</b>	<b>86.384.289</b>	<b>102.211.456</b>



TABEL 44.

REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR MENURUT JENIS PENGELUARAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Belanja pegawai	79.571.994	82.851.745	98.798.696
2 Belanja Barang	6.846.941	7.959.654	14.448.294
3 Biaya Pemeliharaan	908.440	1.154.063	1.644.380
4 Belanja Perjalanan Dinas	1.184.435	915.775	1.454.841
5 Belanja Lain-lain	4.745.813	10.638.194	11.566.675
6 Angsuran Pinjaman/ Hutang dan Bunga	0	0	0
7 Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	1.164.643	1.513.244	988.424
8 Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	750.932	1.527.456	1.948.665
9 Pengeluaran tidak tersangka	428.876	562.324	734.428
<b>JUMLAH</b>	<b>95.602.074</b>	<b>107.122.455</b>	<b>131.584.403</b>

TABEL 45.

REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH  
KABUPATEN TAPANULI UTARA MENURUT JENIS PENGELUARAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Belanja pegawai	115.725.981	82.851.745	149.109.062
2 Belanja Barang	10.207.575	7.959.654	20.465.824
3 Biaya Pemeliharaan	1.409.557	1.154.063	2.828.422
4 Belanja Perjalanan Dinas	1.094.573	915.775	2.209.502
5 Belanja Lain-lain	2.533.521	10.638.194	4.901.173
6 Angsuran Pinjaman/ Hutang dan Bunga	455.000	0	356.083
7 Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	1.863.730	1.513.244	9.124.223
8 Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	1.272.000	1.527.456	5.314.240
9 Pengeluaran tidak tersangka	454.134	562.324	344.726
<b>JUMLAH</b>	<b>135.016.071</b>	<b>107.122.455</b>	<b>194.653.255</b>

TABEL 46.

REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH  
KABUPATEN LABUHAN BATU MENURUT JENIS PENGELUARAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Belanja pegawai	135.347.634	145.999.048	186.669.901
2 Belanja Barang	13.519.172	23.363.869	26.625.601
3 Biaya Pemeliharaan	2.956.982	5.534.560	7.915.237
4 Belanja Perjalanan Dinas	1.699.679	1.362.634	5.459.343
5 Belanja Lain-lain	6.939.118	16.134.330	12.787.807
6 Angsuran Pinjaman/ Hutang dan Bunga	0	0	803.548
7 Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	4.794.047	4.979.000	5.794.020
8 Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	4.733.977	7.700.381	12.572.967
9 Pengeluaran tidak tersangka	146.260	534.641	266.575
JUMLAH	170.136.869	205.608.463	258.894.999

TABEL 47.

REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH  
KABUPATEN ASAHAN MENURUT JENIS PENGELUARAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Belanja pegawai	157.588.284	166.202.258	197.333.695
2 Belanja Barang	20.113.083	24.294.624	28.685.245
3 Biaya Pemeliharaan	3.023.909	4.593.221	4.724.682
4 Belanja Perjalanan Dinas	1.591.100	2.302.849	2.572.319
5 Belanja Lain-lain	13.524.662	14.595.661	15.568.106
6 Angsuran Pinjaman/ Hutang dan Bunga	1.266.500	3.351.538	1.758.331
7 Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	2.614.704	3.072.300	4.065.037
8 Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	4.494.190	6.234.863	9.075.415
9 Pengeluaran tidak tersangka	394.413	239.881	615.500
<b>JUMLAH</b>	<b>204.610.845</b>	<b>224.887.195</b>	<b>264.398.330</b>

TABEL 48.

REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH  
KABUPATEN SIMALUNGUN MENURUT JENIS PENGELUARAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Belanja pegawai	202.219.217	212.904.575	250.811.530
2 Belanja Barang	14.375.229	16.973.578	23.021.396
3 Biaya Pemeliharaan	2.885.893	2.350.293	2.905.182
4 Belanja Perjalanan Dinas	2.949.652	3.735.587	4.029.220
5 Belanja Lain-lain	12.815.915	10.378.240	10.167.135
6 Angsuran Pinjaman/ Hutang dan Bunga	639.510	0	0
7 Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	1.521.540	1.805.940	2.751.840
8 Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	1.026.722	1.432.476	1.044.760
9 Pengeluaran tidak tersangka	226.411	1.842.493	236.819
<b>JUMLAH</b>	<b>238.660.089</b>	<b>251.423.182</b>	<b>294.967.882</b>

TABEL 49.

REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH  
KABUPATEN DAIRI MENURUT JENIS PENGELUARAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003 <sup>1)</sup>
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Belanja pegawai	71.904.251	81.481.581	102.530.040
2 Belanja Barang	7.410.515	8.843.264	10.275.500
3 Biaya Pemeliharaan	1.744.660	2.767.784	3.629.820
4 Belanja Perjalanan Dinas	1.373.128	2.356.600	2.646.600
5 Belanja Lain-lain	4.959.522	13.037.987	19.450.590
6 Angsuran Pinjaman/ Hutang dan Bunga	0	0	0
7 Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	2.003	0	0
8 Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	1.803.335	2.327.969	6.743.700
9 Pengeluaran tidak tersangka	13.336.033	1.792.955	1.512.510
<b>JUMLAH</b>	<b>102.533.447</b>	<b>112.608.140</b>	<b>146.788.760</b>

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

TABEL 50.

REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH  
KABUPATEN KARO MENURUT JENIS PENGELUARAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Belanja pegawai	103.467.056	106.304.303	121.792.357
2 Belanja Barang	3.991.998	9.962.880	15.562.024
3 Biaya Pemeliharaan	904.474	1.693.130	3.421.715
4 Belanja Perjalanan Dinas	525.602	951.927	2.587.889
5 Belanja Lain-lain	4.808.983	9.166.598	19.749.007
6 Angsuran Pinjaman/ Hutang dan Bunga	0	10.226.924	0
7 Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	0	347.200	650.000
8 Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	453.934	609.780	2.703.361
9 Pengeluaran tidak tersangka	116.702	197.959	47.928
<b>JUMLAH</b>	<b>114.268.749</b>	<b>139.460.701</b>	<b>166.514.281</b>

TABEL 51.

REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH  
KABUPATEN DELI SERDANG MENURUT JENIS PENGELUARAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Belanja pegawai	292.123.505	325.066.723	381.149.010
2 Belanja Barang	27.857.552	29.630.621	56.219.250
3 Biaya Pemeliharaan	3.842.217	7.333.940	9.783.060
4 Belanja Perjalanan Dinas	2.001.872	3.522.978	3.724.988
5 Belanja Lain-lain	15.344.786	17.455.452	25.113.751
6 Angsuran Pinjaman/ Hutang dan Bunga	565.910	529.006	2.419.746
7 Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	0	0	3.140.375
8 Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	3.193.061	6.553.080	15.027.409
9 Pengeluaran tidak tersangka	2.655.602	1.999.797	416.400
<b>JUMLAH</b>	<b>347.584.505</b>	<b>392.091.597</b>	<b>496.993.989</b>



TABEL 52.

REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH  
KABUPATEN LANGKAT MENURUT JENIS PENGELUARAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Belanja pegawai	1 64.235.061	172.557.634	198.965.272
2 Belanja Barang	16.651.567	25.229.081	35.729.492
3 Biaya Pemeliharaan	3.198.910	3.911.020	6.084.184
4 Belanja Perjalanan Dinas	1.196.220	1.391.102	2.153.404
5 Belanja Lain-lain	7.930.765	9.799.203	11.793.083
6 Angsuran Pinjaman/ Hutang dan Bunga	0	17.413.780	0
7 Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	2.673.900	0	3.801.500
8 Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	4.842.785	8.875.649	13.964.708
9 Pengeluaran tidak tersangka	4.474.359	64.698	0
<b>JUMLAH</b>	<b>205.203.567</b>	<b>239.242.167</b>	<b>272.491.643</b>

TABEL 53.

REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH  
KOTA SIBOLGA MENURUT JENIS PENGELUARAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Belanja pegawai	24.867.660	31.189.356	38.478.828
2 Belanja Barang	3.393.004	11.250.077	14.572.003
3 Biaya Pemeliharaan	5.416.703	6.406.984	2.043.278
4 Belanja Perjalanan Dinas	358.346	757.923	1.132.327
5 Belanja Lain-lain	9.485.044	9.936.309	12.639.435
6 Angsuran Pinjaman/ Hutang dan Bunga	49.546	46.539	45.086
7 Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	39.000	110.000	120.000
8 Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	1.315.943	1.891.496	5.183.233
9 Pengeluaran tidak tersangka	196.627	480.737	627.233
<b>JUMLAH</b>	<b>45.121.873</b>	<b>62.069.421</b>	<b>74.841.423</b>

TABEL 54.

REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH  
KOTA TANJUNG BALAI MENURUT JENIS PENGELUARAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Belanja pegawai	28.594.589	34.354.855	40.777.354
2 Belanja Barang	3.681.299	6.209.525	7.791.373
3 Biaya Pemeliharaan	1.067.060	2.356.738	2.555.040
4 Belanja Perjalanan Dinas	775.893	1.656.439	2.214.569
5 Belanja Lain-lain	4.024.308	7.747.057	10.537.020
6 Angsuran Pinjaman/ Hutang dan Bunga	177.754	151.955	228.692
7 Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	172.588	368.309	245.309
8 Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	912.170	6.019.789	7.585.804
9 Pengeluaran tidak tersangka	842.539	639.073	911.050
<b>JUMLAH</b>	<b>40.248.200</b>	<b>59.503.740</b>	<b>72.846.211</b>

TABEL 55.

REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH  
KOTA PEMATANG SIANTAR MENURUT JENIS PENGELUARAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Belanja pegawai	75.438.941	82.145.035	98.817.367
2 Belanja Barang	7.393.268	12.234.144	10.280.028
3 Biaya Pemeliharaan	1.783.797	2.698.697	3.217.073
4 Belanja Perjalanan Dinas	617.846	938.743	1.300.861
5 Belanja Lain-lain	5.369.396	7.397.573	8.774.222
6 Angsuran Pinjaman/ Hutang dan Bunga	1.738.314	906.935	1.485.671
7 Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	66.076	71.000	71.000
8 Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	1.658.718	5.959.649	8.064.834
9 Pengeluaran tidak tersangka	249.463	153.671	615.000
<b>JUMLAH</b>	<b>94.315.819</b>	<b>112.505.447</b>	<b>132.626.056</b>

TABEL 56.

REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH  
KOTA TEBING TINGGI MENURUT JENIS PENGELUARAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Belanja pegawai	39.243.036	42.892.229	54.907.052
2 Belanja Barang	7.769.135	15.369.038	17.781.916
3 Biaya Pemeliharaan	1.087.688	10.673.255	11.993.219
4 Belanja Perjalanan Dinas	286.977	449.387	937.460
5 Belanja Lain-lain	3.362.932	4.748.598	15.423.204
6 Angsuran Pinjaman/ Hutang dan Bunga	1.045.141	446.521	426.429
7 Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	0	0	990.000
8 Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	696.157	1.484.083	3.863.000
9 Pengeluaran tidak tersangka	15.533	8.704	100.000
<b>JUMLAH</b>	<b>53.506.599</b>	<b>76.071.815</b>	<b>106.422.280</b>

TABEL 57.

REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH  
KOTA MEDAN MENURUT JENIS PENGELUARAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Belanja pegawai	268.065.482	292.417.021	371.512.345
2 Belanja Barang	59.957.842	84.782.898	106.935.141
3 Biaya Pemeliharaan	20.765.018	56.375.984	86.768.848
4 Belanja Perjalanan Dinas	6.422.950	7.595.130	9.880.235
5 Belanja Lain-lain	30.206.815	52.525.124	87.067.713
6 Angsuran Pinjaman/ Hutang dan Bunga	0	10.000.000	44.084.475
7 Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	10.616.892	13.156.045	27.049.920
8 Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	16.363.896	22.511.557	57.071.724
9 Pengeluaran tidak tersangka	1.870.019	3.331.840	2.712.833
<b>JUMLAH</b>	<b>414.268.914</b>	<b>542.695.599</b>	<b>793.083.234</b>

TABEL 58.

REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH  
KOTA BINJAI MENURUT JENIS PENGELUARAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003 <sup>1)</sup>
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Belanja pegawai	58.634.716	77.822.773	84.725.230
2 Belanja Barang	9.233.362	16.208.085	22.920.530
3 Biaya Pemeliharaan	2.174.547	4.433.398	5.776.050
4 Belanja Perjalanan Dinas	1.487.592	2.125.790	2.673.970
5 Belanja Lain-lain	1.861.057	2.652.860	3.894.700
6 Angsuran Pinjaman/ Hutang dan Bunga	190.916	190.917	0
7 Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	348.991	466.041	607.360
8 Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	3.430.131	4.716.288	2.404.500
9 Pengeluaran tidak tersangka	205.268	189.983	160.430
<b>JUMLAH</b>	<b>77.566.580</b>	<b>108.806.135</b>	<b>123.162.770</b>

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

TABEL 59.

REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH  
KOTA PADANG SIDEMPUAN MENURUT JENIS PENGELUARAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001 <sup>2)</sup>	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Belanja pegawai	0	49.437.173	67.334.281
2 Belanja Barang	0	8.511.492	11.825.414
3 Biaya Pemeliharaan	0	1.279.565	2.558.332
4 Belanja Perjalanan Dinas	0	925.639	1.781.994
5 Belanja Lain-lain	0	5.442.869	9.126.480
6 Angsuran Pinjaman/ Hutang dan Bunga	0	0	0
7 Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	0	0	0
8 Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	0	2.138.256	8.417.544
9 Pengeluaran tidak tersangka	0	71.270	0
<b>JUMLAH</b>	0	67.806.264	101.044.045

2) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan



TABEL 60.

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA  
2001 - 2003  
( 000 rupiah )

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	3.123.639.752	3.605.890.322	4.401.958.864
1 Nias	229.126.819	250.410.702	286.393.514
2 Mandailing Natal	180.142.170	187.896.967	233.188.809
3 Tapanuli Selatan	288.886.692	306.561.379	342.734.512
4 Tapanuli Tengah	137.241.854	170.144.643	208.412.797
5 Toba Samosir	173.463.991	202.503.457	235.449.882
6 Tapanuli Utara	232.345.952	275.694.752	317.127.893
7 Labuhan Batu	237.672.424	302.754.529	412.440.197
8 Asahan	285.578.948	329.108.043	387.840.595
9 Simalungun	342.330.392	372.941.422	463.088.584
10 Dairi <sup>1)</sup>	143.585.397	170.917.746	210.003.220
11 Karo	145.557.245	189.057.723	243.513.158
12 Deli Serdang	437.132.135	510.090.859	655.545.793
13 Langkat	290.575.735	337.808.100	406.219.910
Kota	1.039.505.326	1.605.198.132	2.176.002.992
71 Sibolga	53.412.983	109.967.459	139.786.496
72 Tanjungbalai	99.685.964	167.081.212	171.938.594
73 Pematang Siantar	118.125.329	168.498.152	192.839.470
74 Tebing Tinggi	91.671.313	145.009.610	161.946.270
75 Medan	545.821.102	751.219.510	1.168.266.862
76 Binjai <sup>1)</sup>	130.788.635	180.414.478	202.237.460
77 Padang Sidempuan	2)	83.007.711	138.987.840
JUMLAH	4.163.145.078	5.211.088.454	6.577.961.856

4) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

5) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan

TABEL 61. REALISASI PENERIMAAN KAB/KOTA DARI BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA 2001 - 2003 (000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	95.349.630	204.392.572	262.242.012
1 Nias	8.045.958	12.203.957	23.049.087
2 Mandailing Natal	5.380.539	13.889.746	17.856.652
3 Tapanuli Selatan	5.462.071	16.691.093	12.154.237
4 Tapanuli Tengah	2.954.651	25.021.190	31.278.758
5 Toba Samosir	7.328.560	14.909.691	19.232.971
6 Tapanuli Utara	5.853.660	22.565.655	34.968.148
7 Labuhan Batu	8.999.047	17.760.466	28.845.763
8 Asahan	10.090.243	18.348.684	13.780.281
9 Simalungun	5.723.223	8.573.411	9.259.688
10 Dairi <sup>1)</sup>	2.874.415	10.726.735	15.850.250
11 Karo	5.214.330	9.691.243	15.445.620
12 Deli Serdang	17.556.804	7.285.324	4.611.221
13 Langkat	9.866.130	26.725.377	35.909.336
Kota	15.731.495	123.900.287	141.741.914
71 Sibolga	1.485.886	7.708.291	20.964.885
72 Tanjungbalai	5.804.843	42.333.270	36.721.932
73 Pematang Siantar	1.015.113	11.611.010	11.577.054
74 Tebing Tinggi	2.817.542	17.086.061	29.238.296
75 Medan	3.087.214	32.316.022	25.770.899
76 Binjai <sup>1)</sup>	1.520.897	12.845.633	15.893.740
77 Padang Sidempuan	2)	0	1.575.108
<b>JUMLAH</b>	<b>111.081.126</b>	<b>328.292.859</b>	<b>403.983.926</b>

4) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

5) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan

TABEL 62.

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	56.134.556	73.004.042	94.117.368
1 Nias	2.135.792	1.914.567	2.296.052
2 Mandailing Natal	533.966	2.474.143	2.207.000
3 Tapanuli Selatan	1.891.674	2.104.188	2.665.528
4 Tapanuli Tengah	899.901	1.317.255	1.718.101
5 Toba Samosir	810.785	1.303.043	1.394.134
6 Tapanuli Utara	885.327	1.037.077	1.644.917
7 Labuhan Batu	3.086.323	5.089.143	6.672.872
8 Asahan	12.475.626	14.300.061	14.285.738
9 Simalungun	7.990.456	9.180.311	10.193.000
10 Dairi <sup>1)</sup>	861.844	1.168.871	1.212.200
11 Karo	2.374.391	3.213.251	3.819.493
12 Deli Serdang	16.655.423	21.837.557	36.853.534
13 Langkat	5.533.048	8.064.575	9.154.799
Kota	68.572.207	93.759.928	150.449.171
71 Sibolga	594.564	973.501	1.348.706
72 Tanjungbalai	1.532.494	2.684.906	3.122.662
73 Pematang Siantar	5.205.934	4.250.930	4.619.156
74 Tebing Tinggi	1.867.617	1.984.960	2.513.034
75 Medan	58.157.716	80.418.342	132.234.572
76 Binjai <sup>1)</sup>	1.213.882	2.366.455	4.873.240
77 Padang Sidempuan	2)	1.080.834	1.737.801
JUMLAH	124.706.763	166.763.970	244.566.539

4) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

5) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan

TABEL 63. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DARI RETRIBUSI DAERAH  
SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/ KOTA  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	29.210.519	41.703.003	50.114.637
1 Nias	822.358	1.590.979	3.281.692
2 Mandailing Natal	759.524	1.027.542	1.558.600
3 Tapanuli Selatan	1.673.254	3.364.314	3.401.894
4 Tapanuli Tengah	700.216	1.291.511	1.192.593
5 Toba Samosir	665.155	946.689	1.299.789
6 Tapanuli Utara	2.112.897	4.217.461	1.715.031
7 Labuhan Batu	3.119.625	4.226.670	7.544.073
8 Asahan	2.328.118	3.097.291	3.842.245
9 Simalungun	2.574.445	3.299.646	5.132.659
10 Dairi <sup>1)</sup>	2.498.721	2.751.421	2.293.950
11 Karo	1.924.963	3.750.616	4.042.659
12 Deli Serdang	7.221.675	8.710.025	10.771.535
13 Langkat	2.809.568	3.428.838	4.037.917
Kota	40.597.316	75.500.258	108.281.254
71 Sibolga	1.636.826	2.086.976	2.636.163
72 Tanjungbalai	2.093.021	2.489.473	2.005.751
73 Pematang Siantar	3.986.052	4.226.598	4.434.324
74 Tebing Tinggi	1.884.451	1.731.768	2.256.831
75 Medan	28.488.821	60.854.031	92.067.053
76 Binjai <sup>1)</sup>	2.508.145	3.176.100	3.670.480
77 Padang Sidempuan	2)	935.312	1.210.652
<b>JUMLAH</b>	<b>69.807.835</b>	<b>117.203.261</b>	<b>158.395.891</b>

4) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

5) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan

TABEL 64. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KAB/KOTA DARI LABA BADAN USAHA MILIK DAERAH  
SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	13.500	269.985	216.808
1 Nias	0	183.660	0
2 Mandailing Natal	0	0	0
3 Tapanuli Selatan	0	50.000	120.000
4 Tapanuli Tengah	0	0	0
5 Toba Samosir	0	0	0
6 Tapanuli Utara	12.000	11.325	14.808
7 Labuhan Batu	1.500	25.000	72.000
8 Asahan	0	0	0
9 Simalungun	0	0	0
10 Dairi <sup>1)</sup>	0	0	10.000
11 Karo	0	0	0
12 Deli Serdang	0	0	0
13 Langkat	0	0	0
Kota	708.497	1.637.572	1.440.382
71 Sibolga	80.000	100.000	132.000
72 Tanjungbalai	15.000	60.000	30.000
73 Pematang Siantar	0	0	185.279
74 Tebing Tinggi	0	0	0
75 Medan	613.497	1.477.572	1.063.103
76 Binjai <sup>1)</sup>	0	0	0
77 Padang Sidempuan	2)	0	30.000
<b>JUMLAH</b>	<b>721.997</b>	<b>1.907.557</b>	<b>1.657.190</b>

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

2) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan

TABEL 65. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KAB/KOTA DARI PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH LAINNYA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN / KOTA 2001 - 2003 ( 000 rupiah )

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	25.167.833	36.150.925	54.837.339
1 Nias	2.511.082	2.462.954	5.352.200
2 Mandailing Natal	650.086	3.031.861	1.550.000
3 Tapanuli Selatan	740.538	1.375.434	1.691.923
4 Tapanuli Tengah	1.420.653	2.363.662	2.523.052
5 Toba Samosir	9.186.017	11.505.415	9.879.547
6 Tapanuli Utara	1.332.334	3.615.976	7.802.948
7 Labuhan Batu	2.175.874	4.015.844	11.341.611
8 Asahan	765.451	1.617.890	4.498.605
9 Simalungun	1.231.308	1.879.312	2.167.442
10 Dairi <sup>1)</sup>	626.968	1.074.730	700.000
11 Karo	389.252	534.841	1.448.200
12 Deli Serdang	3.119.755	1.767.933	4.285.594
13 Langkat	1.018.515	905.073	1.596.217
Kota	2.484.915	12.281.219	20.753.857
71 Sibolga	151.923	1.097.015	3.018.666
72 Tanjungbalai	499.979	3.070.909	4.775.172
73 Pematang Siantar	276.217	1.609.441	2.324.477
74 Tebing Tinggi	366.381	1.998.852	1.493.398
75 Medan	1.002.810	4.180.714	8.421.960
76 Binjai <sup>1)</sup>	187.605	163.000	215.000
77 Padang Sidempuan	2)	161.288	505.184
<b>JUMLAH</b>	<b>27.652.748</b>	<b>48.432.144</b>	<b>75.591.196</b>

4) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

5) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan

TABEL 66.

REALISASI PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	257.842.279	314.297.850	406.551.476
1 Nias	14.416.514	18.450.244	16.734.757
2 Mandailing Natal	8.007.004	13.842.729	9.176.789
3 Tapanuli Selatan	21.976.754	26.110.190	35.987.966
4 Tapanuli Tengah	8.729.282	13.022.877	12.533.382
5 Toba Samosir	8.179.669	15.167.323	12.002.689
6 Tapanuli Utara	7.795.555	8.223.541	14.475.128
7 Labuhan Batu	26.369.717	28.512.148	63.505.183
8 Asahan	33.309.054	43.470.560	47.949.471
9 Simalungun	33.188.353	36.169.281	39.256.489
10 Dairi <sup>1)</sup>	7.984.470	10.329.494	9.916.520
11 Karo	5.396.406	6.978.173	8.987.370
12 Deli Serdang	41.864.244	54.929.064	82.523.782
13 Langkat	40.625.256	39.092.226	53.501.950
Kota	111.471.183	140.377.167	339.055.995
71 Sibolga	5.189.633	6.586.879	10.973.875
72 Tanjungbalai	6.156.815	6.681.432	9.694.104
73 Pematang Siantar	6.728.078	7.733.763	10.386.659
74 Tebing Tinggi	7.958.671	7.056.515	4.670.783
75 Medan	76.829.737	95.805.886	281.932.691
76 Binjai <sup>1)</sup>	8.608.249	9.076.499	8.846.600
77 Padang Sidempuan	2)	7.436.193	12.551.283
JUMLAH	369.313.462	454.675.017	745.607.471

4) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

5) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan

TABEL 67.

REALISASI PENERIMAAN BAGI HASIL BUKAN PAJAK PEMERINTAH KAB/KOTA  
SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	38.006.763	45.713.557	34.437.805
1 Nias	811.666	1.303.313	2.011.315
2 Mandailing Natal	2.132.044	2.043.860	2.862.000
3 Tapanuli Selatan	2.152.809	1.567.901	3.225.871
4 Tapanuli Tengah	693.306	826.360	1.554.721
5 Toba Samosir	948.607	1.148.441	5.026.308
6 Tapanuli Utara	3.077.438	3.413.848	1.375.536
7 Labuhan Batu	9.816.174	1.542.946	1.514.042
8 Asahan	740.194	966.607	1.204.674
9 Simalungun	4.745.895	5.133.479	3.138.767
10 Dairi <sup>1)</sup>	6.971.995	7.315.226	5.025.000
11 Karo	4.018.779	4.234.044	1.521.296
12 Deli Serdang	1.885.403	1.217.453	3.057.770
13 Langkat	12.453	15.000.079	2.920.505
Kota	7.476.189	12.868.738	9.550.296
71 Sibolga	3.460.885	1.149.040	1.480.679
72 Tanjungbalai	709.163	1.378.888	1.480.714
73 Pematang Siantar	49.856	251.996	737.284
74 Tebing Tinggi	271.803	3.101.403	509.563
75 Medan	2.035.958	2.381.562	1.372.704
76 Binjai <sup>1)</sup>	948.524	3.287.500	2.718.500
77 Padang Sidempuan	2)	1.318.349	1.250.852
<b>JUMLAH</b>	<b>45.482.951</b>	<b>58.582.295</b>	<b>43.988.101</b>

4) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

5) masih bergabung dgn Tapanuli Selatan



TABEL 68

REALISASI PENERIMAAN DANA ALOKASI UMUM PEMERINTAH KAB/KOTA  
SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	2.363.491.464	2.738.253.610	3.164.238.748
1 Nias	195.384.703	209.440.975	230.874.303
2 Mandailing Natal	132.044.304	140.420.000	165.890.000
3 Tapanuli Selatan	225.998.218	253.984.186	271.621.476
4 Tapanuli Tengah	105.499.740	123.377.181	129.090.000
5 Toba Samosir	119.473.788	141.909.998	156.550.000
6 Tapanuli Utara	178.415.390	211.663.645	227.813.893
7 Labuhan Batu	173.647.945	218.440.000	263.300.000
8 Asahan	215.625.644	237.505.000	292.739.191
9 Simalungun	276.264.379	276.260.000	299.970.000
10 Dairi <sup>1)</sup>	103.929.336	132.130.000	161.165.720
11 Karo	92.494.416	142.470.000	173.460.000
12 Deli Serdang	334.267.292	411.812.625	501.049.820
13 Langkat	210.446.309	238.840.000	290.714.345
Kota	645.787.173	979.128.348	1.130.740.002
71 Sibolga	37.179.120	87.950.000	94.313.522
72 Tanjungbalai	43.503.812	100.174.316	103.860.000
73 Pematang Siantar	97.902.598	129.724.883	145.029.356
74 Tebing Tinggi	74.999.572	110.315.938	114.961.000
75 Medan	283.116.623	351.378.074	433.041.453
76 Binjai <sup>1)</sup>	109.085.448	128.830.000	132.050.000
77 Padang Sidempuan	2)	70.755.137	107.484.671
JUMLAH	3.009.278.637	3.717.381.958	4.294.978.750

4) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

5) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan

TABEL 69.

REALISASI PENERIMAAN DANA ALOKASI KHUSUS PEMERINTAH KAB/KOTA  
SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	55.582.744	38.525.600	137.490.612
1 Nias	0	0	1.574.108
2 Mandailing Natal	14.036.956	6.903.780	9.668.723
3 Tapanuli Selatan	2.853.165	1.314.073	9.439.885
4 Tapanuli Tengah	709.335	248.752	6.781.472
5 Toba Samosir	569.578	212.602	9.044.044
6 Tapanuli Utara	18.350.757	822.154	11.394.739
7 Labuhan Batu	0	880.713	8.883.352
8 Asahan	0	187.222	6.772.548
9 Simalungun	6.429.120	23.492.447	35.947.457
10 Dairi <sup>1)</sup>	12.438.700	0	11.600.000
11 Karo	0	277.448	6.649.906
12 Deli Serdang	195.133	236.409	11.349.537
13 Langkat	0	3.950.000	8.384.841
Kota	2.879.269	367.265	25.856.403
71 Sibolga	0	0	4.600.000
72 Tanjungbalai	0	0	4.215.796
73 Pematang Siantar	0	0	4.379.883
74 Tebing Tinggi	0	48.136	4.426.008
75 Medan	0	319.129	362.427
76 Binjai <sup>1)</sup>	2.879.269	0	3.800.000
77 Padang Sidempuan	2)	0	4.072.289
<b>JUMLAH</b>	<b>58.462.013</b>	<b>38.892.865</b>	<b>163.347.015</b>

4) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

5) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan

TABEL 70.

REALISASI PENERIMAAN LAINNYA PEMERINTAH KAB/KOTA  
SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/ KOTA  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	174.897.245	3.136.790.617	177.208.986
1 Nias	4.998.746	229.194.532	1.220.000
2 Mandailing Natal	16.597.746	163.210.369	18.886.270
3 Tapanuli Selatan	26.138.209	282.976.350	2.425.732
4 Tapanuli Tengah	15.634.770	137.475.170	7.000.000
5 Toba Samosir	26.301.832	158.438.364	21.020.400
6 Tapanuli Utara	14.510.594	224.123.188	15.922.745
7 Labuhan Batu	10.456.219	249.375.807	20.761.301
8 Asahan	10.244.618	282.129.389	2.767.842
9 Simalungun	4.183.213	341.055.207	58.023.082
10 Dairi <sup>1)</sup>	3.560.597	149.774.720	0
11 Karo	23.744.708	153.959.665	28.138.614
12 Deli Serdang	14.366.406	468.195.551	1.043.000
13 Langkat	4.159.587	296.882.305	0
Kota	108.797.082	1.132.741.518	136.036.958
71 Sibolga	3.634.146	95.685.919	318.000
72 Tanjungbalai	39.370.837	108.234.636	6.032.463
73 Pematang Siantar	2.961.481	137.710.642	9.165.998
74 Tebing Tinggi	1.505.276	120.521.992	1.877.357
75 Medan	57.488.726	449.884.651	82.000.000
76 Binjai <sup>1)</sup>	3.836.616	141.193.999	28.073.140
77 Padang Sidempuan	2)	79.509.679	8.570.000
<b>JUMLAH</b>	<b>283.694.327</b>	<b>4.269.532.135</b>	<b>313.245.944</b>

2) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

3) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan

TABEL 71.

REALISASI PENERIMAAN PINJAMAN PEMERINTAH KAB/KOTA  
SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/ KOTA  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	27.943.220	8.564.210	20.503.073
1 Nias	0	2.860.053	0
2 Mandailing Natal	0	3.902.225	3.532.775
3 Tapanuli Selatan	0	0	0
4 Tapanuli Tengah	0	0	14.740.718
5 Toba Samosir	0	0	0
6 Tapanuli Utara	0	0	0
7 Labuhan Batu	0	0	0
8 Asahan	0	0	0
9 Simalungun	0	0	0
10 Dairi <sup>1)</sup>	1.838.351	0	2.229.580
11 Karo	10.000.000	0	0
12 Deli Serdang	0	0	0
13 Langkat	16.104.869	1.801.932	0
Kota	35.000.000	4.452.973	112.096.760
71 Sibolga	0	0	0
72 Tanjungbalai	0	0	0
73 Pematang Siantar	0	1.845.759	0
74 Tebing Tinggi	0	0	0
75 Medan	35.000.000	0	110.000.000
76 Binjai <sup>1)</sup>	0	1.786.616	2.096.760
77 Padang Sidempuan	2)	820.598	0
<b>JUMLAH</b>	<b>62.943.220</b>	<b>13.017.183</b>	<b>132.599.833</b>

TABEL 72.

REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH KAB/KOTA  
SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT JENIS PENGELUARAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Belanja pegawai	2.198.667.779	2.374.761.014	2.894.725.732
2 Belanja Barang	254.119.198	362.560.770	489.982.241
3 Biaya Pemeliharaan	236.257.732	129.388.614	173.846.470
4 Belanja Perjalanan Dinas	28.410.029	42.625.529	61.711.711
5 Belanja Lain-lain	151.665.529	244.000.007	338.681.454
6 Angsuran Pinjaman/ Hutang dan Bunga	7.123.091	44.317.309	52.377.750
7 Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	37.055.748	35.656.928	71.336.865
8 Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	53.649.002	96.328.627	173.583.852
9 Pengeluaran tidak terduga	27.999.555	15.051.350	11.811.825
JUMLAH	2.994.947.663	3.344.690.148	4.268.057.900

2) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

3) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan

TABEL 73.

REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH  
KABUPATEN NIAS MENURUT JENIS PENGELUARAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Belanja pegawai	94.238.447	117.447.294	132.554.309
2 Belanja Barang	10.099.415	14.176.209	13.001.299
3 Biaya Pemeliharaan	1.468.722	2.902.425	2.660.698
4 Belanja Perjalanan Dinas	1.138.530	3.177.654	4.709.872
5 Belanja Lain-lain	3.940.463	8.747.107	13.212.787
6 Angsuran Pinjaman/ Hutang dan Bunga	994.500	0	0
7 Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	1.620.990	1.908.060	3.528.672
8 Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	2.659.580	6.766.064	1.062.688
9 Pengeluaran tidak tersangka	1.203.971	855.081	901.261
<b>JUMLAH</b>	117.364.618	155.979.894	171.631.586

TABEL 74.

REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH  
KABUPATEN MANDAILING NATAL MENURUT JENIS PENGELUARAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Belanja pegawai	62.926.450	72.008.915	87.066.225
2 Belanja Barang	9.231.886	12.091.066	16.037.351
3 Biaya Pemeliharaan	1.131.156	1.964.498	3.032.147
4 Belanja Perjalanan Dinas	1.270.298	1.643.240	2.621.980
5 Belanja Lain-lain	2.198.737	3.143.638	5.204.866
6 Angsuran Pinjaman/ Hutang dan Bunga	0	0	769.689
7 Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	771.630	771.630	2.237.900
8 Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	359.000	413.550	1.466.187
9 Pengeluaran tidak tersangka	250.000	150.000	400.000
<b>JUMLAH</b>	<b>78.139.157</b>	<b>92.186.537</b>	<b>118.836.345</b>

TABEL 75.

REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN MENURUT JENIS PENGELUARAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Belanja pegawai	167.352.524	134.986.168	159.763.827
2 Belanja Barang	16.791.828	24.479.799	29.230.257
3 Biaya Pemeliharaan	3.311.496	7.421.928	7.564.543
4 Belanja Perjalanan Dinas	1.811.199	4.670.630	5.923.676
5 Belanja Lain-lain	11.250.186	30.815.375	28.793.659
6 Angsuran Pinjaman/ Hutang dan Bunga	0	677.453	0
7 Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	8.425.617	4.623.750	5.001.175
8 Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	2.532.116	6.873.697	7.510.388
9 Pengeluaran tidak tersangka	299.800	447.416	277.427
<b>JUMLAH</b>	<b>211.774.766</b>	<b>214.996.216</b>	<b>244.064.952</b>



TABEL 76.

REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH MENURUT JENIS PENGELUARAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Belanja pegawai	57.122.951	60.647.559	71.629.351
2 Belanja Barang	5.594.527	7.387.132	8.574.303
3 Biaya Pemeliharaan	1.026.904	2.190.072	2.740.560
4 Belanja Perjalanan Dinas	624.137	1.520.612	1.696.661
5 Belanja Lain-lain	6.363.506	10.731.979	12.910.041
6 Angsuran Pinjaman/ Hutang dan Bunga	0	0	0
7 Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	361.400	501.993	1.170.110
8 Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	1.150.355	1.882.000	2.558.725
9 Pengeluaran tidak terangka	633.545	1.522.942	931.705
<b>JUMLAH</b>	<b>72.877.325</b>	<b>86.384.289</b>	<b>102.211.456</b>

TABEL 77.

REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR MENURUT JENIS PENGELUARAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Belanja pegawai	79.571.994	82.851.745	98.798.696
2 Belanja Barang	6.846.941	7.959.654	14.448.294
3 Biaya Pemeliharaan	908.440	1.154.063	1.644.380
4 Belanja Perjalanan Dinas	1.184.435	915.775	1.454.841
5 Belanja Lain-lain	4.745.813	10.638.194	11.566.675
6 Angsuran Pinjaman/ Hutang dan Bunga	0	0	0
7 Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	1.164.643	1.513.244	988.424
8 Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	750.932	1.527.456	1.948.665
9 Pengeluaran tidak tersangka	428.876	562.324	734.428
<b>JUMLAH</b>	<b>95.602.074</b>	<b>107.122.455</b>	<b>131.584.403</b>

TABEL 78.

REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH  
KABUPATEN TAPANULI UTARA MENURUT JENIS PENGELUARAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Belanja pegawai	115.725.981	82.851.745	149.109.062
2 Belanja Barang	10.207.575	7.959.654	20.465.824
3 Biaya Pemeliharaan	1.409.557	1.154.063	2.828.422
4 Belanja Perjalanan Dinas	1.094.573	915.775	2.209.502
5 Belanja Lain-lain	2.533.521	10.638.194	4.901.173
6 Angsuran Pinjaman/ Hutang dan Bunga	455.000	0	356.083
7 Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	1.863.730	1.513.244	9.124.223
8 Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	1.272.000	1.527.456	5.314.240
9 Pengeluaran tidak tersangka	454.134	562.324	344.726
<b>JUMLAH</b>	<b>135.016.071</b>	<b>107.122.455</b>	<b>194.653.255</b>

TABEL 79.

REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH  
KABUPATEN LABUHAN BATU MENURUT JENIS PENGELUARAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Belanja pegawai	135.347.634	145.999.048	186.669.901
2 Belanja Barang	13.519.172	23.363.869	26.625.601
3 Biaya Pemeliharaan	2.956.982	5.534.560	7.915.237
4 Belanja Perjalanan Dinas	1.699.679	1.362.634	5.459.343
5 Belanja Lain-lain	6.939.118	16.134.330	12.787.807
6 Angsuran Pinjaman/ Hutang dan Bunga	0	0	803.548
7 Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	4.794.047	4.979.000	5.794.020
8 Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	4.733.977	7.700.381	12.572.967
9 Pengeluaran tidak tersangka	146.260	534.641	266.575
JUMLAH	170.136.869	205.608.463	258.894.999

TABEL 80.

REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH  
KABUPATEN ASAHAN MENURUT JENIS PENGELUARAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Belanja pegawai	157.588.284	166.202.258	197.333.695
2 Belanja Barang	20.113.083	24.294.624	28.685.245
3 Biaya Pemeliharaan	3.023.909	4.593.221	4.724.682
4 Belanja Perjalanan Dinas	1.591.100	2.302.849	2.572.319
5 Belanja Lain-lain	13.524.662	14.595.661	15.568.106
6 Angsuran Pinjaman/ Hutang dan Bunga	1.266.500	3.351.538	1.758.331
7 Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	2.614.704	3.072.300	4.065.037
8 Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	4.494.190	6.234.863	9.075.415
9 Pengeluaran tidak tersangka	394.413	239.881	615.500
<b>JUMLAH</b>	<b>204.610.845</b>	<b>224.887.195</b>	<b>264.398.330</b>

TABEL 81.

REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH  
KABUPATEN SIMALUNGUN MENURUT JENIS PENGELUARAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Belanja pegawai	202.219.217	212.904.575	250.811.530
2 Belanja Barang	14.375.229	16.973.578	23.021.396
3 Biaya Pemeliharaan	2.885.893	2.350.293	2.905.182
4 Belanja Perjalanan Dinas	2.949.652	3.735.587	4.029.220
5 Belanja Lain-lain	12.815.915	10.378.240	10.167.135
6 Angsuran Pinjaman/ Hutang dan Bunga	639.510	0	0
7 Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	1.521.540	1.805.940	2.751.840
8 Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	1.026.722	1.432.476	1.044.760
9 Pengeluaran tidak tersangka	226.411	1.842.493	236.819
<b>JUMLAH</b>	<b>238.660.089</b>	<b>251.423.182</b>	<b>294.967.882</b>

TABEL 82.

REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH  
KABUPATEN DAIRI MENURUT JENIS PENGELUARAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003 <sup>1)</sup>
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Belanja pegawai	71.904.251	81.481.581	102.530.040
2 Belanja Barang	7.410.515	8.843.264	10.275.500
3 Biaya Pemeliharaan	1.744.660	2.767.784	3.629.820
4 Belanja Perjalanan Dinas	1.373.128	2.356.600	2.646.600
5 Belanja Lain-lain	4.959.522	13.037.987	19.450.590
6 Angsuran Pinjaman/ Hutang dan Bunga	0	0	0
7 Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	2.003	0	0
8 Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	1.803.335	2.327.969	6.743.700
9 Pengeluaran tidak tersangka	13.336.033	1.792.955	1.512.510
<b>JUMLAH</b>	<b>102.533.447</b>	<b>112.608.140</b>	<b>146.788.760</b>

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

TABEL 82.1

REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH  
KABUPATEN KARO MENURUT JENIS PENGELUARAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Belanja pegawai	103.467.056	106.304.303	121.792.357
2 Belanja Barang	3.991.998	9.962.880	15.562.024
3 Biaya Pemeliharaan	904.474	1.693.130	3.421.715
4 Belanja Perjalanan Dinas	525.602	951.927	2.587.889
5 Belanja Lain-lain	4.808.983	9.166.598	19.749.007
6 Angsuran Pinjaman/ Hutang dan Bunga	0	10.226.924	0
7 Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	0	347.200	650.000
8 Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	453.934	609.780	2.703.361
9 Pengeluaran tidak tersangka	116.702	197.959	47.928
<b>JUMLAH</b>	<b>114.268.749</b>	<b>139.460.701</b>	<b>166.514.281</b>



TABEL 83.

REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH  
KABUPATEN DELI SERDANG MENURUT JENIS PENGELUARAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Belanja pegawai	292.123.505	325.066.723	381.149.010
2 Belanja Barang	27.857.552	29.630.621	56.219.250
3 Biaya Pemeliharaan	3.842.217	7.333.940	9.783.060
4 Belanja Perjalanan Dinas	2.001.872	3.522.978	3.724.988
5 Belanja Lain-lain	15.344.786	17.455.452	25.113.751
6 Angsuran Pinjaman/ Hutang dan Bunga	565.910	529.006	2.419.746
7 Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	0	0	3.140.375
8 Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	3.193.061	6.553.080	15.027.409
9 Pengeluaran tidak tersangka	2.655.602	1.999.797	416.400
<b>JUMLAH</b>	<b>347.584.505</b>	<b>392.091.597</b>	<b>496.993.989</b>

TABEL 84.

REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH  
KABUPATEN LANGKAT MENURUT JENIS PENGELUARAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Belanja pegawai	1 64.235.061	172.557.634	198.965.272
2 Belanja Barang	16.651.567	25.229.081	35.729.492
3 Biaya Pemeliharaan	3.198.910	3.911.020	6.084.184
4 Belanja Perjalanan Dinas	1.196.220	1.391.102	2.153.404
5 Belanja Lain-lain	7.930.765	9.799.203	11.793.083
6 Angsuran Pinjaman/ Hutang dan Bunga	0	17.413.780	0
7 Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	2.673.900	0	3.801.500
8 Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	4.842.785	8.875.649	13.964.708
9 Pengeluaran tidak tersangka	4.474.359	64.698	0
<b>JUMLAH</b>	<b>205.203.567</b>	<b>239.242.167</b>	<b>272.491.643</b>

TABEL 85.

REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH  
KOTA SIBOLGA MENURUT JENIS PENGELUARAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Belanja pegawai	24.867.660	31.189.356	38.478.828
2 Belanja Barang	3.393.004	11.250.077	14.572.003
3 Biaya Pemeliharaan	5.416.703	6.406.984	2.043.278
4 Belanja Perjalanan Dinas	358.346	757.923	1.132.327
5 Belanja Lain-lain	9.485.044	9.936.309	12.639.435
6 Angsuran Pinjaman/ Hutang dan Bunga	49.546	46.539	45.086
7 Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	39.000	110.000	120.000
8 Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	1.315.943	1.891.496	5.183.233
9 Pengeluaran tidak tersangka	196.627	480.737	627.233
<b>JUMLAH</b>	<b>45.121.873</b>	<b>62.069.421</b>	<b>74.841.423</b>

TABEL 86.

REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH  
KOTA TANJUNG BALAI MENURUT JENIS PENGELUARAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Belanja pegawai	28.594.589	34.354.855	40.777.354
2 Belanja Barang	3.681.299	6.209.525	7.791.373
3 Biaya Pemeliharaan	1.067.060	2.356.738	2.555.040
4 Belanja Perjalanan Dinas	775.893	1.656.439	2.214.569
5 Belanja Lain-lain	4.024.308	7.747.057	10.537.020
6 Angsuran Pinjaman/ Hutang dan Bunga	177.754	151.955	228.692
7 Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	172.588	368.309	245.309
8 Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	912.170	6.019.789	7.585.804
9 Pengeluaran tidak tersangka	842.539	639.073	911.050
<b>JUMLAH</b>	<b>40.248.200</b>	<b>59.503.740</b>	<b>72.846.211</b>

TABEL 87.

REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH  
KOTA PEMATANG SIANTAR MENURUT JENIS PENGELUARAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Belanja pegawai	75.438.941	82.145.035	98.817.367
2 Belanja Barang	7.393.268	12.234.144	10.280.028
3 Biaya Pemeliharaan	1.783.797	2.698.697	3.217.073
4 Belanja Perjalanan Dinas	617.846	938.743	1.300.861
5 Belanja Lain-lain	5.369.396	7.397.573	8.774.222
6 Angsuran Pinjaman/ Hutang dan Bunga	1.738.314	906.935	1.485.671
7 Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	66.076	71.000	71.000
8 Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	1.658.718	5.959.649	8.064.834
9 Pengeluaran tidak tersangka	249.463	153.671	615.000
<b>JUMLAH</b>	<b>94.315.819</b>	<b>112.505.447</b>	<b>132.626.056</b>

TABEL 88.

REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH  
KOTA TEBING TINGGI MENURUT JENIS PENGELUARAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Belanja pegawai	39.243.036	42.892.229	54.907.052
2 Belanja Barang	7.769.135	15.369.038	17.781.916
3 Biaya Pemeliharaan	1.087.688	10.673.255	11.993.219
4 Belanja Perjalanan Dinas	286.977	449.387	937.460
5 Belanja Lain-lain	3.362.932	4.748.598	15.423.204
6 Angsuran Pinjaman/ Hutang dan Bunga	1.045.141	446.521	426.429
7 Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	0	0	990.000
8 Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	696.157	1.484.083	3.863.000
9 Pengeluaran tidak tersangka	15.533	8.704	100.000
JUMLAH	53.506.599	76.071.815	106.422.280

TABEL 89.

REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH  
KOTA MEDAN MENURUT JENIS PENGELUARAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Belanja pegawai	268.065.482	292.417.021	371.512.345
2 Belanja Barang	59.957.842	84.782.898	106.935.141
3 Biaya Pemeliharaan	20.765.018	56.375.984	86.768.848
4 Belanja Perjalanan Dinas	6.422.950	7.595.130	9.880.235
5 Belanja Lain-lain	30.206.815	52.525.124	87.067.713
6 Angsuran Pinjaman/ Hutang dan Bunga	0	10.000.000	44.084.475
7 Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	10.616.892	13.156.045	27.049.920
8 Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	16.363.896	22.511.557	57.071.724
9 Pengeluaran tidak tersangka	1.870.019	3.331.840	2.712.833
<b>JUMLAH</b>	<b>414.268.914</b>	<b>542.695.599</b>	<b>793.083.234</b>

TABEL 90.

REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH  
KOTA BINJAI MENURUT JENIS PENGELUARAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003 <sup>1)</sup>
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Belanja pegawai	58.634.716	77.822.773	84.725.230
2 Belanja Barang	9.233.362	16.208.085	22.920.530
3 Biaya Pemeliharaan	2.174.547	4.433.398	5.776.050
4 Belanja Perjalanan Dinas	1.487.592	2.125.790	2.673.970
5 Belanja Lain-lain	1.861.057	2.652.860	3.894.700
6 Angsuran Pinjaman/ Hutang dan Bunga	190.916	190.917	0
7 Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	348.991	466.041	607.360
8 Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	3.430.131	4.716.288	2.404.500
9 Pengeluaran tidak tersangka	205.268	189.983	160.430
<b>JUMLAH</b>	<b>77.566.580</b>	<b>108.806.135</b>	<b>123.162.770</b>

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui



TABEL 91.

REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH  
KOTA PADANG SIDEMPUAN MENURUT JENIS PENGELUARAN  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Jenis Penerimaan	2001 <sup>2)</sup>	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Belanja pegawai	0	49.437.173	67.334.281
2 Belanja Barang	0	8.511.492	11.825.414
3 Biaya Pemeliharaan	0	1.279.565	2.558.332
4 Belanja Perjalanan Dinas	0	925.639	1.781.994
5 Belanja Lain-lain	0	5.442.869	9.126.480
6 Angsuran Pinjaman/ Hutang dan Bunga	0	0	0
7 Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	0	0	0
8 Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	0	2.138.256	8.417.544
9 Pengeluaran tidak tersangka	0	71.270	0
JUMLAH	0	67.806.264	101.044.045

2) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan

TABEL 92.

REALISASI BELANJA RUTIN PEMERINTAH KAB/KOTA  
SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	2.093.770.079	2.383.037.991	2.864.031.881
1 Nias	117.364.618	155.979.894	171.631.586
2 Mandailing Natal	78.139.157	92.186.537	118.836.345
3 Tapanuli Selatan	211.774.766	214.996.216	244.064.952
4 Tapanuli Tengah	72.877.325	86.384.289	102.211.456
5 Toba Samosir	95.602.074	107.122.455	131.584.403
6 Tapanuli Utara	135.016.071	161.047.155	194.653.255
7 Labuhan Batu	170.136.869	205.608.463	258.894.999
8 Asahan	204.610.845	224.887.195	264.398.330
9 Simalungun	238.660.089	251.423.182	294.967.882
10 Dairi <sup>1)</sup>	102.531.444	112.608.140	146.788.760
11 Karo	114.268.749	139.460.701	166.514.281
12 Deli Serdang	347.584.505	392.091.597	496.993.989
13 Langkat	205.203.567	239.242.167	272.491.643
Kota	725.027.985	1.029.458.421	1.404.026.019
71 Sibolga	45.121.873	62.069.421	74.841.423
72 Tanjungbalai	40.248.200	59.503.740	72.846.211
73 Pematang Siantar	94.315.819	112.505.447	132.626.056
74 Tebing Tinggi	53.506.599	76.071.815	106.422.280
75 Medan	414.268.914	542.695.599	793.083.234
76 Binjai <sup>1)</sup>	77.566.580	108.806.135	123.162.770
77 Padang Sidempuan	2)	67.806.264	101.044.045
<b>JUMLAH</b>	<b>2.818.798.064</b>	<b>3.412.496.412</b>	<b>4.268.057.900</b>

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

2) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan

TABEL 93.

REALISASI BELANJA PEGAWAI PEMERINTAH KAB/KOTA  
SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	1.703.823.355	1.813.939.745	2.138.173.275
1 Nias	94.238.447	117.447.294	132.554.309
2 Mandailing Natal	62.926.450	72.008.915	87.066.225
3 Tapanuli Selatan	167.352.524	134.986.168	159.763.827
4 Tapanuli Tengah	57.122.951	60.647.559	71.629.351
5 Toba Samosir	79.571.994	82.851.745	98.798.696
6 Tapanuli Utara	115.725.981	135.481.942	149.109.062
7 Labuhan Batu	135.347.634	145.999.048	186.669.901
8 Asahan	157.588.284	166.202.258	197.333.695
9 Simalungun	202.219.217	212.904.575	250.811.530
10 Dairi <sup>1)</sup>	71.904.251	81.481.581	102.530.040
11 Karo	103.467.056	106.304.303	121.792.357
12 Deli Serdang	292.123.505	325.066.723	381.149.010
13 Langkat	164.235.061	172.557.634	198.965.272
Kota	494.844.424	610.258.442	756.552.457
71 Sibolga	24.867.660	31.189.356	38.478.828
72 Tanjungbalai	28.594.589	34.354.855	40.777.354
73 Pematang Siantar	75.438.941	82.145.035	98.817.367
74 Tebing Tinggi	39.243.036	42.892.229	54.907.052
75 Medan	268.065.482	292.417.021	371.512.345
76 Binjai <sup>1)</sup>	58.634.716	77.822.773	84.725.230
77 Padang Sidempuan	2)	49.437.173	67.334.281
JUMLAH	2.198.667.779	2.424.198.187	2.894.725.732

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

2) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan

TABEL 94.

REALISASI BELANJA BARANG PEMERINTAH KAB/KOTA  
SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	162.691.288	412.438.000	297.875.836
1 Nias	10.099.415	14.176.209	13.001.299
2 Mandailing Natal	9.231.886	12.091.066	16.037.351
3 Tapanuli Selatan	16.791.828	24.479.799	29.230.257
4 Tapanuli Tengah	5.594.527	7.387.132	8.574.303
5 Toba Samosir	6.846.941	7.959.654	14.448.294
6 Tapanuli Utara	10.207.575	12.115.226	20.465.824
7 Labuhan Batu	13.519.172	23.363.869	26.625.601
8 Asahan	20.113.083	24.294.624	28.685.245
9 Simalungun	14.375.229	212.904.575	23.021.396
10 Dairi <sup>1)</sup>	7.410.515	8.843.264	10.275.500
11 Karo	3.991.998	9.962.880	15.562.024
12 Deli Serdang	27.857.552	29.630.621	56.219.250
13 Langkat	16.651.567	25.229.081	35.729.492
Kota	91.427.910	154.565.259	192.106.405
71 Sibolga	3.393.004	11.250.077	14.572.003
72 Tanjungbalai	3.681.299	6.209.525	7.791.373
73 Pematang Siantar	7.393.268	12.234.144	10.280.028
74 Tebing Tinggi	7.769.135	15.369.038	17.781.916
75 Medan	59.957.842	84.782.898	106.935.141
76 Binjai <sup>1)</sup>	9.233.362	16.208.085	22.920.530
77 Padang Sidempuan	2)	8.511.492	11.825.414
<b>JUMLAH</b>	<b>254.119.198</b>	<b>567.003.259</b>	<b>489.982.241</b>

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

2) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan

TABEL 95.

REALISASI BELANJA PEMELIHARAAN PEMERINTAH KAB/KOTA  
SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	27.813.320	46.443.558	58.934.630
1 Nias	1.468.722	2.902.425	2.660.698
2 Mandailing Natal	1.131.156	1.964.498	3.032.147
3 Tapanuli Selatan	3.311.496	7.421.928	7.564.543
4 Tapanuli Tengah	1.026.904	2.190.072	2.740.560
5 Toba Samosir	908.440	1.154.063	1.644.380
6 Tapanuli Utara	1.409.557	2.626.624	2.828.422
7 Labuhan Batu	2.956.982	5.534.560	7.915.237
8 Asahan	3.023.909	4.593.221	4.724.682
9 Simalungun	2.885.893	2.350.293	2.905.182
10 Dairi <sup>1)</sup>	1.744.660	2.767.784	3.629.820
11 Karo	904.474	1.693.130	3.421.715
12 Deli Serdang	3.842.217	7.333.940	9.783.060
13 Langkat	3.198.910	3.911.020	6.084.184
Kota	32.294.813	84.224.621	114.911.840
71 Sibolga	5.416.703	6.406.984	2.043.278
72 Tanjungbalai	1.067.060	2.356.738	2.555.040
73 Pematang Siantar	1.783.797	2.698.697	3.217.073
74 Tebing Tinggi	1.087.688	10.673.255	11.993.219
75 Medan	20.765.018	56.375.984	86.768.848
76 Binjai <sup>1)</sup>	2.174.547	4.433.398	5.776.050
77 Padang Sidempuan	2)	1.279.565	2.558.332
JUMLAH	60.108.133	130.668.179	173.846.470

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

2) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan

TABEL 96.

REALISASI BELANJA PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	18.460.425	29.102.117	41.790.295
1 Nias	1.138.530	3.177.654	4.709.872
2 Mandailing Natal	1.270.298	1.643.240	2.621.980
3 Tapanuli Selatan	1.811.199	4.670.630	5.923.676
4 Tapanuli Tengah	624.137	1.520.612	1.696.661
5 Toba Samosir	1.184.435	915.775	1.454.841
6 Tapanuli Utara	1.094.573	1.550.529	2.209.502
7 Labuhan Batu	1.699.679	1.362.634	5.459.343
8 Asahan	1.591.100	2.302.849	2.572.319
9 Simalungun	2.949.652	3.735.587	4.029.220
10 Dairi <sup>1)</sup>	1.373.128	2.356.600	2.646.600
11 Karo	525.602	951.927	2.587.889
12 Deli Serdang	2.001.872	3.522.978	3.724.988
13 Langkat	1.196.220	1.391.102	2.153.404
Kota	9.949.604	14.449.051	19.921.416
71 Sibolga	358.346	757.923	1.132.327
72 Tanjungbalai	775.893	1.656.439	2.214.569
73 Pematang Siantar	617.846	938.743	1.300.861
74 Tebing Tinggi	286.977	449.387	937.460
75 Medan	6.422.950	7.595.130	9.880.235
76 Binjai <sup>1)</sup>	1.487.592	2.125.790	2.673.970
77 Padang Sidempuan	2)	925.639	1.781.994
JUMLAH	28.410.029	43.551.168	61.711.711

TABEL 97.

REALISASI BELANJA LAIN-LAIN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	97.355.977	158.992.486	191.218.680
1 Nias	3.940.463	8.747.107	13.212.787
2 Mandailing Natal	2.198.737	3.143.638	5.204.866
3 Tapanuli Selatan	11.250.186	30.815.375	28.793.659
4 Tapanuli Tengah	6.363.506	10.731.979	12.910.041
5 Toba Samosir	4.745.813	10.638.194	11.566.675
6 Tapanuli Utara	2.533.521	4.348.722	4.901.173
7 Labuhan Batu	6.939.118	16.134.330	12.787.807
8 Asahan	13.524.662	14.595.661	15.568.106
9 Simalungun	12.815.915	10.378.240	10.167.135
10 Dairi <sup>1)</sup>	4.959.522	13.037.987	19.450.590
11 Karo	4.808.983	9.166.598	19.749.007
12 Deli Serdang	15.344.786	17.455.452	25.113.751
13 Langkat	7.930.765	9.799.203	11.793.083
Kota	54.309.552	90.450.390	147.462.774
71 Sibolga	9.485.044	9.936.309	12.639.435
72 Tanjungbalai	4.024.308	7.747.057	10.537.020
73 Pematang Siantar	5.369.396	7.397.573	8.774.222
74 Tebing Tinggi	3.362.932	4.748.598	15.423.204
75 Medan	30.206.815	52.525.124	87.067.713
76 Binjai <sup>1)</sup>	1.861.057	2.652.860	3.894.700
77 Padang Sidempuan	2)	5.442.869	9.126.480
JUMLAH	151.665.529	249.442.876	338.681.454

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

2) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan

TABEL 98. REALISASI BELANJA RUTIN UNTUK ANGSURAN PINJAMAN/ HUTANG & BUNGA  
 PEMERINTAH KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA  
 2001 - 2003  
 (000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	3.921.420	32.574.442	6.107.397
1 Nias	994.500	0	0
2 Mandailing Natal	0	0	769.689
3 Tapanuli Selatan	0	677.453	0
4 Tapanuli Tengah	0	0	0
5 Toba Samosir	0	0	0
6 Tapanuli Utara	455.000	375.741	356.083
7 Labuhan Batu	0	0	803.548
8 Asahan	1.266.500	3.351.538	1.758.331
9 Simalungun	639.510	0	0
10 Dairi <sup>1)</sup>	0	0	0
11 Karo	0	10.226.924	0
12 Deli Serdang	565.910	529.006	2.419.746
13 Langkat	0	17.413.780	0
Kota	3.201.671	11.742.867	46.270.353
71 Sibolga	49.546	46.539	45.086
72 Tanjungbalai	177.754	151.955	228.692
73 Pematang Siantar	1.738.314	906.935	1.485.671
74 Tebing Tinggi	1.045.141	446.521	426.429
75 Medan	0	10.000.000	44.084.475
76 Binjai <sup>1)</sup>	190.916	190.917	0
77 Padang Sidempuan	2)	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>7.123.091</b>	<b>44.317.309</b>	<b>52.377.750</b>

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

2) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan



TABEL 99. REALISASI BELANJA RUTIN UNTUK GANJARAN/SUBSIDI/SUMBANGAN PEMERINTAH KAB/KOTA  
SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	25.812.201	21.485.533	42.253.276
1 Nias	1.620.990	1.908.060	3.528.672
2 Mandailing Natal	771.630	771.630	2.237.900
3 Tapanuli Selatan	8.425.617	4.623.750	5.001.175
4 Tapanuli Tengah	361.400	501.993	1.170.110
5 Toba Samosir	1.164.643	1.513.244	988.424
6 Tapanuli Utara	1.863.730	1.962.416	9.124.223
7 Labuhan Batu	4.794.047	4.979.000	5.794.020
8 Asahan	2.614.704	3.072.300	4.065.037
9 Simalungun	1.521.540	1.805.940	2.751.840
10 Dairi <sup>1)</sup>	0	0	0
11 Karo	0	347.200	650.000
12 Deli Serdang	0	0	3.140.375
13 Langkat	2.673.900	0	3.801.500
Kota	11.243.547	14.171.395	29.083.589
71 Sibolga	39.000	110.000	120.000
72 Tanjungbalai	172.588	368.309	245.309
73 Pematang Siantar	66.076	71.000	71.000
74 Tebing Tinggi	0	0	990.000
75 Medan	10.616.892	13.156.045	27.049.920
76 Binjai <sup>1)</sup>	348.991	466.041	607.360
77 Padang Sidempuan	2)	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>37.055.748</b>	<b>35.656.928</b>	<b>71.336.865</b>

TABEL 100. REALISASI BELANJA RUTIN YANG TIDAK TERMASUK BAGIAN LAIN PEMERINTAH KAB/KOTA  
SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	29.271.987	53.745.765	80.993.213
1 Nias	2.659.580	6.766.064	1.062.688
2 Mandailing Natal	359.000	413.550	1.466.187
3 Tapanuli Selatan	2.532.116	6.873.697	7.510.388
4 Tapanuli Tengah	1.150.355	1.882.000	2.558.725
5 Toba Samosir	750.932	1.527.456	1.948.665
6 Tapanuli Utara	1.272.000	2.548.800	5.314.240
7 Labuhan Batu	4.733.977	7.700.381	12.572.967
8 Asahan	4.494.190	6.234.863	9.075.415
9 Simalungun	1.026.722	1.432.476	1.044.760
10 Dairi <sup>1)</sup>	1.803.335	2.327.969	6.743.700
11 Karo	453.934	609.780	2.703.361
12 Deli Serdang	3.193.061	6.553.080	15.027.409
13 Langkat	4.842.785	8.875.649	13.964.708
Kota	24.377.015	44.721.118	92.590.639
71 Sibolga	1.315.943	1.891.496	5.183.233
72 Tanjungbalai	912.170	6.019.789	7.585.804
73 Pematang Siantar	1.658.718	5.959.649	8.064.834
74 Tebing Tinggi	696.157	1.484.083	3.863.000
75 Medan	16.363.896	22.511.557	57.071.724
76 Binjai <sup>1)</sup>	3.430.131	4.716.288	2.404.500
77 Padang Sidempuan	2)	2.138.256	8.417.544
<b>JUMLAH</b>	<b>53.649.002</b>	<b>98.466.883</b>	<b>173.583.852</b>

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

2) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan

TABEL 101. REALISASI BELANJA RUTIN YANG TIDAK TERSANGKA PEMERINTAH KAB/KOTA  
SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA  
2001 - 2003 (000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	24.620.106	10.247.342	6.685.279
1 Nias	1.203.971	855.081	901.261
2 Mandailing Natal	250.000	150.000	400.000
3 Tapanuli Selatan	299.800	447.416	277.427
4 Tapanuli Tengah	633.545	1.522.942	931.705
5 Toba Samosir	428.876	562.324	734.428
6 Tapanuli Utara	454.134	37.155	344.726
7 Labuhan Batu	146.260	534.641	266.575
8 Asahan	394.413	239.881	615.500
9 Simalungun	226.411	1.842.493	236.819
10 Dairi <sup>1)</sup>	13.336.033	1.792.955	1.512.510
11 Karo	116.702	197.959	47.928
12 Deli Serdang	2.655.602	1.999.797	416.400
13 Langkat	4.474.359	64.698	0
Kota	3.379.449	4.875.278	5.126.546
71 Sibolga	196.627	480.737	627.233
72 Tanjungbalai	842.539	639.073	911.050
73 Pematang Siantar	249.463	153.671	615.000
74 Tebing Tinggi	15.533	8.704	100.000
75 Medan	1.870.019	3.331.840	2.712.833
76 Binjai <sup>1)</sup>	205.268	189.983	160.430
77 Padang Sidempuan	2)	71.270	0
JUMLAH	27.999.555	15.122.620	11.811.825

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

2) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan

TABEL 102.

REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN PEMERINTAH KAB/KOTA  
SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT SEKTOR  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Sektor	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Industri	6.032.258	7.731.200	7.599.390
2 Pertanian dan Kehutanan	46.877.910	56.450.342	76.994.537
3 Sumber Daya Air dan Irigasi	236.257.732	58.230.350	123.931.033
4 Tenaga Kerja	1.831.778	6.334.884	5.884.051
5 Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	22.929.092	73.652.730	78.356.959
6 Transportasi	384.384.583	392.276.592	624.218.471
7 Pertambangan dan Energi	3.768.916	23.006.802	5.133.926
8 Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah	10.110.508	9.841.780	14.267.154
9 Pembangunan Daerah dan Pemukiman	93.539.779	218.282.004	243.729.777
10 Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	15.305.531	18.483.130	62.221.083
11 Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan thd Tuhan YME, Pemuda & Olah raga	89.347.540	129.175.773	250.134.306
12 Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	1.858.201	4.245.283	11.186.093
13 Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	60.494.753	61.106.388	141.045.064
14 Perumahan dan Pemukiman	76.170.213	99.380.867	204.304.453
15 Agama	7.465.253	12.644.250	25.749.483
16 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	18.201.722	34.134.017	39.119.479
17 Hukum	3.162.102	4.120.529	6.579.383
18 Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	150.292.313	181.981.413	279.847.240
19 Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	3.292.222	5.332.725	7.891.709
20 Keamanan dan Ketertiban Umum	5.440.351	10.645.327	39.915.393
21 Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawahan	1.192.638	9.809.966	694.844
JUMLAH	1.237.955.395	1.416.866.352	2.248.803.828

TABEL 103.

REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN PEMERINTAH  
KABUPATEN NIAS MENURUT SEKTOR  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Sektor	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Industri	116.229	223.033	362.383
2 Pertanian dan Kehutanan	4.641.183	5.256.010	2.210.611
3 Sumber Daya Air dan Irigasi	1.435.879	1.487.689	3.592.458
4 Tenaga Kerja	55.000	750.000	1.131.887
5 Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	2.676.055	832.426	2.552.911
6 Transportasi	38.875.440	24.984.473	44.405.676
7 Pertambangan dan Energi	0	23.450	0
8 Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah	1.096.653	518.765	169.608
9 Pembangunan Daerah dan Pemukiman	11.103.792	8.486.488	8.953.068
10 Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	34.910	0	104.301
11 Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan thd Tuhan YME, Pemuda & Olah raga	20.814.871	10.300.332	12.639.766
12 Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	0	117.852	869.943
13 Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	7.030.392	4.520.759	6.380.730
14 Perumahan dan Pemukiman	7.500.038	4.013.761	2.400.539
15 Agama	0	75.000	0
16 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	144.723	1.047.856	884.355
17 Hukum	0	75.000	220.000
18 Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	3.169.426	6.971.917	3.556.766
19 Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	121.639	166.940	79.990
20 Keamanan dan Ketertiban Umum	583.950	714.930	853.539
21 Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawahan	0	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>99.400.180</b>	<b>70.566.681</b>	<b>91.368.531</b>

TABEL 104.

REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN PEMERINTAH  
KABUPATEN MANDAILING NATAL MENURUT SEKTOR  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Sektor	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Industri	579.806	387.867	470.000
2 Pertanian dan Kehutanan	3.097.294	3.102.125	8.057.483
3 Sumber Daya Air dan Irigasi	4.100.590	3.656.059	5.398.021
4 Tenaga Kerja	180.000	558.966	325.000
5 Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	2.370.351	11.097.438	4.117.157
6 Transportasi	27.747.836	13.425.756	26.244.969
7 Pertambangan dan Energi	2.331.892	356.619	0
8 Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah	896.629	842.717	199.900
9 Pembangunan Daerah dan Pemukiman	4.766.381	13.330.687	6.957.319
10 Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	421.900	417.994	100.000
11 Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan thd Tuhan YME, Pemuda & Olah raga	4.532.633	7.371.708	10.592.695
12 Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	30.600	473.000	286.995
13 Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	2.666.495	3.791.875	6.998.527
14 Perumahan dan Pemukiman	6.503.386	4.588.992	0
15 Agama	1.120.000	1.553.489	0
16 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	100.000	225.000	99.980
17 Hukum	550.000	739.319	100.000
18 Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	20.492.575	14.080.339	18.895.705
19 Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	913.000	907.694	217.500
20 Keamanan dan Ketertiban Umum	0	200.000	699.883
21 Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawahan	0	0	0
JUMLAH	83.401.368	81.107.644	89.761.134

TABEL 105.

REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN MENURUT SEKTOR

2001 - 2003

(000 rupiah)

Sektor	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Industri	220.000	249.955	85.000
2 Pertanian dan Kehutanan	6.199.443	9.116.132	2.500.512
3 Sumber Daya Air dan Irigasi	1.954.459	3.425.270	6.403.903
4 Tenaga Kerja	147.899	499.955	100.000
5 Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	1.272.915	3.221.388	3.995.210
6 Transportasi	19.582.234	17.781.066	51.256.065
7 Pertambangan dan Energi	50.000	0	45.000
8 Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah	589.677	374.250	75.000
9 Pembangunan Daerah dan Pemukiman	3.274.897	6.098.507	792.445
10 Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	494.349	315.872	389.718
11 Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan thd Tuhan YME, Pemuda & Olah raga	4.641.744	10.921.664	5.052.665
12 Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	145.000	249.994	115.000
13 Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	9.620.620	7.095.201	3.416.861
14 Perumahan dan Pemukiman	463.114	3.165.317	2.163.430
15 Agama	500.000	0	1.948.225
16 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	908.499	219.780	70.000
17 Hukum	30.000	100.000	200.000
18 Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	9.607.083	14.494.895	12.426.733
19 Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	348.899	549.900	170.000
20 Keamanan dan Ketertiban Umum	370.000	1.531.780	120.000
21 Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawahan	0	0	0
JUMLAH	60.420.832	79.410.926	91.325.767

TABEL 106

REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH MENURUT SEKTOR  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Sektor	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Industri	142.000	164.935	85.000
2 Pertanian dan Kehutanan	3.706.040	2.927.867	2.500.512
3 Sumber Daya Air dan Irigasi	657.522	1.842.401	6.403.903
4 Tenaga Kerja	0	155.878	100.000
5 Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	516.585	1.492.079	3.995.210
6 Transportasi	17.788.640	29.888.888	51.256.065
7 Pertambangan dan Energi	0	0	45.000
8 Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah	386.940	887.440	75.000
9 Pembangunan Daerah dan Pemukiman	6.203.780	1.064.610	792.445
10 Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	1.367.380	496.669	389.718
11 Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan thd Tuhan YME, Pemuda & Olah raga	1.287.791	2.594.098	5.052.665
12 Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	55.000	30.000	115.000
13 Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	774.165	1.234.441	3.416.861
14 Perumahan dan Pemukiman	1.205.880	3.725.691	2.163.430
15 Agama	125.615	513.200	1.948.225
16 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	149.999	464.500	70.000
17 Hukum	50.000	50.000	200.000
18 Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	4.521.096	5.744.676	12.426.733
19 Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	181.835	160.000	170.000
20 Keamanan dan Ketertiban Umum	0	0	120.000
21 Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawahan	0	0	0
JUMLAH	39.120.268	53.437.373	91.325.767



TABEL 107.

REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN  
TOBA SAMOSIR MENURUT SEKTOR  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Sektor	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Industri	241.796	324.968	630.769
2 Pertanian dan Kehutanan	1.323.258	1.756.840	4.834.133
3 Sumber Daya Air dan Irigasi	1.236.521	5.812.901	0
4 Tenaga Kerja	61.000	682.097	0
5 Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	469.000	1.074.851	454.500
6 Transportasi	21.054.064	23.642.210	20.779.872
7 Pertambangan dan Energi	0	200.000	94.850
8 Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah	1.114.091	804.537	3.138.528
9 Pembangunan Daerah dan Pemukiman	6.289.225	12.737.880	27.406.416
10 Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	1.071.643	844.384	297.163
11 Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan thd Tuhan YME, Pemuda & Olah raga	3.152.832	4.901.620	8.445.202
12 Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	0	0	1.644.129
13 Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	2.476.387	1.881.258	4.378.023
14 Perumahan dan Pemukiman	5.435.456	6.429.880	0
15 Agama	124.717	180.805	246.862
16 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1.731.645	2.711.477	1.619.167
17 Hukum	284.775	863.898	652.948
18 Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	15.924.193	10.615.943	17.570.938
19 Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	35.999	340.009	374.959
20 Keamanan dan Ketertiban Umum	40.000	314.478	529.483
21 Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawahan	0	0	0
JUMLAH	62.066.602	76.120.036	93.097.942

TABEL 108

REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA MENURUT SEKTOR  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Sektor	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Industri	289.198	214.660	434.390
2 Pertanian dan Kehutanan	2.924.405	3.117.371	3.497.732
3 Sumber Daya Air dan Irigasi	790.000	2.287.180	13.665.387
4 Tenaga Kerja	50.000	465.200	332.000
5 Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	1.212.140	2.236.330	2.686.463
6 Transportasi	49.808.541	27.251.042	29.588.661
7 Pertambangan dan Energi	0	100.000	50.000
8 Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah	823.000	605.569	923.078
9 Pembangunan Daerah dan Pemukiman	13.617.407	11.329.330	3.848.714
10 Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	4.183.758	3.357.963	2.055.566
11 Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan thd Tuhan YME, Pemuda & Olah raga	5.778.843	9.422.161	16.040.346
12 Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	147.040	163.044	224.385
13 Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	4.166.582	6.207.482	9.568.653
14 Perumahan dan Pemukiman	2.470.706	2.349.682	3.947.651
15 Agama	360.000	399.416	499.955
16 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2.201.000	2.524.679	4.062.436
17 Hukum	180.000	163.192	290.500
18 Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	8.094.861	9.551.657	8.481.912
19 Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	106.460	100.000	218.500
20 Keamanan dan Ketertiban Umum	125.940	175.000	403.000
21 Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawahan	0	0	0
JUMLAH	97.329.881	82.020.958	100.819.329

TABEL 109.

REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN  
LABUHAN BATU MENURUT SEKTOR  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Sektor	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Industri	625.000	4.078.751	0
2 Pertanian dan Kehutanan	2.547.692	0	1.721.195
3 Sumber Daya Air dan Irigasi	742.910	0	3.972.716
4 Tenaga Kerja	148.197	0	32.400
5 Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	3.316.616	0	998.440
6 Transportasi	16.224.002	0	43.252.807
7 Pertambangan dan Energi	0	0	0
8 Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah	55.000	0	0
9 Pembangunan Daerah dan Pemukiman	1.117.613	35.896.064	880.693
10 Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	190.000	2.517.890	5.611.024
11 Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan thd Tuhan YME, Pemuda & Olah raga	9.653.469	15.138.503	11.192.527
12 Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	0	0	7.000
13 Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	2.578.258	0	4.625.143
14 Perumahan dan Pemukiman	4.301.712	0	9.052.090
15 Agama	330.735	1.196.200	0
16 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	0	0	0
17 Hukum	239.900	0	0
18 Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	6.307.636	0	3.990.077
19 Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	65.000	599.438	65.500
20 Keamanan dan Ketertiban Umum	897.820	1.043.000	0
21 Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawahan	0	6.664.429	694.844
JUMLAH	49.341.560	67.134.275	86.096.456

TABEL 110.

REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN PEMERINTAH  
KABUPATEN ASAHAN MENURUT SEKTOR  
2001 – 2003  
(000 rupiah)

Sektor	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Industri	57.100	407.145	396.945
2 Pertanian dan Kehutanan	1.582.519	4.240.377	4.517.904
3 Sumber Daya Air dan Irigasi	2.637.887	4.630.753	12.619.116
4 Tenaga Kerja	122.332	272.440	518.364
5 Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	2.760.787	1.932.948	3.748.544
6 Transportasi	26.728.647	45.054.303	42.997.134
7 Pertambangan dan Energi	4.650	516.037	358.885
8 Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah	1.551.221	974.934	583.987
9 Pembangunan Daerah dan Pemukiman	1.137.331	1.622.997	2.641.963
10 Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	749.064	817.634	1.473.937
11 Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan thd Tuhan YME, Pemuda & Olah raga	9.276.665	10.416.186	12.522.264
12 Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	529.750	795.637	805.000
13 Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	2.469.053	1.825.004	2.213.077
14 Perumahan dan Pemukiman	3.015.101	1.664.945	3.990.760
15 Agama	1.077.187	1.797.476	1.783.360
16 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1.165.717	2.318.277	2.198.569
17 Hukum	164.512	170.750	146.000
18 Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	7.186.074	10.345.935	16.500.326
19 Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	50.000	60.000	440.000
20 Keamanan dan Ketertiban Umum	216.837	576.790	559.999
21 Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawahan	0	0	0
JUMLAH	62.482.434	90.440.568	111.016.134

TABEL 111.

REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SIMALUNGUN MENURUT SEKTOR  
2001 – 2003  
(000 rupiah)

Sektor	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Industri	575.673	372.861	467.000
2 Pertanian dan Kehutanan	7.313.939	10.058.135	15.449.163
3 Sumber Daya Air dan Irigasi	8.968.985	13.581.564	25.575.211
4 Tenaga Kerja	0	1.133.664	810.000
5 Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	324.999	0	1.108.720
6 Transportasi	40.122.204	36.718.728	59.531.642
7 Pertambangan dan Energi	348.985	748.096	99.500
8 Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah	1.558.220	1.356.221	680.000
9 Pembangunan Daerah dan Pemukiman	11.740.045	25.034.566	20.450.942
10 Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	1.850.058	2.162.773	915.356
11 Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan thd Tuhan YME, Pemuda & Olah raga	2.556.764	5.090.020	18.239.053
12 Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	344.623	76.510	192.000
13 Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	3.201.332	2.020.965	5.248.250
14 Perumahan dan Pemukiman	4.469.390	4.317.349	5.860.488
15 Agama	463.350	610.000	2.483.169
16 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	578.901	659.719	2.374.500
17 Hukum	60.000	60.000	65.000
18 Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	10.042.426	8.071.435	7.653.408
19 Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	96.998	96.000	650.000
20 Keamanan dan Ketertiban Umum	480.000	89.947	240.000
21 Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawahan	0	1.805.940	0
JUMLAH	95.096.892	114.064.493	168.093.402

TABEL 112.

REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN PEMERINTAH  
KABUPATEN DAIRI MENURUT SEKTOR  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Sektor	2001	2002	2003 <sup>1)</sup>
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Industri	150.000	185.000	0
2 Pertanian dan Kehutanan	1.708.484	3.169.645	2.474.120
3 Sumber Daya Air dan Irigasi	0	865.576	6.965.490
4 Tenaga Kerja	253.000	678.500	175.720
5 Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	872.267	905.814	1.383.400
6 Transportasi	10.485.411	11.942.734	16.923.580
7 Pertambangan dan Energi	65.000	175.000	346.260
8 Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah	1.089.850	974.736	1.255.000
9 Pembangunan Daerah dan Pemukiman	1.995.200	4.201.000	5.817.000
10 Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	313.335	126.000	170.000
11 Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan thd Tuhan YME, Pemuda & Olah raga	3.512.061	4.694.566	8.275.340
12 Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	0	0	0
13 Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	1.754.980	2.820.291	5.107.500
14 Perumahan dan Pemukiman	1.443.078	3.568.318	2.303.800
15 Agama	0	0	0
16 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	85.000	232.000	500.000
17 Hukum	0	0	0
18 Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	6.509.551	6.526.274	6.600.000
19 Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	90.000	237.100	0
20 Keamanan dan Ketertiban Umum	0	0	0
21 Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawahan	0	1.156.800	0
JUMLAH	30.327.217	42.459.354	58.297.210

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

TABEL 113.

REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KARO MENURUT SEKTOR  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Sektor	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Industri	80.000	0	0
2 Pertanian dan Kehutanan	817.622	2.077.583	4.502.560
3 Sumber Daya Air dan Irigasi	148.640	807.328	8.820.742
4 Tenaga Kerja	0	0	30.000
5 Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	216.113	1.921.722	3.770.605
6 Transportasi	10.955.243	0	26.004.952
7 Pertambangan dan Energi	69.985	19.860.312	93.828
8 Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah	98.837	132.250	110.000
9 Pembangunan Daerah dan Pemukiman	2.666.870	1.935.000	2.322.000
10 Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	163.177	199.925	104.525
11 Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan thd Tuhan YME, Pemuda & Olah raga	149.900	861.615	3.488.317
12 Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	5.000	0	0
13 Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	2.145.585	537.830	2.702.611
14 Perumahan dan Pemukiman	0	0	0
15 Agama	39.250	109.340	131.900
16 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	540.090	2.008.203	3.937.674
17 Hukum	44.460	62.709	53.739
18 Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	3.456.480	3.381.707	9.448.502
19 Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	0	100.729	930.820
20 Keamanan dan Ketertiban Umum	0	154.999	7.404
21 Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawahan	0	0	0
JUMLAH	21.597.252	34.151.252	66.460.179

TABEL 114.

REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN  
DELI SERDANG MENURUT SEKTOR  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Sektor	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Industri	1.074.200	273.000	1.167.500
2 Pertanian dan Kehutanan	4.440.247	4.575.415	10.534.598
3 Sumber Daya Air dan Irigasi	5.800.172	11.594.145	19.705.222
4 Tenaga Kerja	0	175.000	0
5 Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	706.444	9.646.445	1.417.430
6 Transportasi	17.367.422	37.879.907	59.628.647
7 Pertambangan dan Energi	0	0	0
8 Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah	359.026	200.380	249.000
9 Pembangunan Daerah dan Pemukiman	6.583.074	4.688.157	9.926.292
10 Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	256.551	238.332	375.000
11 Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan thd Tuhan YME, Pemuda & Olah raga	7.363.245	4.650.315	17.734.759
12 Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	237.381	285.850	329.910
13 Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	8.767.341	6.463.209	13.471.215
14 Perumahan dan Pemukiman	4.014.999	1.681.959	355.000
15 Agama	1.424.905	1.967.400	3.051.642
16 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1.971.253	7.757.921	2.163.342
17 Hukum	261.923	423.919	1.571.700
18 Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	20.846.504	20.636.234	42.649.780
19 Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	345.125	364.520	253.949
20 Keamanan dan Ketertiban Umum	442.494	396.340	367.219
21 Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawahan	0	0	0
JUMLAH	82.262.306	113.898.448	184.952.205



TABEL 115.

REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN PEMERINTAH  
KABUPATEN LANGKAT MENURUT SEKTOR  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Sektor	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Industri	590.000	225.000	500.000
2 Pertanian dan Kehutanan	3.858.209	4.091.781	5.372.642
3 Sumber Daya Air dan Irigasi	1.109.076	2.416.187	9.909.645
4 Tenaga Kerja	365.000	450.737	627.673
5 Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	2.740.473	2.068.770	364.265
6 Transportasi	20.223.922	21.055.805	48.917.706
7 Pertambangan dan Energi	233.000	831.105	1.260.325
8 Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah	264.516	1.002.301	814.735
9 Pembangunan Daerah dan Pemukiman	4.643.603	4.720.694	7.887.650
10 Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	1.020.000	1.270.000	1.493.000
11 Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan thd Tuhan YME, Pemuda & Olah raga	3.616.871	5.758.327	11.847.019
12 Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	127.999	313.916	1.178.060
13 Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	3.100.440	1.323.472	5.347.358
14 Perumahan dan Pemukiman	3.672.774	1.872.898	9.236.336
15 Agama	141.195	176.800	767.522
16 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	590.739	1.734.865	3.246.999
17 Hukum	975.000	605.000	815.000
18 Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	10.023.474	8.835.234	15.911.689
19 Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	223.500	319.300	636.690
20 Keamanan dan Ketertiban Umum	1.127.000	3.189.600	5.952.113
21 Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawahan	0	0	0
JUMLAH	58.646.791	62.261.792	132.086.427

TABEL 116.

REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN PEMERINTAH  
KOTA SIBOLGA MENURUT SEKTOR  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Sektor	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Industri	0	0	0
2 Pertanian dan Kehutanan	0	0	0
3 Sumber Daya Air dan Irigasi	0	0	0
4 Tenaga Kerja	0	0	0
5 Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	0	3.232.622	6.293.605
6 Transportasi	62.750	6.164.630	6.378.520
7 Pertambangan dan Energi	0	0	0
8 Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah	0	120.910	1.487.544
9 Pembangunan Daerah dan Pemukiman	0	1.180.289	1.633.394
10 Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	0	0	5.895.151
11 Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan thd Tuhan YME, Pemuda & Olah raga	0	4.472.790	6.829.274
12 Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	0	0	0
13 Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	0	613.172	2.463.188
14 Perumahan dan Pemukiman	262.850	2.916.567	3.222.886
15 Agama	0	67.086	0
16 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	10.000	0	347.745
17 Hukum	0	0	0
18 Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	231.869	8.146.453	14.042.021
19 Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	0	0	0
20 Keamanan dan Ketertiban Umum	0	0	0
21 Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawah	0	0	0
JUMLAH	567.469	26.914.519	48.593.328

TABEL 117.

REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA  
TANJUNG BALAI MENURUT SEKTOR  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Sektor	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Industri	179.000	180.250	791.445
2 Pertanian dan Kehutanan	690.490	521.933	914.734
3 Sumber Daya Air dan Irigasi	36.800	2.464.705	468.425
4 Tenaga Kerja	0	259.952	385.000
5 Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	210.162	3.242.185	3.288.604
6 Transportasi	3.677.668	23.051.793	16.604.538
7 Pertambangan dan Energi	0	0	0
8 Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah	0	0	0
9 Pembangunan Daerah dan Pemukiman	1.348.983	9.278.104	8.128.593
10 Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	249.400	1.788.704	7.451.158
11 Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan thd Tuhan YME, Pemuda & Olah raga	2.342.199	12.459.092	9.946.329
12 Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	0	10.000	85.000
13 Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	1.347.753	2.807.312	3.218.207
14 Perumahan dan Pemukiman	2.658.629	4.697.674	1.583.736
15 Agama	118.888	318.916	1.063.494
16 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	232.000	576.891	540.200
17 Hukum	70.000	120.420	145.555
18 Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	2.855.107	8.406.812	8.333.283
19 Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	145.500	413.000	490.000
20 Keamanan dan Ketertiban Umum	27.000	75.000	330.000
21 Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawahan	1.192.638	182.797	0
JUMLAH	17.382.217	70.855.540	63.768.301

TABEL 118.

REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA  
PEMATANG SIANTAR MENURUT SEKTOR  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Sektor	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Industri	114.500	83.500	84.990
2 Pertanian dan Kehutanan	541.970	540.042	696.550
3 Sumber Daya Air dan Irigasi	0	0	0
4 Tenaga Kerja	54.350	39.995	45.000
5 Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	446.408	10.636.530	2.359.914
6 Transportasi	3.426.554	11.980.021	8.682.119
7 Pertambangan dan Energi	271.117	196.183	1.048.809
8 Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah	15.000	27.800	414.975
9 Pembangunan Daerah dan Pemukiman	1.073.829	385.572	706.998
10 Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	879.428	1.253.930	1.675.263
11 Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan thd Tuhan YME, Pemuda & Olah raga	1.007.458	894.779	3.504.657
12 Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	0	106.500	25.000
13 Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	548.998	2.241.586	2.933.543
14 Perumahan dan Pemukiman	628.799	8.488.982	10.664.955
15 Agama	25.000	125.389	776.952
16 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	809.428	1.062.379	2.342.788
17 Hukum	98.670	228.943	115.000
18 Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	2.114.522	5.743.944	10.242.429
19 Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	161.050	309.000	326.446
20 Keamanan dan Ketertiban Umum	10.800	20.000	0
21 Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawahan	0	0	0
JUMLAH	12.227.881	44.365.075	46.646.388

TABEL.119.

REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA  
TEBING TINGGI MENURUT SEKTOR  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Sektor	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Industri	402.400	0	0
2 Pertanian dan Kehutanan	499.921	0	0
3 Sumber Daya Air dan Irigasi	189.226	0	0
4 Tenaga Kerja	50.000	22.500	0
5 Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	570.196	681.550	547.000
6 Transportasi	2.802.863	4.258.962	5.377.000
7 Pertambangan dan Energi	394.287	0	0
8 Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah	0	0	30.000
9 Pembangunan Daerah dan Pemukiman	1.091.734	4.693.959	13.462.550
10 Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	332.515	191.502	422.144
11 Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan thd Tuhan YME, Pemuda & Olah raga	2.570.292	3.536.383	7.079.500
12 Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	42.100	56.380	73.000
13 Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	2.258.417	2.371.667	6.006.930
14 Perumahan dan Pemukiman	4.208.284	12.337.978	12.456.250
15 Agama	289.702	0	190.000
16 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	338.154	501.339	647.600
17 Hukum	85.500	199.795	252.000
18 Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	4.686.628	10.817.709	8.736.114
19 Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	228.262	0	0
20 Keamanan dan Ketertiban Umum	39.995	0	0
21 Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawahan	0	0	0
JUMLAH	21.080.476	39.669.724	55.280.088

TABEL 120.

REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN  
PEMERINTAH KOTA MEDAN MENURUT SEKTOR  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Sektor	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Industri	194.616	275.445	896.533
2 Pertanian dan Kehutanan	639.698	1.044.411	738.201
3 Sumber Daya Air dan Irigasi	0	0	0
4 Tenaga Kerja	30.000	0	67.007
5 Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	1.922.617	12.088.201	8.896.723
6 Transportasi	42.923.845	25.000.298	42.826.274
7 Pertambangan dan Energi	0	0	0
8 Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah	96.848	840.566	892.880
9 Pembangunan Daerah dan Pemukiman	12.294.321	67.739.628	80.185.077
10 Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	330.583	1.854.313	874.942
11 Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan thd Tuhan YME, Pemuda & Olah raga	4.280.072	10.031.222	32.311.749
12 Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	111.208	1.465.619	3.999.671
13 Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	3.040.417	10.262.692	29.564.428
14 Perumahan dan Pemukiman	17.754.921	23.137.697	88.836.710
15 Agama	942.709	2.766.687	8.123.956
16 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	6.199.717	8.624.656	6.262.931
17 Hukum	0	99.084	135.386
18 Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	7.399.124	14.899.935	17.725.253
19 Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	100.455	464.095	1.160.909
20 Keamanan dan Ketertiban Umum	975.015	2.158.463	8.740.525
21 Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawahan	0	0	0
JUMLAH	99.236.166	182.753.012	332.239.155

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

TABEL 121.

REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN  
PEMERINTAH KOTA BINJAI MENURUT SEKTOR  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Sektor	2001	2002	2003 <sup>1)</sup>
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Industri	400.740	55.000	66.000
2 Pertanian dan Kehutanan	345.496	664.680	680.160
3 Sumber Daya Air dan Irigasi	857.885	3.313.842	1.528.900
4 Tenaga Kerja	315.000	150.000	120.000
5 Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	324.964	4.900.424	6.652.390
6 Transportasi	14.527.297	29.048.786	16.148.550
7 Pertambangan dan Energi	0	0	187.660
8 Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah	115.000	70.000	215.000
9 Pembangunan Daerah dan Pemukiman	2.591.694	3.393.822	2.329.240
10 Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	1.397.480	474.500	1.910.410
11 Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan thd Tuhan YME, Pemuda & Olah raga	2.809.830	4.139.708	8.960.370
12 Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	82.500	51.000	262.000
13 Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	2.547.538	3.018.062	3.560.370
14 Perumahan dan Pemukiman	6.161.096	10.423.177	18.084.180
15 Agama	382.000	567.055	768.000
16 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	444.857	1.394.550	2.993.480
17 Hukum	67.362	158.500	330.000
18 Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	6.823.684	9.635.237	8.326.230
19 Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	78.500	145.000	40.000
20 Keamanan dan Ketertiban Umum	103.500	5.000	15.000
21 Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawahan	0	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>40.376.423</b>	<b>71.608.343</b>	<b>73.177.940</b>

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

TABEL 122.

REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA  
PADANG SIDEMPUNAN MENURUT SEKTOR  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Sektor	2001 <sup>2)</sup>	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
1 Industri	0	29.830	80.000
2 Pertanian dan Kehutanan	0	189.995	798.350
3 Sumber Daya Air dan Irigasi	0	44.750	376.163
4 Tenaga Kerja	0	40.000	79.000
5 Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	0	2.441.007	327.613
6 Transportasi	0	3.147.190	7.954.252
7 Pertambangan dan Energi	0	0	0
8 Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah	0	108.404	299.000
9 Pembangunan Daerah dan Pemukiman	0	464.650	1.661.482
10 Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	0	154.745	1.416.678
11 Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan thd Tuhan YME, Pemuda & Olah raga	0	1.520.684	3.610.954
12 Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	0	49.981	106.000
13 Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	0	70.110	2.514.929
14 Perumahan dan Pemukiman	0	0	518.315
15 Agama	0	219.991	184.000
16 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	0	69.925	239.380
17 Hukum	0	0	100.000
18 Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	0	5.075.077	6.727.227
19 Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	0	0	0
20 Keamanan dan Ketertiban Umum	0	0	90.000
21 Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawahan	0	0	0
JUMLAH	0	13.626.339	27.083.343

2) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan



TABEL 123.

REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN PEMERINTAH KAB/KOTA  
SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	841.493.583	967.073.800	1.387.727.180
1 Nias	99.400.180	70.566.681	91.368.531
2 Mandailing Natal	83.401.368	81.107.644	114.352.464
3 Tapanuli Selatan	60.420.832	79.410.926	89.761.134
4 Tapanuli Tengah	39.120.268	53.437.373	91.325.767
5 Toba Samosir	62.066.602	76.120.036	93.097.942
6 Tapanuli Utara	97.329.881	82.020.958	100.819.329
7 Labuhan Batu	49.341.560	67.134.275	86.096.456
8 Asahan	62.482.434	90.440.568	111.016.134
9 Simalungun	95.096.892	114.064.493	168.093.402
10 Dairi <sup>1)</sup>	30.327.217	42.459.354	58.297.210
11 Karo	21.597.252	34.151.252	66.460.179
12 Deli Serdang	82.262.306	113.898.448	184.952.205
13 Langkat	58.646.791	62.261.792	132.086.427
Kota	190.870.632	449.792.552	646.788.543
71 Sibolga	567.469	26.914.519	48.593.328
72 Tanjungbalai	17.382.217	70.855.540	63.768.301
73 Pematang Siantar	12.227.881	44.365.075	46.646.388
74 Tebing Tinggi	21.080.476	39.669.724	55.280.088
75 Medan	99.236.166	182.753.012	332.239.155
76 Binjai <sup>1)</sup>	40.376.423	71.608.343	73.177.940
77 Padang Sidempuan	2)	13.626.339	27.083.343
<b>JUMLAH</b>	<b>1.032.364.215</b>	<b>1.416.866.352</b>	<b>2.034.515.723</b>

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

2) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan

TABEL 124. REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN SEKTOR INDUSTRI PEMERINTAH KAB/KOTA  
SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	4.741.002	7.107.175	4.803.987
1 Nias	116.229	223.033	362.383
2 Mandailing Natal	579.806	387.867	290.000
3 Tapanuli Selatan	220.000	249.955	470.000
4 Tapanuli Tengah	142.000	164.935	85.000
5 Toba Samosir	241.796	324.968	630.769
6 Tapanuli Utara	289.198	214.660	434.390
7 Labuhan Batu	625.000	4.078.751	0
8 Asahan	57.100	407.145	396.945
9 Simalungun	575.673	372.861	467.000
10 Dairi <sup>1)</sup>	150.000	185.000	0
11 Karo	80.000	0	0
12 Deli Serdang	1.074.200	273.000	1.167.500
13 Langkat	590.000	225.000	500.000
Kota	1.291.256	624.025	1.918.968
71 Sibolga	0	0	0
72 Tanjungbalai	179.000	180.250	791.445
73 Pematang Siantar	114.500	83.500	84.990
74 Tebing Tinggi	402.400	0	0
75 Medan	194.616	275.445	896.533
76 Binjai <sup>1)</sup>	400.740	55.000	66.000
77 Padang Sidempuan	2)	29.830	80.000
<b>JUMLAH</b>	<b>6.032.258</b>	<b>7.731.200</b>	<b>6.722.955</b>

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

2) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan

TABEL 125.

REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN  
PEMERINTAH KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KAB/ KOTA  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	44.160.335	53.489.281	71.555.258
1 Nias	4.641.183	5.256.010	2.210.611
2 Mandailing Natal	3.097.294	3.102.125	5.882.605
3 Tapanuli Selatan	6.199.443	9.116.132	8.057.483
4 Tapanuli Tengah	3.706.040	2.927.867	2.500.512
5 Toba Samosir	1.323.258	1.756.840	4.834.133
6 Tapanuli Utara	2.924.405	3.117.371	3.497.732
7 Labuhan Batu	2.547.692	0	1.721.195
8 Asahan	1.582.519	4.240.377	4.517.904
9 Simalungun	7.313.939	10.058.135	15.449.163
10 Dairi <sup>1)</sup>	1.708.484	3.169.645	2.474.120
11 Karo	817.622	2.077.583	4.502.560
12 Deli Serdang	4.440.247	4.575.415	10.534.598
13 Langkat	3.858.209	4.091.781	5.372.642
Kota	2.717.575	2.961.061	3.827.995
71 Sibolga	0	0	0
72 Tanjungbalai	690.490	521.933	914.734
73 Pematang Siantar	541.970	540.042	696.550
74 Tebing Tinggi	499.921	0	0
75 Medan	639.698	1.044.411	738.201
76 Binjai <sup>1)</sup>	345.496	664.680	680.160
77 Padang Sidempuan	2)	189.995	798.350
<b>JUMLAH</b>	<b>46.877.910</b>	<b>56.450.342</b>	<b>75.383.253</b>

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

2) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan

TABEL 126. REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN SEKTOR SUMBER DAYA AIR & IRIGASI PEMERINTAH  
KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN / KOTA  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	29.582.641	52.407.053	121.089.120
1 Nias	1.435.879	1.487.689	3.592.458
2 Mandailing Natal	4.100.590	3.656.059	4.461.209
3 Tapanuli Selatan	1.954.459	3.425.270	5.398.021
4 Tapanuli Tengah	657.522	1.842.401	6.403.903
5 Toba Samosir	1.236.521	5.812.901	0
6 Tapanuli Utara	790.000	2.287.180	13.665.387
7 Labuhan Batu	742.910	0	3.972.716
8 Asahan	2.637.887	4.630.753	12.619.116
9 Simalungun	8.968.985	13.581.564	25.575.211
10 Dairi <sup>1)</sup>	0	865.576	6.965.490
11 Karo	148.640	807.328	8.820.742
12 Deli Serdang	5.800.172	11.594.145	19.705.222
13 Langkat	1.109.076	2.416.187	9.909.645
Kota	1.083.911	5.823.297	2.373.488
71 Sibolga	0	0	0
72 Tanjungbalai	36.800	2.464.705	468.425
73 Pematang Siantar	0	0	0
74 Tebing Tinggi	189.226	0	0
75 Medan	0	0	0
76 Binjai <sup>1)</sup>	857.885	3.313.842	1.528.900
77 Padang Sidempuan	2)	44.750	376.163
<b>JUMLAH</b>	<b>30.666.552</b>	<b>58.230.350</b>	<b>123.462.608</b>

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

2) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan

TABEL 127. REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN SEKTOR TENAGA KERJA PEMERINTAH KAB/KOTA  
SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN / KOTA  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	1.382.428	5.822.437	4.758.044
1 Nias	55.000	750.000	1.131.887
2 Mandailing Natal	180.000	558.966	675.000
3 Tapanuli Selatan	147.899	499.955	325.000
4 Tapanuli Tengah	0	155.878	100.000
5 Toba Samosir	61.000	682.097	0
6 Tapanuli Utara	50.000	465.200	332.000
7 Labuhan Batu	148.197	0	32.400
8 Asahan	122.332	272.440	518.364
9 Simalungun	0	1.133.664	810.000
10 Dairi <sup>1)</sup>	253.000	678.500	175.720
11 Karo	0	0	30.000
12 Deli Serdang	0	175.000	0
13 Langkat	365.000	450.737	627.673
Kota	449.350	512.447	696.007
71 Sibolga	0	0	0
72 Tanjungbalai	0	259.952	385.000
73 Pematang Siantar	54.350	39.995	45.000
74 Tebing Tinggi	50.000	22.500	0
75 Medan	30.000	0	67.007
76 Binjai <sup>1)</sup>	315.000	150.000	120.000
77 Padang Sidempuan	2)	40.000	79.000
<b>JUMLAH</b>	<b>1.831.778</b>	<b>6.334.884</b>	<b>5.454.051</b>

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

2) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan

TABEL 128. REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA DAERAH, KEUANGAN DAN KOPERASI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN / KOTA 2001 - 2003 (000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	19.454.745	36.430.211	37.501.987
1 Nias	2.676.055	832.426	2.552.911
2 Mandailing Natal	2.370.351	11.097.438	10.904.342
3 Tapanuli Selatan	1.272.915	3.221.388	4.117.157
4 Tapanuli Tengah	516.585	1.492.079	3.995.210
5 Toba Samosir	469.000	1.074.851	454.500
6 Tapanuli Utara	1.212.140	2.236.330	2.686.463
7 Labuhan Batu	3.316.616	0	998.440
8 Asahan	2.760.787	1.932.948	3.748.544
9 Simalungun	324.999	0	1.108.720
10 Dairi <sup>1)</sup>	872.267	905.814	1.383.400
11 Karo	216.113	1.921.722	3.770.605
12 Deli Serdang	706.444	9.646.445	1.417.430
13 Langkat	2.740.473	2.068.770	364.265
Kota	3.474.347	37.222.519	28.365.849
71 Sibolga	0	3.232.622	6.293.605
72 Tanjungbalai	210.162	3.242.185	3.288.604
73 Pematang Siantar	446.408	10.636.530	2.359.914
74 Tebing Tinggi	570.196	681.550	547.000
75 Medan	1.922.617	12.088.201	8.896.723
76 Binjai <sup>1)</sup>	324.964	4.900.424	6.652.390
77 Padang Sidempuan	2)	2.441.007	327.613
JUMLAH	22.929.092	73.652.730	65.867.836

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

2) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan

TABEL 129. REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN SEKTOR TRANSPORTASI PEMERINTAH KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN / KOTA  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	316.963.606	289.624.912	483.205.041
1 Nias	38.875.440	24.984.473	44.405.676
2 Mandailing Natal	27.747.836	13.425.756	13.673.330
3 Tapanuli Selatan	19.582.234	17.781.066	26.244.969
4 Tapanuli Tengah	17.788.640	29.888.888	51.256.065
5 Toba Samosir	21.054.064	23.642.210	20.779.872
6 Tapanuli Utara	49.808.541	27.251.042	29.588.661
7 Labuhan Batu	16.224.002	0	43.252.807
8 Asahan	26.728.647	45.054.303	42.997.134
9 Simalungun	40.122.204	36.718.728	59.531.642
10 Dairi <sup>1)</sup>	10.485.411	11.942.734	16.923.580
11 Karo	10.955.243	0	26.004.952
12 Deli Serdang	17.367.422	37.879.907	59.628.647
13 Langkat	20.223.922	21.055.805	48.917.706
Kota	67.420.977	102.651.680	103.971.253
71 Sibolga	62.750	6.164.630	6.378.520
72 Tanjungbalai	3.677.668	23.051.793	16.604.538
73 Pematang Siantar	3.426.554	11.980.021	8.682.119
74 Tebing Tinggi	2.802.863	4.258.962	5.377.000
75 Medan	42.923.845	25.000.298	42.826.274
76 Binjai <sup>1)</sup>	14.527.297	29.048.786	16.148.550
77 Padang Sidempuan	2)	3.147.190	7.954.252
<b>JUMLAH</b>	<b>384.384.583</b>	<b>392.276.592</b>	<b>587.176.294</b>

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

2) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan

TABEL 130.

REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
PEMERINTAH KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KAB/ KOTA  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	3.103.512	22.810.619	2.848.648
1 Nias	0	23.450	0
2 Mandailing Natal	2.331.892	356.619	500.000
3 Tapanuli Selatan	50.000	0	0
4 Tapanuli Tengah	0	0	45.000
5 Toba Samosir	0	200.000	94.850
6 Tapanuli Utara	0	100.000	50.000
7 Labuhan Batu	0	0	0
8 Asahan	4.650	516.037	358.885
9 Simalungun	348.985	748.096	99.500
10 Dairi <sup>1)</sup>	65.000	175.000	346.260
11 Karo	69.985	19.860.312	93.828
12 Deli Serdang	0	0	0
13 Langkat	233.000	831.105	1.260.325
Kota	665.404	196.183	1.236.469
71 Sibolga	0	0	0
72 Tanjungbalai	0	0	0
73 Pematang Siantar	271.117	196.183	1.048.809
74 Tebing Tinggi	394.287	0	0
75 Medan	0	0	0
76 Binjai <sup>1)</sup>	0	0	187.660
77 Padang Sidempuan	2)	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>3.768.916</b>	<b>23.006.802</b>	<b>4.085.117</b>

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

2) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan



TABEL 131. REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA DAN TELEKOMUNIKASI  
 PEMERINTAH KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KAB/ KOTA  
 2001 - 2003  
 (000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	9.883.660	8.674.100	8.995.236
1 Nias	1.096.653	518.765	169.608
2 Mandailing Natal	896.629	842.717	796.400
3 Tapanuli Selatan	589.677	374.250	199.900
4 Tapanuli Tengah	386.940	887.440	75.000
5 Toba Samosir	1.114.091	804.537	3.138.528
6 Tapanuli Utara	823.000	605.569	923.078
7 Labuhan Batu	55.000	0	0
8 Asahan	1.551.221	974.934	583.987
9 Simalungun	1.558.220	1.356.221	680.000
10 Dairi <sup>1)</sup>	1.089.850	974.736	1.255.000
11 Karo	98.837	132.250	110.000
12 Deli Serdang	359.026	200.380	249.000
13 Langkat	264.516	1.002.301	814.735
Kota	226.848	1.167.680	3.339.399
71 Sibolga	0	120.910	1.487.544
72 Tanjungbalai	0	0	0
73 Pematang Siantar	15.000	27.800	414.975
74 Tebing Tinggi	0	0	30.000
75 Medan	96.848	840.566	892.880
76 Binjai <sup>1)</sup>	115.000	70.000	215.000
77 Padang Sidempuan	2)	108.404	299.000
<b>JUMLAH</b>	<b>10.110.508</b>	<b>9.841.780</b>	<b>12.334.635</b>

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

2) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan

TABEL 132. REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH & PEMUKIMAN  
 PEMERINTAH KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KAB/ KOTA  
 2001 - 2003  
 (000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	75.139.218	131.145.980	111.690.908
1 Nias	11.103.792	8.486.488	8.953.068
2 Mandailing Natal	4.766.381	13.330.687	13.806.406
3 Tapanuli Selatan	3.274.897	6.098.507	6.957.319
4 Tapanuli Tengah	6.203.780	1.064.610	792.445
5 Toba Samosir	6.289.225	12.737.880	27.406.416
6 Tapanuli Utara	13.617.407	11.329.330	3.848.714
7 Labuhan Batu	1.117.613	35.896.064	880.693
8 Asahan	1.137.331	1.622.997	2.641.963
9 Simalungun	11.740.045	25.034.566	20.450.942
10 Dairi <sup>1)</sup>	1.995.200	4.201.000	5.817.000
11 Karo	2.666.870	1.935.000	2.322.000
12 Deli Serdang	6.583.074	4.688.157	9.926.292
13 Langkat	4.643.603	4.720.694	7.887.650
Kota	18.400.561	87.136.024	108.107.334
71 Sibolga	0	1.180.289	1.633.394
72 Tanjungbalai	1.348.983	9.278.104	8.128.593
73 Pematang Siantar	1.073.829	385.572	706.998
74 Tebing Tinggi	1.091.734	4.693.959	13.462.550
75 Medan	12.294.321	67.739.628	80.185.077
76 Binjai <sup>1)</sup>	2.591.694	3.393.822	2.329.240
77 Padang Sidempuan	2)	464.650	1.661.482
<b>JUMLAH</b>	<b>93.539.779</b>	<b>218.282.004</b>	<b>219.798.242</b>

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

2) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan

TABEL 133. REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP & TATA RUANG  
PEMERINTAH KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KAB/ KOTA  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	12.116.125	12.765.436	27.131.621
1 Nias	34.910	0	104.301
2 Mandailing Natal	421.900	417.994	14.042.031
3 Tapanuli Selatan	494.349	315.872	100.000
4 Tapanuli Tengah	1.367.380	496.669	389.718
5 Toba Samosir	1.071.643	844.384	297.163
6 Tapanuli Utara	4.183.758	3.357.963	2.055.566
7 Labuhan Batu	190.000	2.517.890	5.611.024
8 Asahan	749.064	817.634	1.473.937
9 Simalungun	1.850.058	2.162.773	915.356
10 Dairi <sup>1)</sup>	313.335	126.000	170.000
11 Karo	163.177	199.925	104.525
12 Deli Serdang	256.551	238.332	375.000
13 Langkat	1.020.000	1.270.000	1.493.000
Kota	3.189.406	5.717.694	19.645.746
71 Sibolga	0	0	5.895.151
72 Tanjungbalai	249.400	1.788.704	7.451.158
73 Pematang Siantar	879.428	1.253.930	1.675.263
74 Tebing Tinggi	332.515	191.502	422.144
75 Medan	330.583	1.854.313	874.942
76 Binjai <sup>1)</sup>	1.397.480	474.500	1.910.410
77 Padang Sidempuan	2)	154.745	1.416.678
<b>JUMLAH</b>	<b>15.305.531</b>	<b>18.483.130</b>	<b>46.777.367</b>

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

2) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan

TABEL 134. REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME, PEMUDA & OLAH RAGA PEMERINTAH KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KAB/ KOTA/ *ACTUAL SECOND STAGE* 2001 - 2003 (000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	76.337.689	92.121.115	150.531.713
1 Nias	20.814.871	10.300.332	12.639.766
2 Mandailing Natal	4.532.633	7.371.708	14.461.760
3 Tapanuli Selatan	4.641.744	10.921.664	10.592.695
4 Tapanuli Tengah	1.287.791	2.594.098	5.052.665
5 Toba Samosir	3.152.832	4.901.620	8.445.202
6 Tapanuli Utara	5.778.843	9.422.161	16.040.346
7 Labuhan Batu	9.653.469	15.138.503	11.192.527
8 Asahan	9.276.665	10.416.186	12.522.264
9 Simalungun	2.556.764	5.090.020	18.239.053
10 Dairi <sup>1)</sup>	3.512.061	4.694.566	8.275.340
11 Karo	149.900	861.615	3.488.317
12 Deli Serdang	7.363.245	4.650.315	17.734.759
13 Langkat	3.616.871	5.758.327	11.847.019
Kota	13.009.851	37.054.658	72.242.833
71 Sibolga	0	4.472.790	6.829.274
72 Tanjungbalai	2.342.199	12.459.092	9.946.329
73 Pematang Siantar	1.007.458	894.779	3.504.657
74 Tebing Tinggi	2.570.292	3.536.383	7.079.500
75 Medan	4.280.072	10.031.222	32.311.749
76 Binjai <sup>1)</sup>	2.809.830	4.139.708	8.960.370
77 Padang Sidempuan	2)	1.520.684	3.610.954
<b>JUMLAH</b>	<b>89.347.540</b>	<b>129.175.773</b>	<b>222.774.546</b>

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

2) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan

TABEL 135.

REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA  
2001 - 2003 (000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	1.622.393	2.505.803	6.452.422
1 Nias	0	117.852	869.943
2 Mandailing Natal	30.600	473.000	800.000
3 Tapanuli Selatan	145.000	249.994	286.995
4 Tapanuli Tengah	55.000	30.000	115.000
5 Toba Samosir	0	0	1.644.129
6 Tapanuli Utara	147.040	163.044	224.385
7 Labuhan Batu	0	0	7.000
8 Asahan	529.750	795.637	805.000
9 Simalungun	344.623	76.510	192.000
10 Dairi <sup>1)</sup>	0	0	0
11 Karo	5.000	0	0
12 Deli Serdang	237.381	285.850	329.910
13 Langkat	127.999	313.916	1.178.060
Kota	235.808	1.739.480	4.550.671
71 Sibolga	0	0	0
72 Tanjungbalai	0	10.000	85.000
73 Pematang Siantar	0	106.500	25.000
74 Tebing Tinggi	42.100	56.380	73.000
75 Medan	111.208	1.465.619	3.999.671
76 Binjai <sup>1)</sup>	82.500	51.000	262.000
77 Padang Sidempuan	2)	49.981	106.000
<b>JUMLAH</b>	<b>1.858.201</b>	<b>4.245.283</b>	<b>11.003.093</b>

TABEL 136. REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN SEKTOR KESEHATAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA 2001 - 2003 (000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	50.751.630	39.721.787	76.161.601
1 Nias	7.030.392	4.520.759	6.380.730
2 Mandailing Natal	2.666.495	3.791.875	6.703.653
3 Tapanuli Selatan	9.620.620	7.095.201	6.998.527
4 Tapanuli Tengah	774.165	1.234.441	3.416.861
5 Toba Samosir	2.476.387	1.881.258	4.378.023
6 Tapanuli Utara	4.166.582	6.207.482	9.568.653
7 Labuhan Batu	2.578.258	0	4.625.143
8 Asahan	2.469.053	1.825.004	2.213.077
9 Simalungun	3.201.332	2.020.965	5.248.250
10 Dairi <sup>1)</sup>	1.754.980	2.820.291	5.107.500
11 Karo	2.145.585	537.830	2.702.611
12 Deli Serdang	8.767.341	6.463.209	13.471.215
13 Langkat	3.100.440	1.323.472	5.347.358
Kota	9.743.123	21.384.601	50.261.595
71 Sibolga	0	613.172	2.463.188
72 Tanjungbalai	1.347.753	2.807.312	3.218.207
73 Pematang Siantar	548.998	2.241.586	2.933.543
74 Tebing Tinggi	2.258.417	2.371.667	6.006.930
75 Medan	3.040.417	10.262.692	29.564.428
76 Binjai <sup>1)</sup>	2.547.538	3.018.062	3.560.370
77 Padang Sidempuan	2)	70.110	2.514.929
<b>JUMLAH</b>	<b>60.494.753</b>	<b>61.106.388</b>	<b>126.423.196</b>

TABEL 137. REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN  
 PEMERINTAH KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KAB/ KOTA  
 2001 - 2003  
 (000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	44.495.634	37.488.132	41.141.494
1 Nias	7.500.038	4.013.761	2.400.539
2 Mandailing Natal	6.503.386	4.588.992	1.699.500
3 Tapanuli Selatan	463.114	3.165.317	0
4 Tapanuli Tengah	1.205.880	3.725.691	2.163.430
5 Toba Samosir	5.435.456	6.429.880	0
6 Tapanuli Utara	2.470.706	2.349.682	3.947.651
7 Labuhan Batu	4.301.712	0	9.052.090
8 Asahan	3.015.101	1.664.945	3.990.760
9 Simalungun	4.469.390	4.317.349	5.860.488
10 Dairi <sup>1)</sup>	1.443.078	3.568.318	2.303.800
11 Karo	0	109.340	131.900
12 Deli Serdang	4.014.999	1.681.959	355.000
13 Langkat	3.672.774	1.872.898	9.236.336
Kota	31.674.579	62.002.075	135.367.032
71 Sibolga	262.850	2.916.567	3.222.886
72 Tanjungbalai	2.658.629	4.697.674	1.583.736
73 Pematang Siantar	628.799	8.488.982	10.664.955
74 Tebing Tinggi	4.208.284	12.337.978	12.456.250
75 Medan	17.754.921	23.137.697	88.836.710
76 Binjai <sup>1)</sup>	6.161.096	10.423.177	18.084.180
77 Padang Sidempuan	2)	0	518.315
JUMLAH	76.170.213	99.490.207	41.141.494

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

2) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan

TABEL 138.

REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN SEKTOR AGAMA PEMERINTAH KAB/KOTA  
SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	5.706.954	10.477.989	16.418.409
1 Nias	0	75.000	0
2 Mandailing Natal	1.120.000	1.553.489	1.700.000
3 Tapanuli Selatan	500.000	0	0
4 Tapanuli Tengah	125.615	513.200	1.948.225
5 Toba Samosir	124.717	180.805	246.862
6 Tapanuli Utara	360.000	399.416	499.955
7 Labuhan Batu	330.735	1.196.200	0
8 Asahan	1.077.187	1.797.476	1.783.360
9 Simalungun	463.350	610.000	2.483.169
10 Dairi <sup>1)</sup>	0	0	0
11 Karo	39.250	2.008.203	3.937.674
12 Deli Serdang	1.424.905	1.967.400	3.051.642
13 Langkat	141.195	176.800	767.522
Kota	1.758.299	4.065.124	11.106.402
71 Sibolga	0	67.086	0
72 Tanjungbalai	118.888	318.916	1.063.494
73 Pematang Siantar	25.000	125.389	776.952
74 Tebing Tinggi	289.702	0	190.000
75 Medan	942.709	2.766.687	8.123.956
76 Binjai <sup>1)</sup>	382.000	567.055	768.000
77 Padang Sidempuan	2)	219.991	184.000
JUMLAH	7.465.253	14.543.113	27.524.811

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

2) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan



TABEL 139. REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN SEKTOR ILMU PENGETAHUAN & TEKNOLOGI  
 PEMERINTAH KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KAB/KOTA 2001 - 2003  
 (000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	10.167.566	19.958.783	17.983.087
1 Nias	144.723	1.047.856	884.355
2 Mandailing Natal	100.000	225.000	710.000
3 Tapanuli Selatan	908.499	219.780	99.980
4 Tapanuli Tengah	149.999	464.500	70.000
5 Toba Samosir	1.731.645	2.711.477	1.619.167
6 Tapanuli Utara	2.201.000	2.524.679	4.062.436
7 Labuhan Batu	0	0	0
8 Asahan	1.165.717	2.318.277	2.198.569
9 Simalungun	578.901	659.719	2.374.500
10 Dairi <sup>1)</sup>	85.000	232.000	500.000
11 Karo	540.090	62.709	53.739
12 Deli Serdang	1.971.253	7.757.921	2.163.342
13 Langkat	590.739	1.734.865	3.246.999
Kota	8.034.156	12.229.740	13.374.124
71 Sibolga	10.000	0	347.745
72 Tanjungbalai	232.000	576.891	540.200
73 Pematang Siantar	809.428	1.062.379	2.342.788
74 Tebing Tinggi	338.154	501.339	647.600
75 Medan	6.199.717	8.624.656	6.262.931
76 Binjai <sup>1)</sup>	444.857	1.394.550	2.993.480
77 Padang Sidempuan	2)	69.925	239.380
<b>JUMLAH</b>	<b>18.201.722</b>	<b>32.188.523</b>	<b>31.357.211</b>

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

2) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan

TABEL 140. REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN SEKTOR HUKUM PEMERINTAH KAB/KOTA  
SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	2.840.570	6.632.785	14.383.650
1 Nias	0	75.000	220.000
2 Mandailing Natal	550.000	739.319	874.000
3 Tapanuli Selatan	30.000	100.000	100.000
4 Tapanuli Tengah	50.000	50.000	200.000
5 Toba Samosir	284.775	863.898	652.948
6 Tapanuli Utara	180.000	163.192	290.500
7 Labuhan Batu	239.900	0	0
8 Asahan	1 64.512	170.750	146.000
9 Simalungun	60.000	60.000	65.000
10 Dairi <sup>1)</sup>	0	0	0
11 Karo	44.460	3.381.707	9.448.502
12 Deli Serdang	261.923	423.919	1.571.700
13 Langkat	975.000	605.000	815.000
Kota	321.532	806.742	1.077.941
71 Sibolga	0	0	0
72 Tanjungbalai	70.000	120.420	145.555
73 Pematang Siantar	98.670	228.943	115.000
74 Tebing Tinggi	85.500	199.795	252.000
75 Medan	0	99.084	135.386
76 Binjai <sup>1)</sup>	67.362	158.500	330.000
77 Padang Sidempuan	2)	0	100.000
<b>JUMLAH</b>	<b>3.162.102</b>	<b>7.439.527</b>	<b>15.461.591</b>

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

2) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan

TABEL 141.

REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN SEKTOR APARATUR PEMERINTAH DAN  
PENGAWASAN PEMERINTAH KAB/KOTA SE SUMATERA UTARA MENURUT KAB/ KOTA  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	126.181.379	115.975.268	155.843.154
1 Nias	3.169.426	6.971.917	3.556.766
2 Mandailing Natal	20.492.575	14.080.339	675.000
3 Tapanuli Selatan	9.607.083	14.494.895	18.895.705
4 Tapanuli Tengah	4.521.096	5.744.676	12.426.733
5 Toba Samosir	15.924.193	10.615.943	17.570.938
6 Tapanuli Utara	8.094.861	9.551.657	8.481.912
7 Labuhan Batu	6.307.636	0	3.990.077
8 Asahan	7.186.074	10.345.935	16.500.326
9 Simalungun	10.042.426	8.071.435	7.653.408
10 Dairi <sup>1)</sup>	6.509.551	6.526.274	6.600.000
11 Karo	3.456.480	100.729	930.820
12 Deli Serdang	20.846.504	20.636.234	42.649.780
13 Langkat	10.023.474	8.835.234	15.911.689
Kota	24.110.934	62.725.167	74.132.557
71 Sibolga	231.869	8.146.453	14.042.021
72 Tanjungbalai	2.855.107	8.406.812	8.333.283
73 Pematang Siantar	2.114.522	5.743.944	10.242.429
74 Tebing Tinggi	4.686.628	10.817.709	8.736.114
75 Medan	7.399.124	14.899.935	17.725.253
76 Binjai <sup>1)</sup>	6.823.684	9.635.237	8.326.230
77 Padang Sidempuan	2)	5.075.077	6.727.227
<b>JUMLAH</b>	<b>150.292.313</b>	<b>178.700.435</b>	<b>229.975.711</b>

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

2) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan

TABEL 142. REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN SEKTOR POLITIK, PENERANGAN, KOMUNIKASI & MEDIA MASSA PEMERINTAH KABUPATEN /KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN / KOTA 2001 - 2003 (000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	2.578.455	4.055.900	4.134.492
1 Nias	121.639	166.940	79.990
2 Mandailing Natal	913.000	907.694	1.020.000
3 Tapanuli Selatan	348.899	549.900	217.500
4 Tapanuli Tengah	181.835	160.000	170.000
5 Toba Samosir	35.999	340.009	374.959
6 Tapanuli Utara	106.460	100.000	218.500
7 Labuhan Batu	65.000	599.438	65.500
8 Asahan	50.000	60.000	440.000
9 Simalungun	96.998	96.000	650.000
10 Dairi <sup>1)</sup>	90.000	237.100	0
11 Karo	0	154.999	7.404
12 Deli Serdang	345.125	364.520	253.949
13 Langkat	223.500	319.300	636.690
Kota	24.110.934	1.331.095	2.017.355
71 Sibolga	231.869	0	0
72 Tanjungbalai	2.855.107	413.000	490.000
73 Pematang Siantar	2.114.522	309.000	326.446
74 Tebing Tinggi	4.686.628	0	0
75 Medan	7.399.124	464.095	1.160.909
76 Binjai <sup>1)</sup>	6.823.684	145.000	40.000
77 Padang Sidempuan	2)	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>26.689.389</b>	<b>5.386.995</b>	<b>6.151.847</b>

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

2) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan

TABEL 143. REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN SEKTOR KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM  
 PEMERINTAH KAB/KOTA SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KAB/ KOTA  
 2001 - 2003  
 (000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	4.284.041	8.231.865	30.402.464
1 Nias	583.950	714.930	853.539
2 Mandailing Natal	0	200.000	20.677.228
3 Tapanuli Selatan	370.000	1.531.780	699.883
4 Tapanuli Tengah	0	0	120.000
5 Toba Samosir	40.000	314.478	529.483
6 Tapanuli Utara	125.940	175.000	403.000
7 Labuhan Batu	897.820	1.043.000	0
8 Asahan	216.837	576.790	559.999
9 Simalungun	480.000	89.947	240.000
10 Dairi <sup>1)</sup>	0	0	0
11 Karo	0	0	0
12 Deli Serdang	442.494	396.340	367.219
13 Langkat	1.127.000	3.189.600	5.952.113
Kota	1.156.310	2.258.463	9.175.525
71 Sibolga	0	0	0
72 Tanjungbalai	27.000	75.000	330.000
73 Pematang Siantar	10.800	20.000	0
74 Tebing Tinggi	39.995	0	0
75 Medan	975.015	2.158.463	8.740.525
76 Binjai <sup>1)</sup>	103.500	5.000	15.000
77 Padang Sidempuan	2)	0	90.000
<b>JUMLAH</b>	<b>5.440.351</b>	<b>10.490.328</b>	<b>39.577.989</b>

1) Tahun 2003 data RAPBD yang telah disetujui

2) masih tergabung dgn Tapanuli Selatan

TABEL 144.

REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN SEKTOR SUBSIDI PEMBANGUNAN KEPADA  
DAERAH BAWAHAN PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA  
SE PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/ KOTA  
2001 - 2003  
(000 rupiah)

Kabupaten / Kota	2001	2002	2003
[1]	[2]	[3]	[4]
Kabupaten	0	9.627.169	694.844
1 Nias	0	0	0
2 Mandailing Natal	0	0	0
3 Tapanuli Selatan	0	0	0
4 Tapanuli Tengah	0	0	0
5 Toba Samosir	0	0	0
6 Tapanuli Utara	0	0	0
7 Labuhan Batu	0	6.664.429	694.844
8 Asahan	0	0	0
9 Simalungun	0	1.805.940	0
10 Dairi <sup>1)</sup>	0	1.156.800	0
11 Karo	0	0	0
12 Deli Serdang	0	0	0
13 Langkat	0	0	0
Kota	1.192.638	182.797	0
71 Sibolga	0	0	0
72 Tanjungbalai	1.192.638	182.797	0
73 Pematang Siantar	0	0	0
74 Tebing Tinggi	0	0	0
75 Medan	0	0	0
76 Binjai <sup>1)</sup>	0	0	0
77 Padang Sidempuan	2)	0	0
JUMLAH	1.192.638	9.809.966	694.844

Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia Dan Faktor Penyebab Perubahannya Serta Penduduk Miskin Sumatera Utara 2004 Dan Analisis Dampak APBD Terhadap IPM diterbitkan oleh Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara.

Publikasi ini memuat data indeks pembangunan manusia (IPM), penduduk miskin, dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota di seluruh Propinsi Sumatera Utara.

Indikator/informasi yang dapat diperoleh dari publikasi ini antara lain metode penghitungan IPM dan perubahannya, penduduuk miskin, dan dampak penggunaan dana APBD Kabupaten/Kota terhadap IPM dan penduduk miskin



Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara  
Jalan Asrama Nomor 179 Medan 20124  
Telepon : (061) 8459966, 8452343 Fax : (061) 8452773  
E-mail : [bps1200@medan.wasantara.net.id](mailto:bps1200@medan.wasantara.net.id)  
Home Page : <http://www.bps.go.id/>